LAPORAN PENDAHULUAN

MENGIDENTIFIKASI PENGEMBANGAN KOTA PELABUHAN BAKAUHENI SEBAGAI KSPN KRAKATAU–BAKAUHENI MELALUI TRASPORTASI MULTIMODA, PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR, MITIGASI BENCANA, PELESTARIAN BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN PARIWISATA MEWUJUDKAN PARIWISATA YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN

Disusun Oleh: Studio Proses Perencanaan RA



DOSEN PENGAMPU

DR. GOLDIE MELINDA WIJAYANTI, S.T.,M.T
HEDYYATI ANISIA BR. SINAMO, S.P.W.K.,M.P.W.K

PROGRAM STUDIO PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS INSRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Pendahuluan yang berjudul "Pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai KSPN Krakatau–Bakauheni perlu mengintegrasikan transportasi multimoda, pengelolaan lingkungan pesisir, mitigasi bencana, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal guna mewujudkan pariwisata yang aman dan berkelanjutan." merupakan salah satu persiapan kami sebelum melakukan survei untuk Studio Proses Perencanaan dapat terselesaikan.

Terima kasih kepada Ibu Dr. Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T. dan Ibu Hediyati Anisia Br Sinamo, S.P.W.K., M.P.W.K. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Studio Proses Perencanaan serta M. Raihan Setiawan dan Yusriyyah Meilisa Labiibah selaku asisten yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap proses mata kuliah Studio Proses Perencanaan yang dilaksanakan. Tidak lupa terima kasih kepada rekan - rekan satu kelas RA, rekan-rekan angkatan 2024 dan juga seluruh pihak yang telah membantu memberikan semangat, saran, dan masukan dalam setiap proses pengerjaan laporan pendahuluan ini.

Pada Laporan Pendahuluan ini sangat di mungkinkan adanya kekurangan yang masih harus diperbaiki lagi. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan dengan senang hati diterima untuk membantu dalam proses penulisan selanjutnya yang lebih baik lagi. Semoga Laporan Pendahuluan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

Lampung Selatan, Oktober 2025

Kelas Studio Proses Perencanaan RA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR **8**
DAFTAR TABEL **9**
BAB I
PENDAHULUAN **10**
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 12
1.3.1 Tujuan 12
1.3.2 Sasaran 13
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 14
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 14
1.4.2 Ruang Lingkup Materi 15
1.4.2.2 Aspek Fisik Lingkungan 15
1.4.2.3 Aspek Infrastruktur 16
1.4.2.4 Aspek Kebencanaan 16
1.4.2.5 Aspek sosial kependudukan 16
1.4.3 Ruang Lingkup Waktu 17
1.5 Kerangka Berpikir 18
1.6 Sistematika Penulisan 19
BAB II
TINJAUAN LITERATUR **20**
2.1 Tinjauan Literatur Terkait Isu 20
2.1.1 Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan KSPN 20
2.1.3 Pengelolaan Lingkungan Pesisir 21
2.1.4 Mitigasi Bencana dan Ketangguhan Wilayah 21
2.1.5 Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal 21
2.1.6 Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Kelembagaan 22
2.2 Tinjauan Literatur Terkait Aspek 22
2.2.1 Aspek Spasial Keruangan 22
2.2.1.1 Struktur Ruang 23
2.2.1.2 Pola Ruang 24
2.2.1.3 Kawasan Strategis Kecamatan Bakauheni 25
2.2.2 Aspek Fisik Lingkungan 26
2.2.2.1. Daya Dukung Ekosistem Kecamatan Bakauheni 26

2.2.2.2. Daya Tampung Lingkungan terhadap Aktivitas Manusia..... 27
2.2.2.3. Kualitas Tanah..... 27
2.2.2.4. Kualitas Air.....27
2.2.2.5. Kondisi Geomorfologi dan Topografi.....27
2.2.3 Aspek Infrastruktur.....28
2.2.3.1 Pengertian Infrastruktur..... 28
2.2.3.2 Klasifikasi Infrastruktur.....29
2.2.3.3 Jenis Infrastruktur..... 29
2.2.3.4 Dampak pemekaran wilayah positif.....33
2.2.3.5 Dampak pemekaran wilayah negatif.....33
2.2.4 Aspek Kebencanaan.....33
2.2.4.1 Risiko Bencana..... 33
2.2.4.1.1 Jenis Bencana.....34
2.2.4.2 Sistem Peringatan Dini..... 36
2.2.4.3 Jalur Evakuasi Bencana..... 36
2.2.5 Aspek Sosial Kependudukan
2.2.5.1 Pengertian Sosial Kependudukan..... 37
2.2.5.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....39
2.2.5.4 Kesehatan Masyarakat..... 39
2.2.5.5 Mata Pencaharian dan Ekonomi Lokal.....39
2.2.5.6 Pelestarian dan Inovasi Budaya Lokal.....39
2.2.5.7 Partisipasi Masyarakat..... 40
2.2.5.8 Dinamika Sosial dan Peran Pemerintah Lokal.....40
2.2.6 Aspek Sosial Ekonomi.....40
2.2.7 Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan.....42
2.2.7.1 Kelembagaan.....42
2.2.7.2 Pembiayaan.....43
2.2.7.3 Koordinasi.....43
2.2.7.4 Kebijakan..... 43
2.2.7.5 Pengelolaan APBD dalam Pengembangan Wilayah.....44
2.2.7.6 Alokasi Dana dan Investasi Pembangunan.....44
2.2.7.7 Peran Lembaga Swasta dalam Pengembangan Wilayah.....45
2.2.7.8 Lembaga Daerah dan Efektivitas Kelembagaan.....45
2.2.7.9 Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah.....46
BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH.....47
3.1 Konstelasi Wilayah Studio.....47
3.2 Gambaran Umum Kecamatan Bakauheni.....49

3.2.1 Administrasi....49
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Bakauheni....49
Tabel 3. 1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bakauheni....50
3.2.2 Demografi....51
Tabel 3. 2 Tabel kepadatan penduduk Kecamatan Bakauheni....52
3.2.3 Ekonomi....52
3.2.4 Geografi....52
3.3.5 Potensi Bencana....53
3.3 Tinjauan Dokumen Rencana....53
3.3.1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan....53
3.3.2 RTRW Provinsi Lampung....54
3.3.3 RTRW Kabupaten Lampung Selatan....54
3.3.4 RZWP3K....54
3.3.5 RTRW Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan....55
3.3.6 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan....55
3.3.7 RIPPDA Kabupaten Lampung Selatan....56
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN....57
4.1 Metodologi Pengumpulan Data....57
4.1.1 Pengumpulan Data Primer....57
4.1.1.1 Wawancara....57
4.1.1.2 Kuesioner....58
4.1.1.3 Observasi....59
4.1.1.4 traffic counting....60
4.1.1.5 Metode Pengumpulan Sampel....61
4.1.2 Pengumpulan Data Sekunder....63
4.2 Metodologi Analisis Data....65
4.2.1 Aspek Spasial Keruangan....65
4.2.2 Aspek Infrastruktur....65
4.2.3 Aspek Fisik Lingkungan....66
4.2.4 Aspek Kebencanaan....66
4.2.5 Aspek Sosial Kependudukan....67
4.2.6 Aspek Sosial Ekonomi....67
4.2.7 Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan....68
4.3 Kerangka Analisis....69
4.3.1.1 Aspek Spasial Keruangan....69
Tabel 4.1 Tabel UGS Aspek Spasial Keruangan....69
4.3.1.2 Aspek Fisik Lingkungan....71

Tabel 4.2 Tabel UGS Fisik Lingkungan....71
4.3.1.3 Aspek Kebencanaan....72
Tabel 4.3 Tabel UGS Aspek Kebencanaan....72
4.3.1.4 Aspek Infrastruktur....73
Tabel 4.4 Tabel UGS Aspek Infrastruktur....73
4.3.1.5 Aspek Sosial Kependudukan....75
Tabel 4.5 Tabel UGS Aspek Kependudukan....75
4.3.1.6 Aspek Sosial Ekonomi....76
Tabel 4.6 Tabel UGS Aspek Sosial Ekonomi....76
4.3.1.7 Aspek Kelembagaan dan pembiayaan....77
Tabel 4.6 Tabel UGS Aspek Kelembagaan dan pembiayaan....77
4.3.3 Flowchart....80
4.3.3.1 Aspek Spasial Keruangan....81
4.3.3.2 Aspek Fisik Lingkungan....82
4.3.3.3 Aspek Kebencanaan....83
4.3.3.4 Aspek Infrastruktur....84
4.3.3.5 Aspek Sosial Kependudukan....85
4.3.3.6 Aspek Sosial Ekonomi....86
BAB V
RENCANA KEGIATAN....88
5.1 Rencana Kegiatan Studio....88
5.2 Rencana Kegiatan Survey....90
5.4 Timeline Survey Studio....92
5.4 Struktur Organisasi Studio RA....99
DAFTAR PUSTAKA....102
LAMPIRAN....103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Bakauheni……48
Gambar 3.2 Gambar 3.2 Peta kepadatan Penduduk Kecamatan Bakauheni……..50
Gambar 4.1 diagram Fishbone……...77

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bakauheni 49
Tabel 3. 2 Tabel kepadatan penduduk Kecamatan Bakauheni 51
Tabel 4.1 Tabel UGS Aspek Spasial Keruangan 68
Tabel 4.2 Tabel UGS Fisik Lingkungan 70
Tabel 4.3 Tabel UGS Aspek Kebencanaan 71
Tabel 4.4 Tabel UGS Aspek Infrastruktur 72
Tabel 4.5 Tabel UGS Aspek Kependudukan 74
Tabel 4.6 Tabel UGS Aspek Sosial Ekonomi 75
Tabel 4.7 Tabel UGS Aspek Kelembagaan dan pembiayaan 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan wilayah strategis di ujung selatan Pulau Sumatra yang berperan penting sebagai gerbang utama konektivitas antar pulau, khususnya melalui Pelabuhan Bakauheni yang menghubungkan Lampung dengan Pulau Jawa. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Lampung sebagai simpul mobilitas nasional dan pintu masuk utama bagi arus barang, jasa, serta manusia di koridor ekonomi Sumatera–Jawa. Selain potensi transportasinya, Provinsi Lampung juga memiliki kekayaan sumber daya alam, pesisir, dan budaya yang beragam, yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan berbasis keberlanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009).

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua dan memiliki peran historis penting dalam perkembangan Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Lampung. Secara geografis, Lampung Selatan menempati posisi strategis di bagian paling selatan provinsi, dengan batas wilayah utara Kabupaten Pesawaran dan Lampung Tengah, batas timur Laut Jawa, serta batas barat Samudra Hindia. Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 17 kecamatan dengan pusat pemerintahan di Kalianda. Wilayah ini memiliki luas ±2.109,74 km² dan garis pantai yang panjang, sehingga menjadikannya sebagai kawasan pesisir dengan potensi ekonomi maritim dan pariwisata yang besar. Sejak diresmikannya Pelabuhan Bakauheni pada tahun 1972, wilayah ini berkembang menjadi simpul utama transportasi laut dan darat, sekaligus pintu gerbang Sumatera menuju Jawa. Pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Trans Sumatera semakin memperkuat posisi Lampung Selatan sebagai pusat konektivitas dan logistik regional (Anwar & Shafira, 2020). Selain itu, Lampung Selatan juga memiliki potensi ekosistem pesisir, pertanian, dan kelautan yang

mendukung sektor pariwisata berkelanjutan (Fardani, Delis, P. C., & Caesario, 2021). Oleh karena itu, kedudukan Lampung Selatan di tingkat provinsi tidak hanya sebagai pintu masuk utama mobilitas antar pulau, tetapi juga sebagai kawasan strategis pengembangan ekonomi dan pariwisata nasional.

pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni, isu strategis yang muncul perlu dikaji melalui tujuh aspek utama pembangunan wilayah. Dari aspek spasial dan keruangan, pengembangan struktur dan pola ruang KSPN Krakatau–Bakauheni berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata dan perekonomian, sehingga memerlukan pengendalian tata ruang yang terpadu agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Dari aspek fisik dan lingkungan, penting untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir Kecamatan Bakauheni agar pariwisata berkembang secara aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari aspek kebencanaan, keterbatasan sistem peringatan dini serta belum optimalnya jalur evakuasi meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan pelaku wisata terhadap potensi erupsi Gunung Anak Krakatau, tsunami, banjir rob, dan abrasi pantai (Manik & Timotiwu, 2023). Aspek infrastruktur menyoroti belum optimalnya sistem transportasi multimoda yang menyebabkan ketimpangan konektivitas dan hambatan distribusi logistik antar daerah. Dari sisi sosial kependudukan, pengembangan Bakauheni Harbour City sebagai bagian dari KSPN Krakatau–Bakauheni berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan pariwisata, namun juga menuntut kesiapan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan sosial. Sementara pada aspek sosial ekonomi, pengembangan kawasan pariwisata perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan UMKM, serta peningkatan pendapatan lokal. Terakhir, aspek kelembagaan dan pembiayaan menyoroti belum optimalnya implementasi Proyek Strategis Nasional di Kecamatan Bakauheni, yang berdampak pada keterbatasan dukungan kelembagaan dan pembiayaan pembangunan (Reza, Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Kiluan Lampung, 2022). Dengan pengelolaan yang sinergis pada tujuh aspek tersebut, pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni diharapkan dapat mewujudkan kawasan pariwisata yang aman, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Lampung Selatan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam upaya mengembangkan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni, diperlukan integrasi berbagai aspek pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan. Namun, proses pengembangan kawasan ini menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi infrastruktur, lingkungan, sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi integrasi transportasi multimoda dalam mendukung konektivitas dan aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni?
2. Sejauh mana pengelolaan lingkungan pesisir telah diterapkan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir di sekitar Kota Pelabuhan Bakauheni?
3. Apa saja upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan kawasan wisata terhadap risiko bencana alam?
4. Bagaimana pelestarian nilai-nilai budaya lokal diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata agar tidak terjadi degradasi identitas budaya masyarakat setempat?
5. Apa peran pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat pesisir, dalam menciptakan pariwisata yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di kawasan Bakauheni?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam studio proses perencanaan ini adalah untuk mengidentifikasi isu strategis Kecamatan Bakauheni mengenai Pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai KSPN Krakatau–Bakauheni perlu mengintegrasikan transportasi multimoda, pengelolaan lingkungan pesisir, mitigasi bencana, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal guna mewujudkan pariwisata yang aman dan berkelanjutan pada 7 aspek perencanaan, yaitu Aspek Sosial Kependudukan, Aspek Fisik dan Lingkungan, Aspek Kebencanaan, Aspek Infrastruktur, Aspek Sosial Ekonomi, Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan dan Aspek Spasial Keruangan.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari ketujuh aspek Studio Proses Perencanaan pada Pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai KSPN Krakatau–Bakauheni perlu mengintegrasikan transportasi multimoda, pengelolaan lingkungan pesisir, mitigasi bencana, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal guna mewujudkan pariwisata yang aman dan berkelanjutan, yaitu :

1. Aspek Spasial Keruangan

   Mengidentifikasi struktur dan pola ruang Kecamatan Bakauheni sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni yang berorientasi pada keterpaduan fungsi kawasan, konektivitas, dan pemanfaatan ruang berkelanjutan..

2. Aspek Fisik dan Lingkungan

   Mengidentifikasi daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir serta kualitas tanah, air, dan udara di Kecamatan Bakauheni guna mendukung perencanaan pengembangan kawasan wisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3. Aspek kebencanaan

   Analisis dilakukan untuk menilai risiko bencana di Kecamatan Bakauheni, meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau, banjir, banjir rob, abrasi, dan tsunami; mengidentifikasi kesiapan sistem peringatan dini di wilayah pesisir; serta menilai efektivitas jalur evakuasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

4. Aspek Infrastruktur

   Sasaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kualitas dan persebaran sarana, prasarana, dan utilitas di Kecamatan Bakauheni guna menilai tingkat ketersediaan dan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah.

5. Aspek Sosial Kependudukan

   Menganalisis kualitas dan kuantitas penduduk di Kecamatan Bakauheni serta mengidentifikasi potensi dan pelestarian nilai budaya lokal yang dapat mendukung pengembangan pariwisata dan menjaga kearifan lokal di kawasan sekitar Bakauheni Harbour City (BHC)

6. Aspek Sosial Ekonomi

   Mengidentifikasi jumlah UMKM yang ada di kecamatan Bakauheni dalam sektor pariwisata dan perdagangan dan menganalisis pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan terhadap PDRB Lampung Selatan, dan Mengidentifikasi kesempatan kerja baru dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan serta daya beli masyarakat lokal pada sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan di BHC

7. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

   Mengidentifikasi pengelolaan infrastruktur dan transportasi oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan Kecamatan Bakauheni serta menganalisis efektivitas pembiayaan dan peran lembaga dalam proses pengembangannya merupakan upaya untuk memahami sejauh mana kebijakan, koordinasi, dan investasi yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan dan meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, serta daya saing ekonomi di Kecamatan Bakauheni.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam studio proses perencanaan yang dilakukan terdiri dari tiga hal, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi dan ruang lingkup waktu.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada studio dasar perencanaan ini yaitu, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Terdapat 5 desa pada wilayah kajian untuk Studio Proses Perencanaan ini, yaitu: Totoharjo, Kelawi, Bakauheni, Hata, dan Semanak.
Secara administrasi letak Kecamatan Bakauheni adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Penengahan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ketapang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi adalah batasan atau cakupan pembahasan suatu topik yang menjelaskan apa saja aspek, submateri, atau poin-poin penting yang akan dipelajari atau dibahas dalam suatu kegiatan, penelitian, atau pembelajaran. Ruang lingkup materi berfungsi untuk memperjelas fokus agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan utama dan tetap terarah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

1.4.2.1 Aspek Spasial keruangan

Pada aspek spasial keruangan, kajian difokuskan pada keterpaduan pola dan struktur ruang di lima desa dalam wilayah Kecamatan Bakauheni. Analisis mencakup kondisi jaringan jalan, tingkat konektivitas antar desa, dan keterhubungan wilayah terhadap simpul utama seperti Pelabuhan Bakauheni serta akses menuju destinasi wisata di KSPN Krakatau–Bakauheni. Selain itu, kajian juga memperhatikan distribusi penggunaan lahan pada sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan permukiman guna menilai kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Evaluasi terhadap perencanaan lahan di desa Totoharjo, Kelawi, Bakauheni, Hata, dan Semanak menjadi penting untuk memahami dinamika pembangunan serta potensi struktur dan pola ruang yang dapat memengaruhi keseimbangan tata ruang kawasan.

1.4.2.2 Aspek Fisik Lingkungan

Ruang lingkup aspek fisik lingkungan mencakup analisis kondisi biofisik dan ekologi wilayah Kecamatan Bakauheni yang meliputi kelima desa kajian. Kajian dilakukan terhadap kesesuaian lahan berdasarkan topografi, kemiringan, jenis tanah, serta ketersediaan air dan vegetasi alami di masing-masing desa. Selain itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir, termasuk keberadaan ruang terbuka hijau serta tingkat tekanan aktivitas manusia akibat pertumbuhan sektor wisata, juga menjadi fokus utama. Hasil analisis ini diharapkan dapat

menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, khususnya dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir Bakauheni sebagai bagian dari KSPN Krakatau–Bakauheni.

1.4.2.3 Aspek Infrastruktur

Aspek infrastruktur dalam studi ini meliputi penilaian terhadap kondisi, ketersediaan, dan sebaran sarana prasarana dasar di seluruh desa di Kecamatan Bakauheni. Analisis mencakup jaringan jalan antar desa, sistem drainase, air bersih, sanitasi, listrik, serta telekomunikasi yang mendukung konektivitas kawasan. Selain itu, juga dikaji fasilitas publik seperti sekolah, pusat kesehatan, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, dan penerangan jalan umum. Infrastruktur transportasi darat dan laut di sekitar Pelabuhan Bakauheni turut menjadi perhatian, mengingat perannya sebagai simpul utama konektivitas antar pulau dan pendukung kegiatan pariwisata KSPN Krakatau–Bakauheni.

1.4.2.4 Aspek Kebencanaan

Aspek kebencanaan berfokus pada identifikasi tingkat kerentanan wilayah Kecamatan Bakauheni terhadap berbagai potensi bencana alam. Kajian dilakukan terhadap risiko erupsi Gunung Anak Krakatau, banjir, banjir rob, abrasi pantai, erosi, dan tsunami di Kecamatan Bakauheni. Selain itu, ruang lingkup ini juga mencakup penilaian terhadap kesiapsiagaan masyarakat, sistem peringatan dini, ketersediaan jalur evakuasi, dan titik kumpul bencana di masing-masing desa. Hasil analisis diharapkan mampu mendukung perencanaan mitigasi yang terpadu dengan kebijakan tata ruang dan pengembangan pariwisata yang aman bagi masyarakat dan wisatawan.

1.4.2.5 Aspek sosial kependudukan

Aspek sosial kependudukan mencakup kajian terhadap struktur dan dinamika sosial masyarakat di lima desa dalam Kecamatan Bakauheni. Analisis meliputi kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya dan pelestarian tradisi lokal. Kajian ini juga memperhatikan tingkat adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial akibat meningkatnya aktivitas wisata di wilayah Bakauheni dan sekitarnya. Perbedaan karakter sosial antar desa, seperti di Totoharjo dan Semanak yang memiliki komunitas

nelayan, dibandingkan Bakauheni yang lebih urban, menjadi penting dalam memahami arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan wisata.

1.4.2.6 Aspek Sosial Ekonomi

Ruang lingkup aspek sosial ekonomi berfokus pada analisis terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Bakauheni yang didorong oleh pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan. Kajian mencakup peran UMKM di setiap desa, kontribusi tenaga kerja lokal, serta potensi ekonomi yang muncul dari kegiatan wisata di kawasan Bakauheni Harbour City. Selain itu, juga dianalisis tingkat pengeluaran, lama tinggal wisatawan, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana integrasi ekonomi antar desa di Bakauheni dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

1.4.2.7 Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

Aspek kelembagaan dan pembiayaan difokuskan pada analisis terhadap tata kelola, koordinasi antar lembaga, serta efektivitas pembiayaan pembangunan di Kecamatan Bakauheni. Kajian ini mencakup identifikasi peran pemerintah daerah, lembaga kecamatan, serta kemitraan dengan pihak swasta dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Selain itu, juga dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian alokasi anggaran daerah dengan prioritas pembangunan kawasan serta efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan Bakauheni sebagai kawasan pariwisata nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1.4.3 Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra-Survei

   Tahap ini terdiri dari merumuskan hingga menentukan isu di wilayah studi, menentukan judul, menentukan rumusan masalah, tujuan dan sasaran, penyusunan matriks data, perangkat survei, persiapan perizinan, penetapan survei serta persiapan teknis untuk survei lapangan.

2. Tahap Survei

   Tahap ini merupakan tahapan pengumpulan data primer melalui observasi langsung kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kecamatan Bakauheni, pembagian kuesioner serta wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, serta pencarian data sekunder dari instansi-instansi terkait yang mendukung kebutuhan studi.

3. Tahap Pasca-Survei

   Tahap ini mencakup pengolahan data primer dan sekunder yang diperoleh dari tahap pra-survei dan survei, analisis data berdasarkan isu strategis wilayah Kecamatan Bakauheni, serta penyusunan, penyempurnaan, dan pencetakan laporan akhir hasil studi perencanaan.

1.5 Kerangka Berpikir

Kecamatan Bakauheni merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah strategis dan penduduk yang beragam. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan No. 16 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni Tahun 2022-2041 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, Kecamatan Bakauheni memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan beberapa fungsi utama:

- Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di kawasan pesisir.
- Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten yang fokus pada pengembangan pelabuhan, pariwisata, dan sektor perikanan.
- Sebagai bagian dari jaringan transportasi nasional, terutama dalam konektivitas lintas Sumatera-Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni serta pengembangan infrastruktur jalan dan rel kereta api. (Pasal 15 Perbup No. 16 Tahun 2022)

Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Kecamatan Bakauheni termasuk kawasan strategis yang berpotensi besar dalam pengembangan pariwisata pesisir, transportasi, dan ekonomi kelautan. Namun demikian, pembangunan berkelanjutan di wilayah ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur, kerentanan lingkungan dan kebencanaan, rendahnya kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, serta kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kesiapan dan tantangan di Kecamatan Bakauheni untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peran pemerintah dan stakeholder dalam pengelolaan kawasan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan laporan studio proses perencanaan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Berisi tentang penjelasan tinjauan teori terkait wilayah studi dan teori dari setiap aspek studio proses perencanaan

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bagian ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yakni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, berupa kondisi geografis, administrasi, dan karakteristik wilayah.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas dan menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan metode analisis yang relevan.

BAB V RENCANA KEGIATAN

Bagian ini menjelaskan tentang rencana kegiatan studio, rencana kegiatan survei, dan kegiatan lain selama pelaksanaan studio proses perencanaan.

BAB II
TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Literatur Terkait Isu

2.1.1 Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Pengembangan KSPN

Kerangka hukum menjadi dasar penting dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan pemerataan manfaat dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana tata ruang dan pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional juga memberikan dasar hukum bagi percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan prioritas, termasuk KSPN Krakatau–Bakauheni. Dengan demikian, pengembangan wilayah Bakauheni sebagai KSPN harus memperhatikan aspek regulatif dan tata kelola lintas sektor agar proses pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2020).

2.1.2 Integrasi Transportasi Multimoda

Integrasi transportasi multimoda merupakan kunci dalam mendukung pengembangan kawasan pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata. Sulistyorini (2024) menjelaskan bahwa kawasan Pelabuhan Bakauheni memiliki potensi besar sebagai simpul transportasi nasional, namun saat ini masih menghadapi ketimpangan distribusi infrastruktur antar wilayah. Minimnya konektivitas antar moda laut, darat, dan transportasi lokal menyebabkan kurang optimalnya pergerakan wisatawan dan distribusi barang. Oleh karena itu, perencanaan jaringan transportasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem konektivitas yang efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar pelabuhan.

2.1.3 Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Wilayah pesisir Bakauheni memiliki nilai ekologis yang tinggi sekaligus tingkat kerentanan yang besar akibat tekanan pembangunan. Degradasi ekosistem mangrove dan perubahan penggunaan lahan di pesisir Lampung telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan serta meningkatnya risiko abrasi dan penurunan daya dukung ekosistem (Lahay, 2023). Pengelolaan lingkungan pesisir berbasis masyarakat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan kegiatan ekonomi. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir, sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menekankan keterlibatan lokal.

2.1.4 Mitigasi Bencana dan Ketangguhan Wilayah

Kawasan pesisir Bakauheni terletak di zona rawan bencana, khususnya terhadap potensi tsunami, erupsi Gunung Anak Krakatau, serta banjir pesisir. Hasil penelitian oleh Widiyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa peristiwa tsunami 2018 di Selat Sunda menimbulkan dampak signifikan bagi wilayah Lampung Selatan, termasuk Bakauheni, akibat minimnya sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang belum memadai. Upaya mitigasi bencana perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah melalui penyediaan jalur evakuasi, pembangunan shelter vertikal, serta pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan mitigasi berbasis ruang ini penting untuk menciptakan kawasan pariwisata yang aman dan tangguh terhadap bencana.

2.1.5 Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Pelestarian budaya menjadi komponen penting dalam pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan, khususnya di wilayah yang memiliki kekayaan tradisi lokal seperti Lampung Selatan. Reza (2023) menekankan bahwa aktivitas budaya, seperti upacara adat, tarian tradisional, serta festival rakyat, dapat menjadi daya tarik wisata yang mendukung ekonomi kreatif masyarakat. Namun, tanpa strategi pengelolaan yang tepat, komersialisasi budaya dapat mengikis nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pengembangan kawasan Bakauheni perlu mengintegrasikan pelestarian budaya dalam rencana tata ruang melalui penetapan zona kegiatan budaya, pembangunan pusat budaya lokal, serta program pendidikan budaya bagi generasi muda.

Langkah ini akan memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah wisata berbasis budaya.

2.1.6 Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi pilar utama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Menurut Adib et al. (2024), keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai pariwisata seperti penyediaan akomodasi, kuliner, dan transportasi wisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Program *Bakauheni Harbour City* menjadi contoh inisiatif pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat sekitar pelabuhan dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Selain itu, penguatan kelembagaan lokal dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan agar mekanisme pengelolaan kawasan berjalan efektif. Pendekatan *Public–Private–Community Partnership (PPCP)* dapat menjadi model kolaborasi yang memastikan keberlanjutan ekonomi sekaligus pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat setempat.

2.2 Tinjauan Literatur Terkait Aspek

2.2.1 Aspek Spasial Keruangan

Pemanfaatan ruang di Kecamatan Bakauheni perlu dilihat dari sisi spasial dan keruangan, karena wilayah ini memiliki peran strategis sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam dokumen RTRW Kabupaten Lampung Selatan maupun arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Bakauheni diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan konektivitas antar wilayah.

Pengelolaan ruang di Bakauheni tidak hanya menekankan pada pemanfaatan lahan, tetapi juga bagaimana pusat kegiatan, jaringan prasarana, serta kawasan lindung dan budidaya saling terintegrasi. Dengan demikian, pembangunan yang berlangsung dapat selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. Secara garis besar, aspek spasial keruangan di Bakauheni mencakup dua hal penting:

1. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat kegiatan seperti kawasan pariwisata, pelabuhan, dan pusat pelayanan masyarakat yang terhubung dengan jaringan prasarana darat maupun laut. Keterhubungan ini sangat penting untuk memperkuat akses menuju destinasi wisata prioritas dan mendukung kegiatan ekonomi di sekitar wilayah Bakauheni.

2. Pola ruang merupakan pembagian kawasan berdasarkan fungsi dan peruntukan. terdapat kawasan lindung seperti pesisir, hutan mangrove, dan sempadan pantai yang harus dijaga keberlanjutannya. Di sisi lain terdapat kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pariwisata, pemukiman, perdagangan, jasa, dan aktivitas lain yang menunjang peran Bakauheni sebagai KSPN.

Secara umum, tujuan pengaturan aspek spasial keruangan di Kecamatan Bakauheni adalah untuk memastikan pemanfaatan ruang dapat berjalan seimbang, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat maupun lingkungan. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mengarahkan pertumbuhan wilayah agar pembangunan tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi lebih merata dan seimbang di seluruh kawasan.
2. Meningkatkan fungsi kawasan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan daya dukung lingkungannya, sehingga setiap ruang dapat berperan optimal tanpa merusak keseimbangan alam.
3. Mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan permukiman agar saling mendukung dan menciptakan keterpaduan dalam pengembangan wilayah.
4. Menjamin keberlanjutan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga pembangunan dapat berlangsung tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

2.2.1.1 Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana yang saling terhubung sehingga membentuk keterkaitan fungsional antarwilayah. Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), struktur ruang diwujudkan melalui sistem pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjadi kerangka dasar dalam mendukung pengembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, struktur ruang tidak hanya berkaitan dengan distribusi spasial, tetapi juga peran setiap elemen dalam memperkuat keterpaduan pembangunan wilayah.

Rustiadi, Pranoto, dan Sunarti (2011) menjelaskan bahwa struktur ruang mencerminkan hierarki pusat pelayanan yang terdiri atas pusat kegiatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga lokal. Hierarki ini penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan memperkuat keterhubungan antardaerah. Selanjutnya, Yunus (2005) menegaskan bahwa struktur ruang harus memperhatikan aspek aksesibilitas, integrasi jaringan transportasi, serta keterhubungan antar wilayah guna mendukung pertumbuhan wilayah yang lebih merata.

Dalam perspektif pengembangan pariwisata, struktur ruang juga menjadi faktor penting dalam mengarahkan aliran wisatawan dan distribusi kegiatan ekonomi. Nugroho (2012) menyatakan bahwa jaringan transportasi yang terintegrasi akan meningkatkan konektivitas destinasi wisata, memperluas jangkauan pasar, dan menunjang keberlanjutan kawasan. Oleh karena itu, pengaturan struktur ruang dalam RTRW, khususnya pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), harus menekankan integrasi transportasi multimoda, hubungan antar pusat kegiatan, serta infrastruktur pendukung untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.

Dengan demikian, struktur ruang dalam dokumen RTRW tidak hanya berfungsi sebagai kerangka fisik pembangunan wilayah, melainkan juga instrumen strategis yang mendukung keterpaduan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan, termasuk dalam konteks pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni.

2.2.1.2 Pola Ruang

Pola ruang pada dasarnya adalah cara suatu wilayah diatur agar berbagai fungsi lahan bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu. Dalam RTRW, pola ruang berperan sebagai panduan penting supaya pembangunan tetap tertata dan efisien. Jadi, pola ruang tidak hanya bicara soal peta dan zonasi, tetapi juga bagaimana ruang dimanfaatkan secara bijak sesuai kebutuhan masyarakat.

Yunus (2005) menyebut pola ruang sebagai cerminan aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disusun untuk menciptakan keteraturan wilayah. Sejalan dengan itu, Rustiadi, Pranoto, dan Sunarti (2011) menegaskan bahwa pola ruang membantu mencegah tumpang tindih penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Artinya, pola ruang bisa dilihat sebagai upaya mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan dengan keterjagaan kualitas ruang hidup.

Dalam konteks KSPN Bakauheni, pola ruang diarahkan untuk menata berbagai fungsi, mulai dari kawasan pariwisata, perikanan, permukiman, hingga pertanian agar saling mendukung. Nugroho (2012) menambahkan, penataan ruang yang baik tidak hanya membuat kawasan lebih teratur, tetapi juga mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong ekonomi lokal. Dengan kata lain, pola ruang menjadi kunci agar pembangunan di Bakauheni berjalan harmonis, seimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

2.2.1.3 Kawasan Strategis Kecamatan Bakauheni

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting pada lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kecamatan Bakauheni ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni berdasarkan kebijakan nasional, dengan mempertimbangkan potensi pariwisata, posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, serta peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kawasan strategis yang terdapat di Kecamatan Bakauheni meliputi:

1. Kawasan strategis nasional, yaitu KSPN Krakatau–Bakauheni yang berorientasi pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Kawasan strategis provinsi, berupa dukungan konektivitas jaringan jalan dan infrastruktur pariwisata yang menghubungkan Bakauheni dengan kawasan lain di Provinsi Lampung.
3. Kawasan strategis kabupaten, meliputi sektor perikanan, permukiman, dan kawasan pendukung lainnya yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan pariwisata.

4. Kawasan strategis daerah (RPJMD dan RTRW Kabupaten Lampung Selatan), di mana Bakauheni diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pariwisata, perikanan, transportasi, dan jasa. Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021–2026, Bakauheni menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan konektivitas, daya tarik wisata, dan penguatan ekonomi lokal. Sementara itu, dalam RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011–2031, Bakauheni ditetapkan sebagai kawasan strategis pesisir yang berfungsi sebagai pintu gerbang Sumatra–Jawa, dengan dukungan pengembangan struktur ruang, jaringan transportasi, dan sarana pendukung pariwisata yang berkelanjutan.

2.2.2 Aspek Fisik Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan bidang ilmu yang menelaah hubungan antara unsur fisik, biotik, dan aktivitas manusia di dalam suatu ekosistem tertentu. Kajian ini tidak hanya mencakup karakteristik biofisik lingkungan seperti tanah, air, topografi, dan vegetasi, tetapi juga menganalisis kapasitas lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem. Dengan demikian, pembahasan aspek lingkungan tidak hanya berfokus pada parameter fisik semata, melainkan juga menyoroti perubahan dan dinamika ekologis akibat tekanan aktivitas pariwisata, pemanfaatan lahan, serta interaksi sosial ekonomi masyarakat (Arief, 2022; UNEP, 2019).

Bagian ini menjelaskan cakupan dan sasaran lingkungan yang meliputi variabel dan indikator penting untuk analisis daya dukung, satuan kemampuan lahan, serta kualitas fisik tanah dan air di Kecamatan Bakauheni. Aspek lingkungan ini menjadi dasar dalam mengevaluasi potensi dan keterbatasan kawasan, guna mewujudkan pengelolaan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

2.2.2.1. Daya Dukung Ekosistem Kecamatan Bakauheni

Daya dukung lingkungan di Kecamatan Bakauheni dinilai berdasarkan faktor-faktor utama seperti ketersediaan air, kualitas tanah, dan kesesuaian lahan menurut topografi, kemiringan, dan jenis tanah. Parameter-parameter ini sangat berpengaruh dalam menilai kapasitas wilayah untuk mendukung kehidupan dan aktivitas tanpa menurunkan kualitas

lingkungannya, sesuai dengan ketentuan regulasi dan pendekatan biofisik yang menekankan interaksi antar faktor fisik serta tekanan dari pembangunan dan penggunaan lahan.

2.2.2.2. Daya Tampung Lingkungan terhadap Aktivitas Manusia

Daya tampung lingkungan dievaluasi berdasarkan kualitas lingkungan fisik, ketersediaan ruang terbuka hijau, daya dukung ekosistem, serta tekanan aktivitas manusia. Tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan pariwisata harus dianalisis melalui parameter seperti kualitas lingkungan fisik, ketersediaan dan kapasitas ruang terbuka hijau, serta tingkat tekanan dari aktivitas manusia, untuk menghindari terjadinya degradasi yang melebihi kapasitas lingkungan aslinya.

2.2.2.3. Kualitas Tanah

Analisis kualitas tanah di Kecamatan Bakauheni menggunakan parameter kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, sistem drainase, tingkat erosi, serta kondisi batuan permukaan, yang semuanya berperan dalam mendukung keberlanjutan lahan, pertanian, konservasi air, dan mitigasi bencana. Pemetaan berdasarkan penggunaan lahan, data morfologi, dan RTRW sangat relevan untuk evaluasi mendalam kualitas tanah pada aspek-aspek tersebut.

2.2.2.4. Kualitas Air

Penilaian kualitas air melibatkan parameter kekeruhan, salinitas, kandungan logam berat, dan keberadaan bakteri, baik untuk air laut maupun air tanah. Pemantauan kualitas air sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, pariwisata, serta menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir yang rentan terhadap intrusi air laut dan pencemaran limbah domestik.

2.2.2.5. Kondisi Geomorfologi dan Topografi

Kondisi geomorfologi dan topografi kawasan Bakauheni dievaluasi berdasarkan kemiringan lahan, bentuk lahan, ketinggian, dan jenis tanah. Faktor-faktor ini menentukan tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana serta kapasitas dan kesesuaian wilayah dalam pengembangan infrastruktur dan pariwisata, sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menuntut perencanaan berbasis data spasial dan parameter fisik.

2.2.3 Aspek Infrastruktur

2.2.3.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Grigg (1988) mendefinisikan infrastruktur sebagai suatu sistem fisik yang mencakup transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Definisi ini menekankan bahwa infrastruktur merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas sarana dan prasarana yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, Kodoatie (2005) menjelaskan bahwa infrastruktur adalah fasilitas dasar fisik yang dibutuhkan untuk menunjang jaringan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Senada dengan hal tersebut, Moteff dan Parfomak (2004) menyatakan bahwa infrastruktur tidak hanya berupa fasilitas fisik, tetapi juga mencakup sistem yang mendukung distribusi barang, jasa, energi, dan informasi.

Menurut World Bank (1994), infrastruktur mencakup utilitas publik (seperti listrik, air, dan telekomunikasi), pekerjaan umum (jalan, bendungan, drainase), serta sektor transportasi (kereta, pelabuhan, bandara). Dari perspektif ini, infrastruktur dipandang sebagai faktor fundamental dalam meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa infrastruktur bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi merupakan sistem yang memiliki keterkaitan erat dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, memfasilitasi interaksi sosial, memperlancar kegiatan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan pembangunan suatu wilayah. Kehadiran infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus penggerak utama roda perekonomian.

2.2.3.2 Klasifikasi Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, maka Kecamatan Bakauheni termasuk dalam wilayah yang mengalami perkembangan infrastruktur sebagai pendukung pelayanan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur di wilayah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

- Infrastruktur transportasi meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan perkeretaapian.
- Infrastruktur air mencakup sistem irigasi, penyediaan air minum, drainase, serta pengolahan air limbah.
- Infrastruktur energi terdiri atas jaringan kelistrikan dan jaringan gas.
- Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan internet dan sarana telekomunikasi lainnya.
- Infrastruktur sosial mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta perumahan.

2.2.3.3 Jenis Infrastruktur

1. **Sarana**

Sarana adalah fasilitas yang secara langsung digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaan sarana memberikan kemudahan dalam menunjang kebutuhan hidup, misalnya sekolah untuk pendidikan, rumah sakit untuk kesehatan, pasar untuk perdagangan, serta tempat ibadah untuk kegiatan keagamaan.

- Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah fasilitas yang langsung digunakan masyarakat untuk kegiatan jual-beli dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Contohnya pusat perbelanjaan, pasar tradisional, toko kelontong, dan kios.
- Sarana pelayanan umum mencakup fasilitas yang mendukung layanan publik non-pemerintahan seperti fasilitas kesehatan non-rumah sakit (posyandu, puskesmas pembantu), kantor pelayanan publik, tempat layanan sosial, serta fasilitas administrasi sektor publik yang melayani masyarakat.

- Sarana pemerintahan meliputi gedung perkantoran pemerintah (kantor kecamatan, kantor desa), balai pertemuan resmi, serta fasilitas administrasi pemerintahan lainnya. Fungsi utamanya sebagai pusat administrasi, koordinasi pelayanan publik, dan interaksi pemerintah–masyarakat.
- Sarana pendidikan adalah fasilitas penunjang proses belajar mengajar seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan sarana penunjang pendidikan nonformal. Perhatian utama adalah ketersediaan tempat belajar yang layak, jumlah ruang kelas, kelengkapan sarana belajar, serta distribusi yang memadai untuk menjangkau populasi pelajar.n
- Sarana kesehatan mencakup fasilitas yang memberikan pelayanan medis seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, dan unit gawat darurat.
- Sarana peribadatan adalah bangunan atau fasilitas yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan dan ibadah sesuai keyakinan (mis. masjid, gereja, pura, vihara). Selain fungsi ibadah, fasilitas ini juga menjadi pusat kegiatan sosial-keagamaan.
- Sarana rekreasi dan olahraga meliputi taman hiburan, gelanggang olahraga, lapangan serbaguna, pusat kebugaran, dan fasilitas pendukung pariwisata lokal. Fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan rekreasi, kebugaran, dan interaksi sosial.
- Sarana pemakaman adalah tempat-tempat yang disediakan untuk penguburan sesuai adat dan agama (TPU, pemakaman keluarga, makam pahlawan). Selain fungsi penghormatan, tata lokasi pemakaman mempengaruhi penggunaan lahan dan kebersihan lingkungan; pengukuran meliputi sebaran, luas lahan, dan kondisi pengelolaan.
- RTH adalah area terbuka yang didominasi vegetasi baik alami maupun buatan, berfungsi sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, serta ruang interaksi sosial. Evaluasi dilaksanakan terhadap luas, kualitas vegetasi, keterjangkauan warga, serta kontribusinya terhadap ekosistem dan rekreasi
- Sarana parkir adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung kendaraan bermotor (off-street parking, lahan parkir, ruang parkir publik).

2. Prasarana

Prasarana merupakan fasilitas dasar yang menjadi penunjang terselenggaranya berbagai aktivitas, baik sosial maupun ekonomi. Prasarana tidak dimanfaatkan secara langsung, tetapi keberadaannya memungkinkan sarana dapat berfungsi dengan baik. Contohnya jalan, jembatan, saluran drainase, jaringan air minum, hingga pelabuhan.

- Prasarana jalan berfungsi sebagai jaringan transportasi utama yang menghubungkan antarwilayah dan pusat kegiatan. Jaringan jalan terdiri atas jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan lingkungan yang memiliki peran penting dalam memperlancar pergerakan manusia dan barang, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkuat kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi jaringan jalan yang baik juga berkontribusi terhadap pertumbuhan kawasan serta pengembangan sektor-sektor produktif.
- Prasarana drainase merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan kelebihan air permukaan agar tidak menimbulkan genangan dan banjir. Sistem drainase dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas aliran, kemiringan lahan, serta keterpaduannya dengan tata ruang wilayah. Drainase yang berfungsi dengan baik berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman, melindungi infrastruktur dari kerusakan, serta mewujudkan tata ruang yang sehat dan berkelanjutan.
- Prasarana air minum berperan sebagai sistem penyediaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan masyarakat. Infrastruktur air minum mencakup sistem PDAM, sumur bor, reservoir, dan hidran umum. Penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk.
- Prasarana sanitasi berfungsi menjaga kebersihan lingkungan dengan mengelola limbah domestik secara aman dan higienis. Fasilitas sanitasi seperti jamban sehat, septic tank, dan toilet umum berperan dalam mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan sistem sanitasi yang baik mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

- Prasarana air limbah merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Infrastruktur ini meliputi saluran air limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pengelolaan air limbah yang tepat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran air dan tanah, serta mendukung prinsip keberlanjutan dalam pembangunan wilayah

3. Utilitas

Utilitas adalah layanan umum berupa jaringan teknis yang bersifat vital bagi masyarakat. Utilitas berfungsi menjaga kelancaran kehidupan sehari-hari, misalnya penyediaan air bersih, listrik, jaringan telepon, gas, sistem pembuangan air limbah, hingga penerangan jalan umum.

- Jaringan Transportasi adalah sistem yang menunjang pergerakan manusia dan barang. Contohnya jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Fungsinya memperlancar mobilitas, memperkuat integrasi wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Jaringan air bersih adalah Sistem penyediaan air layak konsumsi yang dialirkanyang dialirkan melalui perpipaan atau non-pipa. Contohnya jaringan PDAM, reservoir, serta sumur pompa. Jaringan ini penting untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan layanan publik.
- Jaringan telepon adalah Infrastruktur komunikasi yang menghubungkan masyarakat melalui sinyal suara maupun data. Jaringan ini berfungsi mempercepat arus informasi, mendukung pemerintahan, pendidikan, serta bisnis.
- Jaringan gas adalah Sistem distribusi energi berupa gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun transportasi. Berfungsi untuk menyediakan energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Jaringan listrik adalah Sistem distribusi tenaga listrik dari pembangkit hingga ke konsumen. Contohnya jaringan PLN, gardu induk, serta saluran tegangan tinggi dan rendah. Fungsinya menyediakan energi utama bagi masyarakat modern serta mendukung produktivitas ekonomi.
- Pemadam kebakaran adalah Sarana pelayanan publik untuk mengatasi kebakaran dan penyelamatan darurat. Fasilitasnya meliputi kantor pemadam, mobil pemadam, dan

hidran. Fungsinya melindungi masyarakat dari risiko kebakaran, memberikan pertolongan darurat, serta menjaga keamanan lingkungan.

- Penerangan jalan umum adalah sistem pencahayaan di jalan dan ruang publik pada malam hari. Contohnya lampu jalan dan tiang PJU. Fungsinya meningkatkan keselamatan lalu lintas, mencegah tindak kriminal, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

2.2.3.4 Dampak pemekaran wilayah positif

Pemekaran wilayah memberikan dampak positif terutama dalam pembangunan infrastruktur. Daerah baru biasanya mendapat perhatian khusus berupa pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta jaringan listrik dan air bersih. Kehadiran infrastruktur tersebut mempermudah aktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan. Dari sisi kebijakan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan penataan daerah, berupaya menjamin agar pemekaran dilaksanakan dengan tujuan memperkuat pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, dan menciptakan pemerataan pembangunan.

2.2.3.5 Dampak pemekaran wilayah negatif

Pemekaran wilayah sering menimbulkan masalah dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah fasilitas fisik di daerah induk karena sebagian dialihkan ke wilayah hasil pemekaran. Akibatnya, pelayanan infrastruktur di daerah induk menjadi terbatas. Sementara itu, daerah baru biasanya belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti jaringan jalan, drainase, penyediaan air bersih, listrik, sarana pendidikan, kesehatan, serta peribadatan. Ketidakmerataan pembangunan ini mengakibatkan kesenjangan antarwilayah, di mana sebagian masyarakat harus beradaptasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

2.2.4 Aspek Kebencanaan

2.2.4.1 Risiko Bencana

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana ialah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu, baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) menyatakan bahwa secara umum, *risk* ialah nilai kehilangan (korban jiwa, korban luka, kerusakan bangunan, dan lainnya) yang diakibatkan oleh suatu *hazard*. *Disaster risk* merupakan irisan dari *hazard, exposure* dan *vulnerability*.

1. Hazard (bahaya) merupakan unsur berbasis hidrometeorologis, geofisika, atau akibat ulah manusia yang menimbulkan tingkat ancaman terhadap kehidupan, properti, atau lingkungan.
2. Exposure (keterpaparan) merujuk pada siapa dan pengaruh di suatu tempat dimana peristiwa berbahaya dapat terjadi.
3. Vulnerability (kerentanan) merujuk pada kerentanan unsur-unsur yang terpapar, seperti korban jiwa, mata pencaharian, dan harta benda.

2.2.4.1.1 Jenis Bencana

1. Erupsi Gunung

Erupsi gunung api merupakan proses pelepasan material dari dalam bumi ke permukaan yang dapat berupa lava, abu vulkanik, gas, dan bom vulkanik (PVMBG, 2023). Dampak erupsi tidak hanya terbatas pada radius letusan, tetapi juga pada wilayah yang terkena hujan abu dan aliran lahar. Erupsi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan kesehatan, dan penurunan produktivitas ekonomi terutama di sektor pertanian dan perikanan (BNPB, 2024).
Kecamatan Bakauheni berada di wilayah selatan Gunung Anak Krakatau, yang terletak di Selat Sunda. Meskipun tidak berada di zona bahaya langsung, Bakauheni termasuk wilayah terdampak sekunder dari aktivitas vulkanik berupa hujan abu dan potensi tsunami vulkanik, seperti yang terjadi pada erupsi Krakatau tahun 2018. Hal ini menjadikan penguatan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi sangat penting di Bakauheni.

2. Banjir

Banjir merupakan genangan air di suatu area akibat meluapnya air sungai, drainase yang buruk, atau curah hujan ekstrem (Suripin, 2019). Faktor utama penyebabnya meliputi perubahan tata guna lahan, sedimentasi sungai, dan berkurangnya daerah resapan air. Banjir berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan sosial ekonomi masyarakat.

Beberapa desa di Bakauheni memiliki morfologi rendah dan berdekatan dengan aliran sungai kecil yang bermuara ke laut. Pada musim hujan, daerah ini rawan banjir lokal, terutama di wilayah dengan sistem drainase tidak optimal. Banjir juga sering diperparah oleh penebangan vegetasi di lereng-lereng perbukitan sekitar pelabuhan dan area permukiman padat.

3. Banji Rob

Banjir rob adalah genangan air laut ke daratan akibat pasang tinggi, perubahan iklim, atau penurunan muka tanah (Marfai & King, 2008). Fenomena ini sering terjadi di kawasan pesisir dengan elevasi rendah. Dampaknya termasuk kerusakan infrastruktur pesisir, intrusi air laut, dan gangguan aktivitas pelabuhan

Sebagai kawasan pesisir dengan pelabuhan utama, Bakauheni sangat rentan terhadap banjir rob, terutama di sekitar area Pelabuhan Bakauheni dan desa pesisir seperti Hatta dan Totoharjo. Aktivitas pasang surut yang tinggi dan perubahan garis pantai akibat pembangunan infrastruktur pelabuhan meningkatkan risiko rob, terutama saat kombinasi pasang maksimum dan curah hujan tinggi terjadi.

4. Erosi

Erosi merupakan proses pengikisan tanah oleh air atau angin, yang sering diperburuk oleh pembukaan lahan tanpa konservasi tanah (Arsyad, 2010). Erosi menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur, sedimentasi sungai, dan degradasi lingkungan. Wilayah Bakauheni memiliki topografi berbukit di bagian utara dan barat. Aktivitas pembukaan lahan untuk permukiman dan pertanian di daerah miring menyebabkan erosi tanah di lereng, yang berdampak pada pendangkalan sungai kecil dan memperburuk risiko banjir di dataran rendah. Erosi juga berkontribusi terhadap meningkatnya sedimentasi pantai, yang berhubungan dengan abrasi di daerah pesisir.

5. Abrasi

Abrasi adalah pengikisan pantai oleh gelombang laut, arus, atau aktivitas manusia (Triatmodjo, 2012). Proses ini dapat mempersempit garis pantai, merusak ekosistem pesisir seperti mangrove, dan mengancam permukiman di tepi laut.

Bakauheni mengalami abrasi di sepanjang pesisir barat dan selatan, terutama akibat aktivitas pembangunan dermaga dan perubahan arus laut di sekitar pelabuhan. Hilangnya vegetasi mangrove mempercepat proses abrasi. Program rehabilitasi pesisir dan penanaman mangrove sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas garis pantai dan melindungi infrastruktur pelabuhan.

6. Tsunami

Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, longsoran, atau letusan gunung api di bawah laut (BMKG, 2024). Wilayah dengan kedalaman laut yang menurun secara tajam dan dekat dengan sumber seismik sangat berpotensi terdampak.

Bakauheni memiliki potensi tsunami tinggi karena berhadapan langsung dengan Selat Sunda, lokasi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Tsunami tahun 2018 yang diakibatkan erupsi Krakatau menyebabkan gelombang

mencapai pesisir Bakauheni. Saat ini, wilayah ini menjadi prioritas dalam pemasangan sistem peringatan dini tsunami (EWS) dan penyusunan rencana evakuasi masyarakat pesisir

2.2.4.2 Sistem Peringatan Dini

Menurut UNISDR (2015), Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian mekanisme untuk mendeteksi, memantau, dan menyampaikan informasi tentang potensi bahaya kepada masyarakat agar dapat mengambil tindakan pencegahan dan penyelamatan diri sebelum bencana terjadi.
Jenis Sistem Peringatan Dini

- Erupsi Gunung api : Sistem peringatan dini berupa Pos pengamatan gunung api, sensor seismik, sirine vulkanik, sistem komunikasi PVMBG (Pusat Vaulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)
- Banjir : sistem peringatan dini berupa Stasiun curah hujan otomatis (AWS), pemantauan debit sungai, aplikasi prakiraan cuaca
- Banjir rob : Bentuk sistem peringatan dini berupa Tide gauge (alat ukur pasang surut), radar gelombang laut, sistem prediksi pasang tinggi
- Erosi dan Abrasi : Sistem peringatan dini berupa Monitoring garis pantai, penginderaan jauh (citra satelit), dan sistem deteksi perubahan daratan
- Tsunami : sistem peringatan dini berupa/ Buoy tsunami, tide gauge, seismograf, sirine peringatan, sistem SMS/TV/radio

2.2.4.3 Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana merupakan salah satu komponen penting dalam sistem mitigasi bencana yang berfungsi sebagai panduan pergerakan masyarakat dari wilayah berisiko menuju area aman secara cepat dan terarah. Berdasarkan BNPB (2020) dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018, jalur evakuasi harus direncanakan secara terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dilengkapi dengan rambu, serta memiliki keterhubungan langsung dengan titik kumpul aman. Menurut BNPB (2019), wilayah pesisir wajib memiliki jalur evakuasi yang dapat diakses dalam waktu maksimal 20 menit menuju titik aman atau shelter vertikal sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana.

Dalam konteks Kecamatan Bakauheni, jalur evakuasi disusun dengan mempertimbangkan karakteristik potensi bencana yang meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau, banjir, banjir rob, abrasi pantai, dan tsunami. Jalur evakuasi untuk bencana erupsi gunung api diarahkan ke wilayah timur dan utara menjauhi pantai dengan titik kumpul di lapangan desa atau fasilitas umum. Rute ini mengikuti jaringan jalan menuju Kecamatan Penengahan, sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Lampung Selatan Pasal 23 Ayat 6.n. Untuk bencana banjir,

jalur evakuasi diarahkan ke area yang lebih tinggi melalui jalan desa dan akses utama menuju fasilitas publik yang aman.

1. Pada kondisi banjir rob, jalur evakuasi dirancang menuju bangunan bertingkat atau titik evakuasi vertikal di kawasan pesisir yang sering terdampak genangan. Sedangkan untuk abrasi pantai, evakuasi dilakukan menjauh minimal 100 meter dari garis pantai menuju area stabil yang aman dari ancaman longsoran. Sementara itu, jalur evakuasi bencana tsunami diarahkan menuju daerah dataran tinggi atau bangunan evakuasi vertikal dengan waktu tempuh maksimal 15 menit, terhubung dengan Jalan Lintas Sumatera sebagaimana diatur dalam RTRW Pasal 23 Ayat 6.b.
2. Secara keseluruhan, jalur evakuasi di Kecamatan Bakauheni merupakan hasil integrasi antara kebijakan tata ruang, potensi ancaman wilayah, serta pedoman teknis kesiapsiagaan yang ditetapkan oleh BNPB dan pemerintah daerah. Evaluasi berkala terhadap efektivitas jalur evakuasi dan simulasi rutin menjadi faktor penting untuk meningkatkan keselamatan masyarakat pada saat kondisi darurat bencana

2.2.5 Aspek Sosial Kependudukan

2.2.5.1 Pengertian Sosial Kependudukan

Menurut UU No. 23 Tahun 2006, penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan diakui sebagai Warga negara Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Seseorang dianggap sebagai penduduk jika telah tinggal di Indonesia selama minimal enam bulan dengan tujuan untuk menetap. Dalam konteks ini, studi tentang kependudukan mencakup analisis dinamika populasi manusia, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta perubahan yang terjadi akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Masalah kependudukan dapat terjadi di negara berkembang maupun negara maju, seringkali terkait dengan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan populasi, kepadatan penduduk, dan tingkat pendidikan.

Istilah "sosial" berasal dari bahasa Latin "socius," yang berarti segala sesuatu yang muncul dan berkembang dalam kehidupan bersama. Sementara itu, "kependudukan" atau "demografi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Demos" yang berarti penduduk dan "Grafien" yang berarti tulisan. Dengan demikian, demografi dapat dipahami sebagai studi mengenai

jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk serta perubahan ketiga faktor tersebut seiring waktu. Secara ringkas, Sosial Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan, termasuk ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

2.2.5.2 Kualitas dan kuantitas Penduduk

Kualitas penduduk merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembangunan. Indikator kualitas penduduk biasanya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (BPS, 2023). Dalam konteks Bakauheni, peningkatan kualitas penduduk menjadi penting agar masyarakat lokal mampu beradaptasi terhadap peluang ekonomi yang muncul dari pengembangan kawasan wisata dan pelabuhan. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja menjadi strategi utama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kuantitas masyarakat merupakan gambaran mengenai jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebaran penduduk di suatu wilayah. Kuantitas menunjukkan seberapa besar populasi yang menempati suatu daerah serta bagaimana tingkat pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Dengan memahami kuantitas masyarakat, pemerintah dapat merencanakan kebutuhan fasilitas umum, lapangan kerja, serta pelayanan sosial secara lebih tepat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, n.d.).

- **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** adalah kegiatan ekonomi produktif berskala kecil hingga menengah yang dijalankan oleh individu atau kelompok. Usaha mikro memiliki aset dan omzet paling kecil, usaha kecil beroperasi dalam lingkup lokal, sedangkan usaha menengah memiliki manajemen lebih baik dan potensi berkembang lebih luas. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ekonomi daerah.
- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah ukuran kualitas hidup masyarakat yang dilihat dari tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Nilai IPM yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik dan menjadi acuan penting dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

2.2.5.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran dan kepadatan penduduk mempengaruhi perencanaan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, distribusi penduduk yang seimbang diperlukan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar wilayah. Di Bakauheni, persebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di sekitar jalur utama pelabuhan dan kawasan wisata, sehingga memerlukan pengaturan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kapasitas layanan publik. Ketimpangan distribusi penduduk juga dapat berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang tidak merata (Sujarto, 2010).

2.2.5.4 Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan manusia. Akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan dasar menjadi parameter penting dalam menilai kesejahteraan sosial masyarakat (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Di kawasan Bakauheni, peningkatan fasilitas kesehatan dan penyediaan layanan medis yang memadai mendukung kualitas hidup masyarakat, terutama dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan juga menjadi aspek penting dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2022).

2.2.5.5 Mata Pencaharian dan Ekonomi Lokal

Sumber mata pencaharian masyarakat Bakauheni didominasi oleh sektor perikanan, perdagangan, dan jasa wisata. Kehadiran BHC membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal harus dilakukan melalui peningkatan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan kemitraan dengan sektor swasta. Model pembangunan *community-based tourism* dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal (Todaro & Smith, 2015).

2.2.5.6 Pelestarian dan Inovasi Budaya Lokal

Budaya lokal merupakan identitas dan aset sosial yang harus dijaga dalam setiap proses pembangunan. Menurut Sujarto (2010), pelestarian budaya berfungsi sebagai fondasi keberlanjutan sosial dalam pembangunan wilayah. Di Bakauheni, tradisi adat dan kesenian lokal seperti ritual laut, tari tradisional, serta kuliner khas menjadi daya tarik pariwisata yang bernilai ekonomi sekaligus sarana memperkuat kohesi sosial. Inovasi budaya melalui festival dan kegiatan masyarakat dapat menjadi wadah untuk mengadaptasi budaya tradisional ke dalam konteks modern tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya.

2.2.5.7 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan berbasis lokal. Menurut Arnstein (1969) dalam konsep *A Ladder of Citizen Participation*, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menentukan sejauh mana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan. Di Bakauheni, peningkatan partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam program pariwisata, pengelolaan lingkungan, dan kegiatan sosial. Prinsip kolaboratif ini sejalan dengan pendekatan *Public–Private–Community Partnership (PPCP)* yang menekankan sinergi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

2.2.5.8 Dinamika Sosial dan Peran Pemerintah Lokal

Pembangunan kawasan BHC membawa dampak sosial berupa perubahan pola kehidupan, mobilitas, dan interaksi masyarakat. Dinamika ini menuntut peran aktif pemerintah desa dan lembaga lokal dalam menjaga stabilitas sosial serta memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta penguatan lembaga adat menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah desa juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan kawasan (Bappenas, 2022).

2.2.6 Aspek Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kajian ini tidak hanya mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, tetapi juga mengkaji dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan, pola interaksi sosial, dan struktur sosial di wilayah tertentu. Dengan demikian, sosial ekonomi tidak hanya terfokus pada angka statistik semata, tetapi juga menjelaskan perubahan dan dinamika sosial yang timbul akibat aktivitas ekonomi (Soekanto, 2003; Koentjaraningrat, 1981). Hadyana (2022) mengemukakan bahwa sosial ekonomi mencerminkan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, posisi dan pendapatan, yang saling berinteraksi secara kompleks dalam membentuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bagian ini menjelaskan cakupan dan sasaran yang meliputi variabel dan indikator penting yang dianalisis untuk menggambarkan kontribusi UMKM, sektor pariwisata, dan perdagangan terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bakauheni. Aspek sosial ekonomi dapat dilihat dari tiga cakupan:

1. Jumlah UMKM di Sektor Pariwisata dan Perdagangan

UMKM yang aktif di sektor pariwisata dan perdagangan di Kecamatan Bakauheni berperan penting dalam mendorong perekonomian lokal dengan menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan wisatawan, seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Jenis usaha yang dominan dan kendala yang menghadang seperti keterbatasan modal, pasar yang sempit, sumber daya manusia yang kurang, serta infrastruktur yang belum memadai masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penguatan UMKM melalui peningkatan akses modal, pengembangan kapasitas SDM, dan perbaikan infrastruktur sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan daerah ini (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023).

2. Kontribusi Sektor Pariwisata dan Perdagangan terhadap PDRB Lampung Selatan

Sektor pariwisata dan perdagangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan. Sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar

14,95% dari PDRB , sedangkan sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar 2,75% hingga 3%. Sektor kedua ini menjadi penopang utama aktivitas ekonomi lokal, membuka peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat meskipun masih menghadapi tantangan seperti pengelolaan dan infrastruktur. Data diperoleh dari analisis kuantitatif dan kualitatif oleh BPS Kabupaten Lampung Selatan (2024)

3. Peluang Kerja Baru

Perkembangan Kota Pelabuhan Bakauheni, khususnya melalui proyek Bakauheni Harbour City, telah membuka peluang kerja baru di sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat lokal. Proyek ini telah menyerap ratusan tenaga kerja dan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam ekonomi kreatif. Hal ini berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar pelabuhan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2024).

2.2.7 Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

2.2.7.1 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan struktur yang mengatur hubungan dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah. Menurut Sapja Anantanyu (2011), kelembagaan mencakup keseluruhan pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengembangan Kecamatan Bakauheni, kelembagaan dapat diamati melalui keberadaan dan efektivitas perangkat kecamatan, susunan organisasi, serta pembagian fungsi dan kewenangan lembaga dalam menangani sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Jenis lembaga yang terlibat, seperti perangkat kecamatan, instansi teknis, dan lembaga swasta, berperan dalam menentukan arah kebijakan serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Menurut Sri Suharti (2018), efektivitas kelembagaan tercermin dari kemampuan suatu lembaga menjalankan fungsi koordinatif, pengawasan, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, koordinasi antar kecamatan dan lembaga lain menjadi

kunci agar penanganan infrastruktur, transportasi, serta pelayanan masyarakat berjalan optimal dan tidak tumpang tindih kewenangan.

2.2.7.2 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan di kecamatan. Agus Susilo (2018) menjelaskan bahwa pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dana, tetapi juga dengan mekanisme dan aturan kelembagaan yang mengaturnya. Dalam konteks Bakauheni, pembiayaan dapat ditinjau melalui kesesuaian alokasi APBD dengan rencana pengembangan wilayah, efektivitas penggunaan dana sesuai prioritas pembangunan, serta transparansi dalam pelaporan anggaran.

Jenis sumber dana yang digunakan dapat berasal dari pemerintah daerah, swasta, maupun investasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pembiayaan adalah koordinasi antara pemberi dan penerima dana, yang menuntut adanya pertanggungjawaban dan efisiensi penggunaan dana. Oleh karena itu, pengelolaan sumber investasi yang tepat dan efisien berperan penting untuk mengembangkan pembangunan wilayah.

2.2.7.3 Koordinasi

Koordinasi adalah unsur utama dalam mengintegrasikan peran pemerintah dan lembaga agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif. Handoko (2024) berpendapat bahwa koordinasi merupakan proses menyeimbangkan berbagai kegiatan agar memenuhi langkah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Bakauheni, koordinasi mencakup kecepatan respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat, tindak lanjut pengaduan, serta kemampuan instansi untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik secara cepat dan tepat.

Koordinasi mendukung kebijakan antara pemerintah kecamatan dan instansi, seperti pemerintah kabupaten atau provinsi, terutama dalam pelaksanaan program pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas, dan investasi sektor swasta.

2.2.7.4 Kebijakan

Kebijakan kelembagaan dan pembiayaan merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Destrinelli (2022), kebijakan bersifat mengikat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, sedangkan Biga (2019) menegaskan bahwa kebijakan berfungsi untuk mengatur distribusi sumber daya secara adil dan efisien. Dalam konteks Kecamatan Bakauheni, kebijakan mencakup penyusunan regulasi tentang pelebaran jalan, peningkatan efektivitas implementasi aturan, serta pengawasan terhadap dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan volume kendaraan.

Selain itu, kebijakan keuangan daerah berperan dalam memastikan kesesuaian antara APBD dengan rencana pengembangan wilayah. Kebijakan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana, mendorong partisipasi swasta, serta memperkuat sinergi kelembagaan antarinstansi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

2.2.7.5 Pengelolaan APBD dalam Pengembangan Wilayah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama dalam mendukung program pembangunan di Kecamatan Bakauheni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penggunaan APBD dikatakan efektif apabila sesuai dengan rencana pembiayaan dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ditemukan bahwa pengalokasian dana masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan distribusi dana yang belum merata di tingkat kecamatan.

Penggunaan APBD yang tepat diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Bakauheni Harbour City. Diperlukan evaluasi menyeluruh agar anggaran digunakan sesuai sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

2.2.7.6 Alokasi Dana dan Investasi Pembangunan

Alokasi dana menjadi penanda penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020, dana publik dan investasi pemerintah harus diarahkan untuk mendukung proyek strategis nasional.

Di Kecamatan Bakauheni, dana pembangunan difokuskan pada infrastruktur pendukung pariwisata, jalan menuju pelabuhan, serta fasilitas umum. Selain itu, investasi dari sektor swasta mulai tumbuh, khususnya di kawasan Bakauheni Harbour City. Namun, masih terdapat perbedaan antara kebutuhan pembangunan dan dana yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta agar pembiayaan pembangunan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

2.2.7.7 Peran Lembaga Swasta dalam Pengembangan Wilayah

Lembaga swasta berperan penting dalam memperkuat ekonomi wilayah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, sektor swasta dapat mendukung penyediaan infrastruktur, fasilitas wisata, dan layanan publik.

Di Kecamatan Bakauheni, sejumlah perusahaan telah berinvestasi dalam sektor pariwisata dan transportasi, seperti pembangunan kawasan wisata, hotel, dan fasilitas umum di sekitar pelabuhan. Kehadiran lembaga swasta membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Bakauheni sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatra yang mendukung pengembangan pariwisata secara terpadu.

2.2.7.8 Lembaga Daerah dan Efektivitas Kelembagaan

Lembaga daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2017, setiap lembaga harus berperan aktif dalam mendukung proyek nasional.

Di Bakauheni, lembaga seperti Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Namun, masih ditemukan kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya tenaga kerja yang kompeten. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas lembaga serta penguatan aturan kerja di lingkungan instansi pemerintah.

2.2.7.9 Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah menjadi dasar dalam mengatur pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi di Kecamatan Bakauheni. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan infrastruktur yang memadai serta cepat merespons masukan dari masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengupayakan peningkatan jalan akses menuju Bakauheni Harbour City serta memperbaiki layanan transportasi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pengawasan, keterbukaan anggaran, dan partisipasi warga. Evaluasi berkala terhadap kebijakan transportasi dan pembangunan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Konstelasi Wilayah Studio

Konstelasi wilayah merujuk pada hubungan dan interaksi antar berbagai wilayah, serta peran dan fungsi masing-masing dalam konteks yang lebih luas terhadap kawasan diatasnya yang mengaitkan kawasan tersebut.

1. Kedudukan Provinsi Lampung terhadap Nasional

Provinsi Lampung memiliki peran penting secara nasional sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kekuatan utama provinsi ini terletak pada potensi sumber daya alamnya, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan, yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Udara Radin Inten II semakin menguatkan posisi Lampung sebagai wilayah yang memiliki konektivitas tinggi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung periode 2009-2029, pengembangan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengembangan sektor industri dan pariwisata, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan di tingkat nasional.

2. Kedudukan Kabupaten Lampung Selatan terhadap Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Selatan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan memegang posisi strategis sebagai penghubung antar pulau, terutama melalui Pelabuhan Bakauheni yang menjadi pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia. Kabupaten ini berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan, kelautan, dan pariwisata di wilayah selatan Provinsi Lampung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031, pengembangan daerah ini difokuskan pada transformasi menjadi pintu gerbang investasi yang mengintegrasikan sektor pertanian,

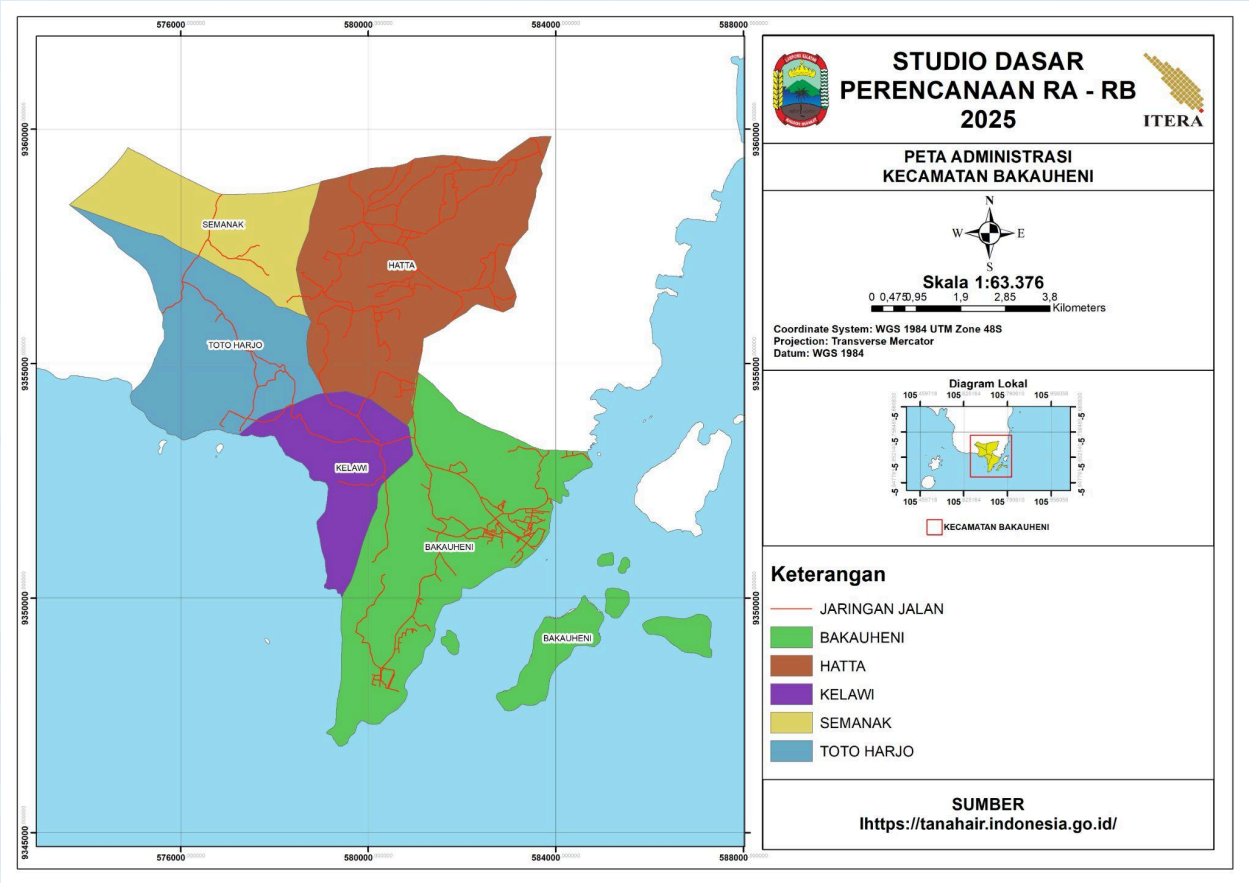
perikanan, pariwisata, dan industri. Rencana tata ruang tersebut juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis serta pelestarian lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten.

3. Kedudukan Kecamatan Bakauheni terhadap Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan Bakauheni merupakan area penting yang berfungsi sebagai lokasi Pelabuhan Bakauheni, sebagai gerbang utama arus transportasi dan logistik antar pulau di Kabupaten Lampung Selatan. Letak yang sangat strategis menjadikan Bakauheni sebagai pusat konektivitas utama bagi jalur laut dan darat. Wilayah ini terutama berfokus pada sektor transportasi, pelabuhan, perdagangan, serta pariwisata pesisir. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031, pengembangan kawasan Bakauheni diarahkan pada peningkatan fasilitas pelabuhan dan pengembangan zona ekonomi pendukung, sembari mempertahankan kelestarian lingkungan pesisir dan kapasitas ekologis agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Bakauheni

3.2.1 Administrasi



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Bakauheni

Sumber : Pengelolaan ArcGIS Studio Proses Perencanaan RA/RB, 2025

Kecamatan Bakauheni adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk dari pemekaran Kecamatan Penengahan (Perda Kab. Lampung Selatan No.03/2006). Ibukota kecamatan berada di Desa Hatta. Luas wilayah Kecamatan Bakauheni tercatat 57,13 km², dengan pusat pemerintahan kecamatan terletak di Desa Bakauheni

Secara Administrasi, Kecamatan Bakauheni memiliki 5 Desa yaitu Totoharjo, Kelawi, Bakauheni, Hata, Semanak. Berikut merupakan tabel luas wilayah masing-masing desa :

Tabel 3. 1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bakauheni

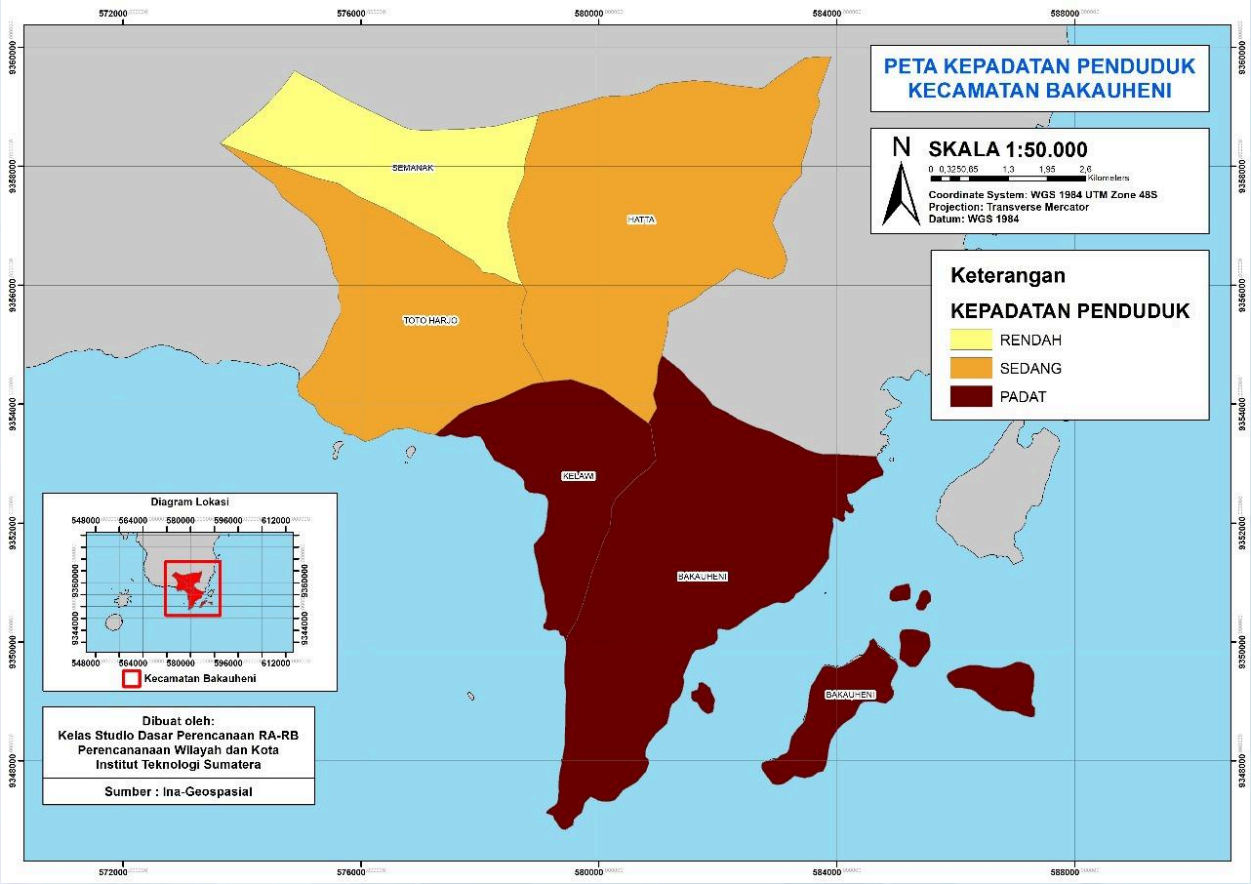
No	Desa/ Kelurahan	Luas (Km²)	Persentase terhadap luas Kecamatan
1.	Toto Harjo	10,19	16,94
2.	Kelawi	14,04	23,35
3.	Bakauheni	16,28	27,07
4.	Hata	9,19	15,28
5.	Semanak	10,44	17,36
Kecamatan Bakauheni		**60,15**	**100,00**

Sumber : BPS Kecamatan Bakauheni dalam angka 2025

Secara administratif, Kecamatan Bakauheni terdiri dari lima desa dengan luas wilayah yang bervariasi. Desa Toto Harjo memiliki luas wilayah sekitar 10,19 km², Desa Kelawi seluas 14,04 km², Desa Bakauheni sebagai desa dengan wilayah terluas mencapai 16,28 km², Desa Hata memiliki luas 9,19 km², dan Desa Semanak dengan luas 10,44 km². Variasi luas wilayah antar desa ini mencerminkan perbedaan kondisi geografis yang berimplikasi pada potensi dan tantangan pembangunan masing-masing desa. Data luas wilayah ini merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan di tingkat desa dan kecamatan.

3.2.2 Demografi

Gambar 3.2 Peta kepadatan Penduduk Kecamatan Bakauheni



Sumber : Pengelolaan ArcGIS Studio Proses Perencanaan RA/RB, 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Bakauheni pada tahun 2025 tercatat sebanyak 25.536 jiwa, terdiri dari 12.868 jiwa laki-laki dan 12.668 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin di kecamatan ini mencapai 101,58, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, Desa Bakauheni merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 13.719 jiwa (6.900 laki-laki dan 6.819 perempuan), atau sekitar 53,74% dari total penduduk kecamatan. Kondisi ini sejalan dengan peran Desa Bakauheni sebagai pusat kegiatan ekonomi dan transportasi utama, karena di wilayah ini terdapat Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang menjadi gerbang utama Pulau Sumatera.

Selanjutnya, Desa Kelawi menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 4.484 jiwa, terdiri atas 2.266 laki-laki dan 2.218 perempuan. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan karena ketersediaan lahan yang luas dan kondisi geografis yang mendukung.

Kemudian, Desa Hata memiliki penduduk sebanyak 3.703 jiwa (1.872 laki-laki dan 1.831 perempuan), disusul oleh Desa Toto Harjo dengan 2.240 jiwa (1.139 laki-laki dan 1.101 perempuan). Kedua desa ini tergolong memiliki kepadatan penduduk sedang dan karakter wilayah yang masih didominasi oleh aktivitas pertanian dan pemukiman penduduk lokal.

Sementara itu, Desa Semanak merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 1.390 jiwa, terdiri dari 691 laki-laki dan 699 perempuan. Meskipun jumlah penduduknya kecil, desa ini memiliki potensi ekonomi di sektor perikanan dan pesisir yang dapat terus dikembangkan.

Secara keseluruhan, struktur kependudukan Kecamatan Bakauheni pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Desa Bakauheni dan Kelawi menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, sementara desa lainnya berperan penting sebagai kawasan penunjang dalam mendukung keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat kecamatan.

Berikut tabel Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bakauheni

Tabel 3. 2 Tabel kepadatan penduduk Kecamatan Bakauheni

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Totoharjo	1.139	1.101	2.240
2.	Kelawi	2.266	2.218	4.484
3.	Bakauheni	6.900	6.819	13.719
4.	Hata	1.872	1.831	3.703
5.	Semanak	691	699	1.390
Kecamatan Bakauheni		**12.868**	**12.668**	**25.536**

Sumber : BPS Kecamatan Bakauheni dalam angka 2024

3.2.3 Ekonomi

perekonomian Kecamatan Bakauheni didominasi oleh sektor perdagangan, jasa transportasi, dan pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas utama di wilayah ini. Luas wilayah kecamatan mencapai 60,15 km² dengan jumlah penduduk sekitar 25.536 jiwa yang sebagian besar bekerja di sektor jasa, perdagangan, perikanan, dan pertanian. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga berkembang pesat, terutama pada bidang perdagangan dan jasa, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, potensi pariwisata pesisir dan ekosistem mangrove semakin digali sebagai sumber pendapatan tambahan, memperkuat perekonomian berbasis sumber daya alam dan jasa masyarakat setempat. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Kecamatan Bakauheni diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan tersebut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.4 Geografi

Kecamatan Bakauheni merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 5 desa dengan luas wilayah total 57,13 km². Kecamatan ini dihuni oleh beragam suku dan etnis, baik penduduk asli maupun pendatang. Berdasarkan geografis, Kecamatan Bakauheni memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Penengahan
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa
d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Ketapang

3.3.5 Potensi Bencana

Sebagai wilayah pesisir, Kecamatan Bakauheni memiliki potensi rawan bencana alam, terutama tsunami yang disebabkan oleh aktivitas gempa dan longsoran di Selat Sunda. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi ancaman banjir pasang dan abrasi pantai yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat serta merusak infrastruktur. Dalam pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni, aspek mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan pesisir menjadi prioritas utama dalam perencanaan tata ruang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dan kelangsungan fungsi ekonomi serta sosial secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

3.3 Tinjauan Dokumen Rencana

3.3.1 RPJMD Kabupaten Lampung Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan periode 2025–2029 menjadi acuan utama untuk merancang arah pembangunan daerah. Dokumen ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pengembangan sektor pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif yang inklusif. RPJMD disusun melalui proses koordinasi dengan

berbagai pemangku kepentingan dan selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung dan nasional.

Kecamatan Bakauheni menjadi wilayah prioritas dalam RPJMD karena fungsinya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Peningkatan konektivitas melalui Jalan Tol Trans-Sumatera, pengembangan kawasan wisata terpadu Bakauheni Harbour City, serta peningkatan ketahanan pesisir terhadap bencana merupakan implementasi langsung dari arah kebijakan RPJMD di tingkat kecamatan.

3.3.2 RTRW Provinsi Lampung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung mengatur tata ruang secara makro, termasuk di dalamnya pengelolaan ruang Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan ditempatkan sebagai wilayah dengan fungsi strategis yang memiliki potensi besar dalam sektor pelabuhan, perdagangan, dan pariwisata pesisir. RTRW ini mengedepankan pemanfaatan ruang yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di wilayah pesisir.

Bakauheni termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) bidang ekonomi dan transportasi yang diarahkan sebagai simpul logistik antar-pulau dan gerbang wisata provinsi. RTRW Provinsi menempatkan wilayah Bakauheni dalam koridor strategis Lampung–Bakauheni–Bandar Lampung–Metro–Way Kanan, yang menjadi fokus pengembangan infrastruktur dan investasi provinsi.

3.3.3 RTRW Kabupaten Lampung Selatan

Dokumen RTRW Kabupaten Lampung Selatan lebih rinci mengatur pola penggunaan ruang di tingkat kabupaten. Prioritasnya mencakup pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata, serta dukungan bagi pengembangan industri kecil dan menengah. RTRW juga menggarisbawahi pentingnya konservasi lingkungan pesisir dan integrasi pengembangan infrastruktur, termasuk pengelolaan Pelabuhan Bakauheni sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Dalam RTRW Kabupaten, Bakauheni ditetapkan sebagai kawasan strategis pesisir dan transportasi dengan fungsi utama pelabuhan, pariwisata, dan perikanan. Zona pemanfaatan ruang di Bakauheni diarahkan untuk pengembangan pelabuhan, kawasan wisata, dan kawasan permukiman penunjang, dengan tetap memperhatikan zona lindung pesisir dan sempadan pantai untuk mitigasi bencana.

3.3.4 RZWP3K

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berfokus pada pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Di Kabupaten Lampung Selatan, RZWP3K mengatur zonasi yang mendukung kegiatan perikanan, ekowisata, dan pelestarian habitat laut.

Wilayah pesisir Bakauheni termasuk dalam zona pemanfaatan umum dan pariwisata pesisir, yang memungkinkan kegiatan ekonomi seperti pelabuhan, wisata pantai, dan perikanan tangkap. Namun, beberapa bagian pesisir juga masuk zona konservasi pesisir dan sempadan pantai yang perlu dilindungi dari konversi lahan berlebihan, sejalan dengan upaya mitigasi abrasi dan tsunami.

3.3.5 RTRW Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan

Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan memberikan gambaran potensi bencana yang harus dihadapi, terutama risiko erupsi, tsunami, banjir, Banjir rob, dan abrasi pantai. Dokumen ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan, dan menyesuaikan pembangunan dengan kondisi risiko yang ada di kawasan pesisir.

Hasil KRB menunjukkan Bakauheni sebagai wilayah pesisir dengan tingkat risiko tinggi terhadap tsunami dan abrasi, serta risiko sedang terhadap longsor di bagian perbukitan (Desa Kelawi dan Hatta). Kondisi ini menuntut integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan ruang dan pembangunan infrastruktur, seperti jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan sistem peringatan dini.

3.3.6 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan

Dokumen ini menguraikan program dan langkah-langkah penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Fokus utama tertuju pada perlindungan wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana, dengan memperkuat sistem peringatan dini dan penguatan kapasitas masyarakat.

Kecamatan Bakauheni menjadi lokasi prioritas program kesiapsiagaan pesisir. BPBD Kabupaten bersama desa-desa seperti Hatta, Totoharjo, dan Bakauheni telah menjadi fokus

pembentukan kelompok siaga bencana, simulasi evakuasi tsunami, dan penyusunan peta jalur evakuasi berbasis masyarakat. Dukungan infrastruktur mitigasi di sekitar pelabuhan dan menara Siger juga termasuk dalam rencana aksi.

3.3.7 RIPPDA Kabupaten Lampung Selatan

RIPPDA provinsi dan rencana induk pariwisata kabupaten mengarahkan pengembangan destinasi pariwisata jangka menengah-panjang, penguatan daya tarik (ODTW), pemasaran, serta kelembagaan pariwisata. Di tingkat kabupaten, RIPPDA Lampung Selatan (dokumen 2022–2025 dan dokumen induk 20 tahun) mengidentifikasi potensi pariwisata pesisir (termasuk Menara Siger / area Bakauheni) tetapi juga menyorot kendala implementasi seperti ketersediaan infrastruktur, tata ruang, dan kapasitas kelembagaan lokal.

BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metodologi Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan berbagai data atau fakta pendukung lainnya yang diperoleh dalam keperluan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam studio proses perencanaan ini, metode penelitian data dibedakan menjadi dua yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

4.1.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa perantara. Data ini diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, survei,dan observasi. Karena diambil langsung dari objek penelitian, data primer dianggap sebagai data asli yang biasanya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Ciri-ciri utama data primer adalah:

a. Keaslian dan keberpihakan langsung, dimana data diperoleh langsung dari sumber sehingga memiliki tingkat validitas dan ketelitian yang tinggi dibandingkan dengan data sekunder.
b. Bersifat real-time, artinya data mencerminkan kondisi terkini dari objek yang diteliti.
c. Spesifik, karena pengumpulan dilakukan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga data yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan studi.

4.1.1.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Cara kerja Wawancara:

a. Menentukan tujuan wawancara : Menggali informasi dari berbagai aspek pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai KSPN Krakatau–Bakauheni untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.
b. Memilih responden : Dinas PUPR, Dinas ATR/BPN, Bappeda, Dinas Perhubungan, BPKAD, pemerintah kecamatan/desa, masyarakat lokal (termasuk tokoh adat dan pelaku UMKM), pengelola pelabuhan, pelaku pariwisata, dan wisatawan.
c. Menyiapkan pedoman wawancara : Pertanyaan disesuaikan dengan tujuh aspek kajian, meliputi alih fungsi dan distribusi lahan, kualitas lingkungan dan air, kesiapan mitigasi bencana, kondisi infrastruktur dan pelayanan umum, pelestarian budaya dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta kebijakan pembiayaan dan transportasi.
d. Melaksanakan wawancara : Dilakukan secara tatap muka di lokasi strategis seperti kantor instansi terkait, desa-desa sekitar BHC, pelabuhan, pusat UMKM, dan area wisata.
e. Menganalisis hasil wawancara : Mengelompokkan jawaban responden menurut aspek penelitian untuk merumuskan isu, potensi, dan rekomendasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kecamatan Bakauheni.

4.1.1.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang diisi responden untuk memperoleh informasi yang mendukung pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai KSPN Krakatau–Bakauheni. cara kerja kuesioner :

a. Menentukan tujuan : Mengukur kualitas sarana infrastruktur (olahraga, peribadatan, kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, pemerintahan, perbelanjaan), menilai kondisi sosial–kependudukan, serta mengidentifikasi dampak ekonomi dan aktivitas wisata di Kecamatan Bakauheni.
b. Menyusun pertanyaan : Menggunakan skala Likert dan pertanyaan terbuka/tertutup untuk menilai persepsi kualitas sarana, kesejahteraan masyarakat, peluang usaha, dan pola kunjungan wisatawan.
c. Menentukan sampel responden : Masyarakat lokal yang tinggal minimal 3 tahun di Kecamatan Bakauheni (termasuk pelaku UMKM dan pekerja lokal) serta wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Bakauheni.

d. Mendistribusikan kuesioner : Dilakukan secara langsung di lima desa sekitar Bakauheni dan di lokasi wisata, serta melalui formulir daring untuk mempermudah partisipasi.
e. Menganalisis hasil kuesioner : Data diolah dengan metode statistik deskriptif dan tabulasi silang untuk menilai kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta dampak pengembangan BHC terhadap sosial-ekonomi dan aktivitas wisata.

4.1.1.3 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan untuk memperoleh informasi faktual yang mendukung kajian.

Cara kerja Observasi :

a. Menentukan aspek pengamatan meliputi :
   - Spasial Keruangan : konektivitas dan aksesibilitas jalan (termasuk Desa Hatta–Kelawi–Bakauheni) kesesuaian fungsi struktur jalan, pemanfaatan ruang sesuai RTRW, alih fungsi lahan dan dampaknya, hierarki wilayah KSPN, kondisi lahan eksisting, penggunaan dan distribusi lahan, ketersediaan serta kesiapan lahan pariwisata.
   - Fisik Lingkungan: jenis tanah, kemiringan lereng, ketersediaan air, vegetasi alami, kesesuaian lahan (topografi, jenis tanah), kualitas air laut dan air tanah (salinitas, kandungan logam berat, bakteri), kedalaman dan daya serap tanah, serta tingkat kekeruhan.
   - Kebencanaan: koordinat lokasi, radius jangkauan, dan status operasional sarana mitigasi bencana.
   - Infrastruktur: persebaran sarana pelayanan umum, sarana rekreasi dan olahraga, sebaran makam, kualitas ruang terbuka hijau, sarana parkir, jalan, dan sanitasi.
   - Sosial Kependudukan: fasilitas umum (balai desa, sanggar budaya, area publik), kegiatan budaya lokal (festival, ritual adat, pertunjukan seni), serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata BHC di Kecamatan Bakauheni.
   - Sosial Ekonomi: lokasi dan aktivitas UMKM, aktivitas pekerjaan sehari-hari masyarakat, serta interaksi jual-beli UMKM.

b. Melaksanakan pengamatan langsung : Kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi relevan di setiap desa di Kecamatan Bakauheni, termasuk titik jalan utama, kawasan pesisir, area UMKM, fasilitas publik, dan titik mitigasi bencana.
c. Mencatat hasil pengamatan : Pencatatan dilakukan menggunakan buku catatan lapangan dilengkapi dokumentasi foto, video, atau peta tematik untuk mendukung data spasial.
d. Menganalisis data observasi : Pengolahan temuan lapangan untuk menilai kondisi eksisting, mengidentifikasi potensi dan masalah, serta menyusun rekomendasi pengembangan sesuai tujuh aspek kajian.

4.1.1.4 traffic counting

Traffic counting adalah metode survei lalu lintas yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan, simpang, atau kawasan tertentu. cara kerja traffic counting:

1. Traffic Counting Manual

   Pada metode ini, penghitungan dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan. Petugas ditempatkan di titik pengamatan dengan lembar pencatatan (tally sheet) yang telah disiapkan. Setiap kendaraan yang melintas dicatat berdasarkan jenisnya, seperti sepeda motor, mobil pribadi, bus, atau truk. Proses pencatatan dilakukan dalam interval waktu tertentu, biasanya per 15 menit atau per jam, sehingga dapat diketahui volume kendaraan per jam dan waktu puncak lalu lintas (*peak hour*). Data hasil pengamatan kemudian direkap dan dianalisis untuk mengetahui tingkat kepadatan dan karakteristik arus lalu lintas di lokasi survei.

2. Traffic Counting Otomatis

   Metode ini menggunakan perangkat teknologi untuk mendeteksi dan menghitung kendaraan secara otomatis. Alat yang digunakan dapat berupa **sensor induktif** yang ditanam di jalan, pneumatic tube counter (selang tekanan udara), sensor radar atau microwave, kamera CCTV dengan perangkat lunak pengenal kendaraan, maupun sensor inframerah. Ketika kendaraan melintas, alat akan mendeteksi perubahan fisik (seperti tekanan, pantulan gelombang, atau gangguan cahaya) dan secara otomatis mencatat satu kendaraan. Data yang terkumpul dapat langsung disimpan dan diolah secara digital untuk

menghasilkan informasi mengenai volume, kecepatan, arah perjalanan, serta jenis kendaraan.

Hasil penghitungan lalu lintas sangat relevan dengan isu strategis pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya dalam konteks pengembangan struktur dan pola ruang yang berpotensi meningkatkan kegiatan pariwisata dan perekonomian daerah. Dari analisis traffic counting dapat mengetahui tingkat aksesibilitas jalan yang mengetahui kelancaran mobilitas wisatawan, distribusi barang dan jasa, serta kebutuhan antar kawasan.

Volume data pergerakan menjadi nilai dasar apakah kapasitas jaringan jalan di kawasan KSPN sudah memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata. kegiatan traffic counting tidak hanya menggambarkan kondisi aktual arus lalu lintas, tetapi juga berperan sebagai dasar analisis spasial dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan. Hasil ini mendukung pencapaian tujuan pengembangan KSPN yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas, pemerataan aktivitas ekonomi, serta penguatan konektivitas antar-kawasan dalam sistem struktur ruang wilayah.

4.1.1.5 Metode Pengumpulan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dapat berguna untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Metode ini digunakan jika populasi yang diteliti terlalu besar, dan tidak mungkin untuk mempelajari seluruh populasi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu.

Metode yang dilakukan dalam survei, yaitu *Random Sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mengacu pada pengambilan sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada. Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, yang tidak ada intervensi tertentu. *Random Sampling* merupakan teknik

pengambilan sampel yang paling umum dan sederhana di bidang penelitian. *Random sampling* dapat digunakan menggunakan rumus berikut (Jobstreet, 2024):

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : tingkat signifikansi (10%)

Pada penelitian kali ini maka dibutuhkannya perhitungan per kecamatan sebagai berikut:

Jumlah penduduk (Jiwa):

Totoharjo : 2.240

Kelawi : 4.484

Bakauheni : 13.719

Hata : 3.703

Semanak : 1.390

Jumlah : 25.536

Maka *Random Sampling* bisa didapatkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{25.536}{1+25.536*10\%^2}$$

$$n = \frac{25.536}{251,68}$$

$$n = 99,602$$

Jadi, jumlah responden yang dibutuhkan per kecamatan sebanyak 100 responden. Dan untuk mendapatkan jumlah responden per desa dapat dilakukan dengan rumus:

$$nk = \frac{Nk}{N}n$$

Keterangan:

nk : jumlah responden yang dibutuhkan dalam desa-k

Nk : jumlah total populasi dalam desa-k

N : jumlah total populasi dalam kecamatan

n : jumlah total responden yang diinginkan dalam survei

Dengan contoh perhitungan pada Desa Totoharjo, berikut adalah contoh perhitungannya:

$$nk = \frac{Nk}{N} n$$

$$nk = \frac{2.204}{25.536} * 100$$

$$nk = 0,08792 * 100$$

$$nk = 8,792$$

Jadi, jumlah responden yang dibutuhkan pada Desa Totoharjo sebanyak 9 orang. Dengan perhitungan yang sama, maka didapatkan jumlah responden yang dibutuhkan dalam desa yang akan dikaji, yaitu:

Kelawi : 18 responden

Bakauheni : 54 responden

Hata : 15 responden

Semanak : 4 responden

4.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan sebelumnya oleh instansi lain, kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk mendukung atau melengkapi penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, peta tematik, dan arsip kelembagaan yang relevan dengan pengembangan Kota Pelabuhan Bakauheni sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni.

Berikut beberapa sumber data sekunder :

a. Dokumen resmi pemerintah
   - RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
   - SHP pola ruang, struktur ruang, morfologi, jenis tanah, kemiringan lereng, vegetasi, dan peta lahan eksisting (BAPPEDA, PUPR)
   - Peraturan Daerah (Perda) Lampung Selatan terkait fungsi dan kewenangan lembaga
   - Dokumen SOP penanganan jalur evakuasi dan laporan historis kejadian bencana (BPBD, BNPB)
b. Laporan statistik dan kelembagaan
   - Data PDRB, kependudukan, ketenagakerjaan, dan kontribusi PAD sektor pariwisata, jasa, serta perdagangan (BPS Kabupaten Lampung Selatan, SAKERNAS)
   - Data jumlah dan pertumbuhan UMKM serta peran UMKM dalam perekonomian lokal (Dinas Koperasi & UMKM)
   - Laporan investasi pemerintah dan swasta (BKPM)
c. Data teknis infrastruktur dan utilitas
   - Persebaran sarana pelayanan umum, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perbelanjaan, dan transportasi (PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata)
   - Data jaringan air minum, sanitasi, drainase, saluran limbah, listrik, telekomunikasi, gas, dan penerangan jalan (PDAM, PLN, KOMINFO, PGN)
   - Data kualitas dan pemanfaatan air tanah (PSDA/ESDM, DLH, KLHK)
d. Data kebencanaan dan lingkungan
   - SHP sebaran kejadian bencana, jalur evakuasi, lokasi alat peringatan dini (tsunami, gempa, banjir rob, erupsi Gunung Anak Krakatau, abrasi) (BPBD, BNPB, PVMBG, BMKG)
   - Data kualitas air dan kajian rawan bencana (DLH, BMKG)
e. Publikasi ilmiah dan sumber tambahan
   - Jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku terkait pengelolaan pariwisata pesisir dan pengembangan kawasan strategis
   - Artikel berita, laporan media massa, dan informasi dari lembaga swasta atau masyarakat lokal yang membahas isu-isu pembangunan dan pariwisata Bakauheni

4.2 Metodologi Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang berguna, yang kemudian digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah ataupun membuat kesimpulan.

4.2.1 Aspek Spasial Keruangan

Pada sasaran struktur ruang, digunakan analisis kuantitatif untuk mengukur keterkaitan struktur ruang dengan jaringan jalan, menilai tingkat konektivitas, serta melihat kesesuaian fungsi jalan dengan hierarki wilayah. Untuk mengetahui hierarki wilayah dan pusat pertumbuhan desa, digunakan analisis skalogram yang memanfaatkan data fasilitas pelayanan yang tersedia di tiap wilayah. Selanjutnya, analisis overlay spasial digunakan untuk memadukan peta jaringan jalan, peta struktur ruang, dan rencana tata ruang, sehingga dapat terlihat keterhubungan antarwilayah dan tingkat aksesibilitasnya. Pada sasaran pola ruang, analisis overlay juga digunakan untuk membandingkan kondisi lahan eksisting dengan pola ruang dan guna lahan sesuai RTRW, sehingga dapat diketahui kesesuaian peruntukan ruang yang ada di lapangan. Sementara itu, analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk memahami kondisi kebijakan yang berlaku, termasuk dinamika alih fungsi lahan menjadi kawasan pariwisata. Dengan mengikuti langkah-langkah sesuai matriks ini, analisis yang dilakukan memberikan gambaran yang lebih utuh dan nyata tentang kondisi struktur dan pola ruang di KSPN Krakatau–Bakauheni.

4.2.2 Aspek Infrastruktur

Pada sasaran infrastruktur wilayah, analisis yang digunakan mengacu pada kombinasi metode deskriptif dan spasial sesuai dengan karakteristik data yang tersedia. Untuk menilai kualitas infrastruktur seperti pusat perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, RTH, serta lahan parkir, diterapkan analisis deskriptif yang berfokus pada kondisi fisik, kapasitas layanan, dan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai mutu pelayanan yang disediakan serta keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, analisis spasial digunakan untuk mengidentifikasi persebaran infrastruktur dalam wilayah studi dengan memanfaatkan data spasial (SHP) dan hasil observasi lapangan. Melalui teknik overlay spasial, dapat terlihat pola distribusi infrastruktur, tingkat pemerataan antar desa, serta keterhubungan dengan jaringan jalan dan pusat kegiatan di Kecamatan Bakauheni.

Pada sisi prasarana dasar seperti jaringan jalan, drainase, air minum, sanitasi, dan air limbah, analisis deskriptif dilakukan untuk menilai kualitas, sedangkan analisis spasial diterapkan guna melihat

ketersediaan dan sebaran prasarana di lapangan. Begitu pula untuk aspek utilitas, meliputi jaringan transportasi, air bersih, telepon, gas, listrik, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum, yang dianalisis melalui kombinasi pendekatan deskriptif dan spasial untuk menghasilkan gambaran utuh mengenai kondisi, kualitas, serta distribusinya. Dengan penerapan analisis ini, aspek infrastruktur dapat dipahami secara menyeluruh, baik dari segi mutu maupun ketersebaran, sehingga hasilnya mampu memberikan dasar yang kuat dalam mengevaluasi kebutuhan peningkatan dan pemerataan infrastruktur di wilayah Bakauheni.

4.2.3 Aspek Fisik Lingkungan

Pada aspek fisik dan lingkungan, metode analisis yang digunakan meliputi analisis kemampuan lahan, analisis spasial, dan analisis deskriptif. Analisis kemampuan lahan diterapkan untuk menilai daya dukung dan kesesuaian lahan berdasarkan kemiringan, jenis tanah, dan kondisi hidrologi sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang. Analisis spasial memetakan sebaran karakteristik fisik, seperti morfologi dan tutupan lahan, untuk mengidentifikasi area rawan erosi atau abrasi pantai. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan kondisi iklim, vegetasi, dan karakter biofisik lainnya secara naratif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi dan keterbatasan lingkungan di Bakauheni.

4.2.4 Aspek Kebencanaan

Metodologi analisis pada aspek kebencanaan bertujuan untuk menilai tingkat risiko dan merumuskan langkah mitigasi terhadap potensi erupsi Gunung Krakatau serta bencana lain yang dapat mengganggu pengembangan pariwisata di Kecamatan Bakauheni. Analisis Kerawanan Bencana dilaksanakan dengan memadukan data historis kejadian bencana, kondisi geologi, topografi, dan jarak permukiman terhadap sumber bahaya guna memetakan zona rawan serta menentukan tingkat ancaman pada setiap wilayah. Selanjutnya, Analisis Kuantitatif digunakan untuk menghitung indeks risiko bencana berdasarkan parameter kerentanan, kapasitas adaptif, dan tingkat ancaman, sehingga diperoleh nilai risiko yang terukur.

Hasil perhitungan tersebut dikombinasikan dengan Analisis Spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghasilkan peta bahaya, jalur evakuasi, dan lokasi titik kumpul evakuasi yang strategis. Analisis Deskriptif dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan guna menggambarkan tingkat kesiapsiagaan masyarakat, efektivitas sistem peringatan dini, serta ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Selanjutnya, Analisis Kemampuan Masyarakat Menghadapi Bencana dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman, kesiapan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak bencana, termasuk ketersediaan rencana evakuasi keluarga serta partisipasi dalam simulasi bencana. Terakhir, Analisis Kualitatif digunakan untuk menafsirkan persepsi masyarakat dan mengevaluasi kebijakan lokal terkait mitigasi bencana, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi penguatan kapasitas dan peningkatan koordinasi antarinstansi dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata yang aman dan berkelanjutan di Kecamatan Bakauheni.

4.2.5 Aspek Sosial Kependudukan

Pada aspek sosial kependudukan, metode analisis yang diterapkan meliputi analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Analisis deskriptif menggambarkan jumlah penduduk, struktur umur, tingkat pendidikan, dan distribusi kepadatan. Analisis kuantitatif mengolah data BPS dan hasil survei untuk menilai pertumbuhan penduduk dan pola migrasi, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memahami dinamika sosial-budaya melalui wawancara dengan tokoh masyarakat. Kombinasi ketiga metode ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi kependudukan Bakauheni.

4.2.6 Aspek Sosial Ekonomi

Pada aspek sosial ekonomi, metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami, persepsi, serta kendala serta pandangan yang dihadapi pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat melalui wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Analisis ini diterapkan untuk menjelaskan kondisi usaha, tingkat partisipasi tenaga kerja, serta kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap ekonomi lokal secara naratif. Sementara itu, analisis kuantitatif digunakan untuk menampilkan data pendukung, seperti jumlah unit usaha, tenaga kerja terserap, serta data sekunder resmi, sehingga memberikan penguatan pada hasil temuan kualitatif. Selain itu, digunakan pula analisis Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis di Kecamatan Bakauheni. Analisis LQ membantu mengetahui sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan berperan dominan dalam perekonomian lokal. Dengan kombinasi analisis tersebut, diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika sosial ekonomi di Kecamatan Bakauheni.

4.2.7 Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

Metode analisis pada aspek kelembagaan dan pembiayaan difokuskan pada penilaian ketersediaan, kualitas, dan menilai adanya peran pemerintah di Kecamatan Bakauheni dalam mendukung peningkatan aktivitas kawasan sebagai Proyek Strategis Nasional. Analisis deskriptif kualitatif menjadi pendekatan utama dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pengelola keuangan seperti BPKAD, Lembaga swasta dan daerah dan perwakilan masyarakat, untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, regulasi, serta hambatan dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata dan transportasi multimoda.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta laporan anggaran dan rencana pembiayaan infrastruktur yang relevan. Analisis ini menitikberatkan pada efektivitas tata kelola, kualitas koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pembiayaan infrastruktur transportasi, seperti integrasi transportasi multimoda, pelebaran jalan, dan pengaturan parkir atau transit. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai kesiapan kelembagaan dalam mendukung pengembangan kelancaran infrastruktur, transportasi, lalu lintas dan keberlanjutan pendanaan. Dengan demikian, metode ini memberikan dasar yang menyeluruh bagi perumusan rekomendasi penguatan kelembagaan dan strategi pendanaan guna menunjang pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Bakauheni.

4.3 Kerangka Analisis

Kerangka Analisis adalah rancangan atau pola berpikir yang digunakan sebagai dasar dalam mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam suatu penelitian atau kajian. Kerangka ini membantu peneliti menentukan hubungan antar variabel, alur analisis, serta cara menjawab tujuan penelitian secara sistematis dan terarah.

4.3.1 Teknik UGS

Teknik UGS adalah jenis tapisan isu yang digunakan dengan mempertimbangkan tiga kriteria: *urgency*, *growth*, dan *seriousness.* Urgency adalah seberapa mendesak isu harus dibahas,

dianalisis, dan ditindaklanjuti terkait dengan rentang waktu terjadinya isu; semakin dekat maka semakin mendesak Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani sebagaimana mestinya terkait dengan rentang waktu/pola perubahan kondisi pada isu yang dijadikan fokus Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas terkait dengan dampak yang ditimbulkan cakupan/ruang lingkup dampak/eksternalitas yang diterima pihak lain

4.3.1.1 Aspek Spasial Keruangan

Tabel 4.1 Tabel UGS Aspek Spasial Keruangan

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Pengembangan kawasan sempadan pantai di Kecamatan Bakauheni memiliki potensi wisata bahari dan ekowisata pesisir, namun belum optimalnya konektivitas jalan menuju Desa Kelawi dan Pantai Minang Rua menyebabkan terhambatnya akses dan pengembangan wisata.	4	4	4	12	3
2.	Potensi Kawasan pengolahan perikanan di bakauheni yang dapat dikembangkan dalam pola ruang pesisir	4	4	5	13	2
3.	Penggembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni melalui Bakauheni Harbour City berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata dan ekonomi.	5	5	4	14	1
5.	Belum terwujudnya kebijakan satu peta (One Map Policy) yang jelas di pantai minang rua, bakauheni menyebabkan terjadinya konflik penggunaan lahan.	3	3	5	12	5
6.	Konversi lahan di desa Bakauheni menyebabkan pemulihan fungsi ruang terbuka	3	4	4	11	6
7.	Tidak optimalnya penggunaan fungsi lahan pertanian di daerah pesisir menyebabkan berkurangnya lahan produktif, dan minimnya kawasan lahan pertanian di Bakauheni menjadikan pengembangan sektor pertanian tidak efisien.	3	4	4	11	6

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousness* (S), isu "Penetapan Bakauheni Harbour City sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah kecamatan bakauheni menyebabkan peningkatan aktivitas kawasan yang berdampak pada kemacetan Jalan Utama Pelabuhan" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 13.

isu ini dipilih sebagai isu utama karena perkembangan BHC mendorong pergeseran fungsi ruang dari kawasan pelabuhan dan pesisir menjadi kawasan wisata, perdagangan, dan jasa, sehingga menimbulkan tekanan terhadap jaringan jalan utama yang menjadi sumbu

pergerakan utama wilayah. Dari sisi keruangan, peningkatan intensitas aktivitas pariwisata dan logistik tanpa pengaturan tata ruang yang seimbang menimbulkan konflik penggunaan lahan, ketidakterpaduan antar-fungsi ruang, serta menurunkan efisiensi konektivitas antar zona kegiatan. Oleh karena itu, isu ini mendapat nilai UGS tertinggi karena berdampak besar terhadap keterpaduan struktur ruang, keseimbangan fungsi kawasan, dan keberlanjutan sistem transportasi di Kecamatan Bakauheni.

Dari sisi urgensi, isu penetapan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan arah pengembangan kawasan strategis nasional dan tata ruang wilayah pesisir Bakauheni. Urgensi ini muncul karena pesatnya peningkatan aktivitas pembangunan dan mobilitas akibat proyek BHC yang berpotensi menimbulkan tekanan spasial terhadap ruang jalan, kawasan pelabuhan, serta zona permukiman di sekitarnya. Jika tidak segera diantisipasi melalui penataan ruang yang terintegrasi dan penguatan infrastruktur transportasi, maka kemacetan, konflik penggunaan lahan, serta ketidakteraturan struktur ruang akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, secara spasial isu ini mendesak untuk ditangani agar pengembangan BHC tetap selaras dengan kapasitas ruang wilayah dan tidak mengganggu fungsi utama Bakauheni sebagai simpul transportasi dan pintu gerbang pariwisata nasional.

Oleh karena itu isu ini sangat penting karena peningkatan aktivitas akibat proyek BHC segera memerlukan penataan ruang terpadu untuk mencegah kemacetan, konflik lahan, dan ketidakteraturan struktur ruang di kawasan Bakauheni.

4.3.1.2 Aspek Fisik Lingkungan

Tabel 4.2 Tabel UGS Fisik Lingkungan

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Karakteristik tekstur tanah pesisir Bakauheni sebagian besar merupakan aluvial berpasir yang kesuburannya rendah, sehingga memiliki keterbatasan untuk pertanian intensif.	2	3	3	8	5
2.	Penurunan fungsi lingkunga di kawasan banjir memicu perlunya rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, dan pembentukan jalur hijau.	3	4	3	10	3
3.	Daya dukung dan daya tampung ekosistem wilayah Kecamatan Bakauheni terhadap pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni berdasarkan kondisi fisik-lingkungan.	4	5	4	13	1
4.	Pola iklim muson dan curah hujan tinggi di Bakauheni berdampak sektor pertanian.	2	3	2	7	6
5.	Lapisan sedimen tebal dari kaldera purba di Bakauheni membuat daerah ini lebih rentan terhadap guncangan gempa, sehingga bangunan perlu dirancang agar tahan gempa.	4	3	4	11	2
6.	Struktur lapisan tanah di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, menunjukkan adanya lapisan tanah lempung berplastisitas tinggi dengan resistivitas rendah yang berpotensi menyebabkan amblesan.	3	3	3	9	4
7.	sungai dan mata air di bakauheni berpotensi dikembangkan untuk konservasi, penanaman tanaman bernilai dan ekowisata yang mendukung lingkungan dan ekonomi lokal (RTRW Lampung Selatan 2011–2031).	2	2	2	6	7
8.	Hutan lindung di kecamatan bakauheni memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui rehabilitasi,reklamasi,perlindungan optimal,pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi	1	2	2	5	8

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousness* (S), isu "Daya dukung dan daya tampung ekosistem wilayah Kecamatan Bakauheni terhadap pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni berdasarkan kondisi fisik-lingkungan" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 13 dan menempati peringkat pertama.

Isu ini dianggap paling mendesak (Urgency) karena perkembangan pesat kawasan KSPN Krakatau–Bakauheni berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Peningkatan aktivitas pembangunan, transportasi, dan pariwisata tanpa pengelolaan yang tepat dapat menurunkan kualitas ekosistem pesisir, air tanah, dan kawasan lindung di sekitar Bakauheni.

Dari segi (Growth), isu ini memiliki kecenderungan pertumbuhan dampak yang tinggi seiring meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis nasional tersebut. Ketidakseimbangan antara pemanfaatan ruang dan kemampuan lingkungan menampung aktivitas manusia berpotensi memperburuk kondisi fisik-lingkungan di masa depan.

Sedangkan dalam aspek (*Seriousness*), isu ini bersifat luas dan strategis karena mempengaruhi berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Gangguan terhadap daya dukung lingkungan dapat mengancam keberlanjutan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bakauheni. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perencanaan yang komprehensif seperti evaluasi daya dukung lingkungan, zonasi kawasan lindung, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan nilai UGS yang tinggi serta potensi dampaknya terhadap keberlanjutan kawasan, isu ini menjadi prioritas utama untuk dikaji dan ditangani lebih lanjut dalam perencanaan wilayah Kecamatan Bakauheni

4.3.1.3 Aspek Kebencanaan

Tabel 4.3 Tabel UGS Aspek Kebencanaan

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Peningkatan sistem peringatan dini yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana secara signifikan dapat memperkecil risiko kerugian dan korban akibat gempa bumi	4	3	5	12	3
2.	Pengendalian alih fungsi hutan dan penerapan konservasi lahan di wilayah perbukitan sekitar Bakauheni berpotensi mengurangi risiko longsor serta menekan potensi banjir akibat limpasan air hujan	4	3	4	11	4
3.	Perbaikan drainase melalui pemasangan jebakan sampah dan pelebaran saluran berpotensi mengurangi banjir serta mendukung kesiapsiagaan bencana	3	3	3	9	5
4.	Minimnya pengendalian aktivitas di wilayah pesisir Bakauheni yang rawan tsunami meningkatkan potensi korban jiwa dan kerugian besar saat bencana terjadi.	5	4	4	13	2
5.	kurangnya sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana di kecamatan Bakauheni meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan pelaku wisata, dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau serta bencana lain seperti banjir, banjir rob, erosi, abrasi, dan tsunami	5	5	5	15	1
6.	Kurangnya sambungan telepon kabel yang tahan gelombang laut di pesisir Bakauheni meningkatkan kerentanan komunikasi darurat saat terjadi tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.	4	4	4	12	3

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousnes* (S), isu "kurangnya sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana di Kecamatan Bakauheni" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 15.

Dari aspek urgency, isu ini tergolong sangat mendesak untuk segera ditangani karena wilayah Bakauheni merupakan kawasan pesisir yang rawan terhadap berbagai bencana seperti erupsi Gunung Anak Krakatau, tsunami, abrasi, dan banjir rob. Ketiadaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang jelas dapat meningkatkan risiko keselamatan masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dari aspek growth, isu ini berpotensi memburuk apabila tidak segera diatasi, mengingat peningkatan jumlah penduduk, aktivitas

pelabuhan, serta perkembangan pariwisata di pesisir yang tidak disertai kesiapsiagaan bencana akan memperbesar potensi korban dan kerugian di masa mendatang. Sementara dari aspek seriousness, isu ini sangat serius karena menyangkut keselamatan jiwa manusia dan berdampak langsung pada sektor vital seperti transportasi laut dan pariwisata daerah.

Dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan juga signifikan, mulai dari kerugian ekonomi, hilangnya tempat tinggal, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, dengan total skor tertinggi sebesar 15, isu ini ditetapkan sebagai isu strategis prioritas yang perlu segera mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mitigasi bencana dan penataan ruang wilayah pesisir.

4.3.1.4 Aspek Infrastruktur

Tabel 4.4 Tabel UGS Aspek Infrastruktur

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Buruknya infrastruktur jalan menuju Pantai Minang Rua yang curam dan minim penerangan menyebabkan risiko keselamatan pengguna jalan meningkat	3	3	3	9	4
2.	Tidak meratanya fasilitas sekolah dasar di kecamatan bakauheni menyebabkan ketimpangan akses pendidikan	3	3	5	11	2
3.	Pengembangan sistem saluran air buatan di bakauheni berpotensi meningkatkan kapasitas pengandalian air serta mendukung ketahanan infrastruktur wilayah	1	2	2	5	6
4.	Kerusakan jalan penghubung antar kecamatan di desa Hatta, Lampung Selatan, yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun tanpa perbaikan, menjadi permasalahan serius yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas warga	3	3	3	9	4
5.	Minimnya infrastruktur penerangan jalan di Bakauheni menyebabkan kendaraan bergantung pada cahaya lampu kendaraan, sehingga meningkatkan risiko keselamatan lalu lintas	3	3	4	10	3
6.	Pengembangan infrastruktur PDAM di Kecamatan Bakauheni berpotensi mendukung penyediaan sistem air minum yang lebih merata dan memperkuat ketahanan infrastruktur wilayah	2	2	3	7	5
7.	Tidak optimalnya infrastruktur tower transmisi tua menyebabkan gangguan pasokan listrik di Pelabuhan Bakauheni	2	3	3	11	2
8.	Pengembangan infrastruktur transportasi di BHC membuka peluang pembangunan moda transportasi terpadu yang mendukung konektivitas kawasan serta meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat dan logistik antar daerah	5	4	5	14	1

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousness*, isu "Pengembangan infrastruktur transportasi di Bakauheni Harbour City (BHC) membuka peluang pembangunan transportasi moda terpadu yang mendukung konektivitas kawasan serta meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat dan logistik antar daerah" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 14.

Isu ini dipilih sebagai isu utama karena memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem infrastruktur transportasi di kawasan strategis nasional. Pembangunan moda transportasi terpadu di BHC berpotensi memperbaiki jaringan jalan, pelabuhan, dan akses menuju kawasan pendukung, sehingga mendorong efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antar daerah.

Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi ini menuntut adanya perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta agar sistem konektivitas yang dibangun dapat berfungsi secara optimal. Tantangan utama terletak pada sinkronisasi kebijakan antar sektor, pembiayaan proyek, serta penataan ruang kawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan.

Isu ini memiliki tingkat urgensi tinggi karena keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi terpadu akan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, pariwisata, dan logistik di wilayah Bakauheni dan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan perencanaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan infrastruktur agar dapat mendukung pertumbuhan kawasan secara efisien dan merata

4.3.1.5 Aspek Sosial Kependudukan

Tabel 4.5 Tabel UGS Aspek Kependudukan

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Desa Semanak memiliki kepadatan rendah sehingga berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian dan permukiman baru	2	4	2	8	7
2.	lokasi desa kelawi yang stategis dekat jalur transportasi membuka peluang pengembangan perdagangan dan jasa	3	4	3	10	5
3.	potensi pengembangan BHC menjadi ekosistem berkelanjutan yang mampu mendukung pengembangan pelestarian budaya lampung dan dinamika kependudukan	5	5	5	15	1
4.	Desa Totoharjo memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah sehingga berpotensi untuk pengembangan permukiman dan pertanian.	2	3	2	7	8
5.	Tidak meratanya jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di desa semanak menghambat perkembangan wilayah	3	3	3	9	6
6.	Desa Hatta sebagai ibu kota kecamatan menghadapi ketidakmerataan kualitas hidup masyarakat meskipun menjadi pusat administrasi dan layanan pemerintahan	4	4	4	12	4
7.	Rendahnya derajat kesehatan dan IPM di wilayah Puskesmas Rawat Inap Bakauheni menunjukkan lemahnya aspek sosial kependudukan, terutama dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan	5	4	5	14	2
8.	Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kelawi yang masih rendah membatasi peningkatan kualitas sumber daya manusia	4	4	4	12	3

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousness* (S), isu "Potensi pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC) menjadi ekosistem berkelanjutan yang mampu mendukung pengembangan pelestarian budaya Lampung dan dinamika kependudukan" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 15 dan menempati peringkat pertama dalam aspek sosial kependudukan dan kebudayaan.

Isu ini dipilih karena memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat lokal di tengah pengembangan kawasan wisata BHC. Kehadiran BHC tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperkuat identitas budaya Lampung melalui pelestarian tradisi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.

Dari sisi urgensi, isu ini penting untuk segera diperhatikan agar nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dengan pembangunan kawasan wisata. Pertumbuhan dan dukungan terhadap isu ini tinggi karena relevan dengan upaya menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berakar pada budaya lokal.

Oleh karena itu, isu ini menjadi prioritas utama untuk dikaji lebih lanjut, karena berperan penting dalam menjaga ckeseimbangan antara pengembangan pariwisata, pelestarian budaya, dan dinamika sosial kependudukan di Kecamatan Bakauheni.

4.3.1.6 Aspek Sosial Ekonomi

Tabel 4.6 Tabel UGS Aspek Sosial Ekonomi

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Bakauheni sebagai kawasan strategis perdagangan, logistik, dan distribusi barang antar pulau didukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang mempercepat arus distribusi dari Lampung ke pelabuhan.	4	4	4	12	3
2.	Jumlah koperasi aktif di Bakauheni hanya 7 unit, menjadikannya salah satu kecamatan dengan jumlah terendah di Lampung Selatan.	3	3	4	10	4.
3.	Dukungan sektor ekonomi terhadap penguatan ekonomi lokal menjadi pendorong utama dalam pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni melalui Bakauheni Harbour City	5	4	5	14	1
4.	Ketidakstabilan produksi pertanian dan perkebunan di Bakauheni berdampak pada penurunan pendapatan petani dan daerah.	4	5	4	13	2

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousness* (S), isu "Dukungan sektor ekonomi terhadap penguatan ekonomi lokal menjadi pendorong utama dalam pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni melalui Bakauheni Harbour City" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 14 dan menempati peringkat pertama dalam aspek sosial ekonomi.

Isu ini dipilih sebagai isu utama karena memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bakauheni. Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau memberikan peluang besar bagi peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan.

Dari sisi urgensi, isu ini sangat penting untuk segera ditangani agar masyarakat lokal dapat berperan aktif dan memperoleh manfaat nyata dari proyek pengembangan kawasan. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang besar apabila penguatan sektor ekonomi lokal dilakukan secara optimal. Sedangkan pada aspek skala, isu ini berdampak luas karena mempengaruhi berbagai sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Oleh karena itu, isu ini diprioritaskan untuk dikaji lebih lanjut karena menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan antara pengembangan kawasan wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta berpotensi besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kecamatan Bakauheni.

4.3.1.7 Aspek Kelembagaan dan pembiayaan

Tabel 4.7 Tabel UGS Aspek Kelembagaan dan pembiayaan

NO	ISU	U	G	S	JUMLAH BOBOT	PERINGKAT
1.	Peningkatan Jalan Cor Beton oleh pemerintah desa hatta berpotensi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa Hatta	4	4	4	12	4
2.	Pelebaran jalan rabat beton Pantai Minang Rua oleh Pemkab Lampung Selatan berpotensi mendorong pariwisata dan meningkatkan ekonomi Desa Kelawi.	5	4	4	13	3
3	Penetapan Bakauheni Harbour City sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah kecamatan bakauheni menyebabkan peningkatan aktivitas kawasan yang berdampak pada kemacetan Jalan Utama Pelabuhan	5	5	5	15	1
4	Minimnya kontribusi pelabuhan PAD, Pemprov Lampung membangun kapal penyeberangan milik daerah yang dapat berpotensi meningkatkan PAD	4	4	3	11	4
5	Pembuangan sampah sembarangan di Pelabuhan Bakauheni oleh ASDP Bakauheni yang dapat mengganggu aktivitas warga dan mencemari lingkungan sekitar.	5	5	4	14	2

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan indikator *Urgency* (U), *Growth* (G), dan *Seriousness* (S), isu "Penetapan Bakauheni Harbour City sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah kecamatan bakauheni menyebabkan peningkatan aktivitas kawasan yang berdampak pada kemacetan Jalan Utama Pelabuhan" memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 15.

Isu ini dipilih sebagai isu utama karena memiliki dampak paling besar terhadap aspek kelembagaan dan pembiayaan di Kecamatan Bakauheni. Peningkatan aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat akibat pengembangan kawasan menyebabkan kemacetan di jalur utama sekitar pelabuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, terutama dalam pengaturan lalu lintas dan pengelolaan infrastruktur.

Selain itu, isu ini memerlukan pembiayaan yang besar serta keterlibatan dari lembaga swasta dan lembaga daerah, disertai kebijakan yang tepat dari pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola serta transparansi penggunaan dana menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Isu ini dianggap paling mendesak untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan sinkronisasi kelembagaan, kebijakan pembiayaan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian lokal.

4.3.2 Diagram Fishbone

Gambar 4.1 diagram Fishbone

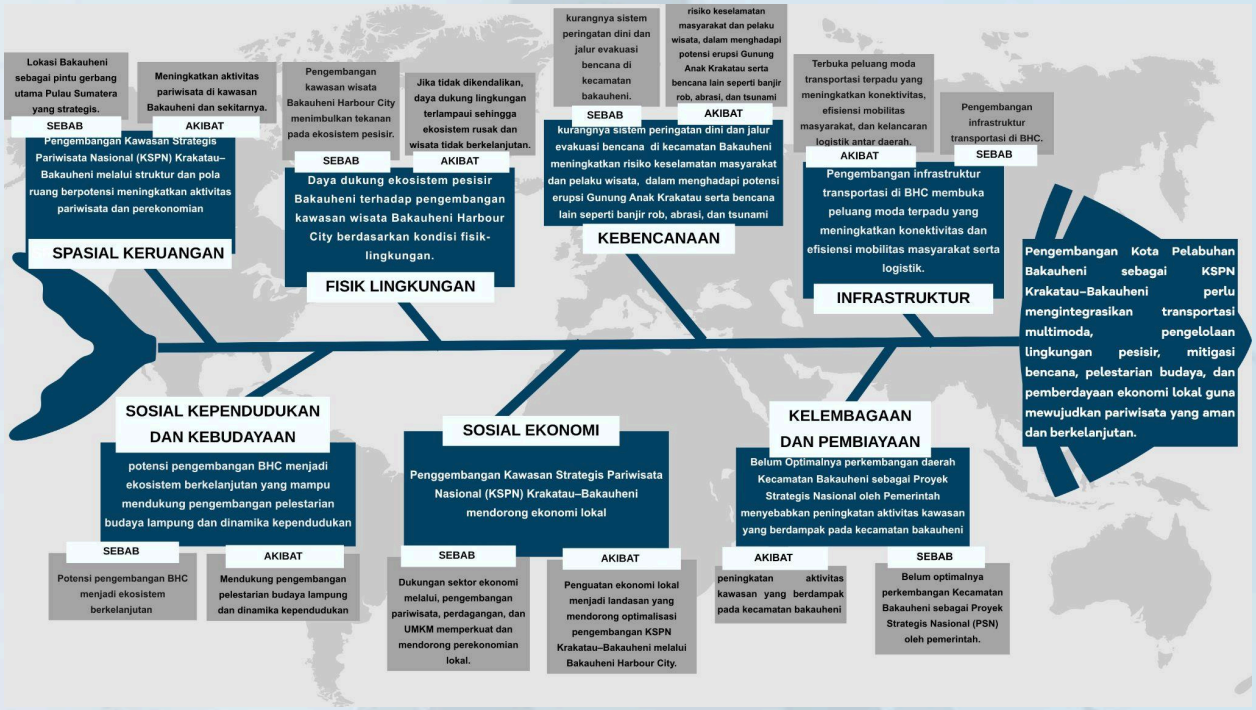


Diagram fishbone menggambarkan keterkaitan antara tujuh aspek utama dalam kajian pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni, yaitu aspek spasial keruangan, fisik lingkungan, kebencanaan, infrastruktur, sosial kependudukan, sosial ekonomi, serta kelembagaan dan pembiayaan. Hubungan antar aspek tersebut membentuk rantai sebab-akibat yang mengarah pada isu strategis utama, yaitu *"Pengembangan kawasan pariwisata Krakatau–Bakauheni yang terpadu, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana."*

Aspek spasial keruangan menjadi dasar pembentukan struktur dan pola ruang kawasan. Perkembangan pariwisata yang tidak terkendali menimbulkan tekanan pada penggunaan lahan, yang berimplikasi langsung pada aspek fisik lingkungan, seperti perubahan tutupan lahan, penurunan daya dukung, dan potensi degradasi kawasan pesisir. Ketidakseimbangan ini memperbesar risiko kebencanaan, karena perubahan penggunaan ruang tanpa mempertimbangkan karakter biofisik meningkatkan kerentanan terhadap erupsi, abrasi, dan tsunami.

Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan infrastruktur yang memadai dan merata untuk mendukung konektivitas kawasan. Namun, ketimpangan penyediaan infrastruktur dan utilitas menyebabkan aksesibilitas antar wilayah tidak seimbang, sehingga menghambat pemerataan manfaat ekonomi. Kesenjangan ini berpengaruh terhadap aspek sosial kependudukan dan sosial ekonomi, di mana pertumbuhan wisata memicu urbanisasi dan perubahan struktur sosial, sementara partisipasi masyarakat lokal masih terbatas.

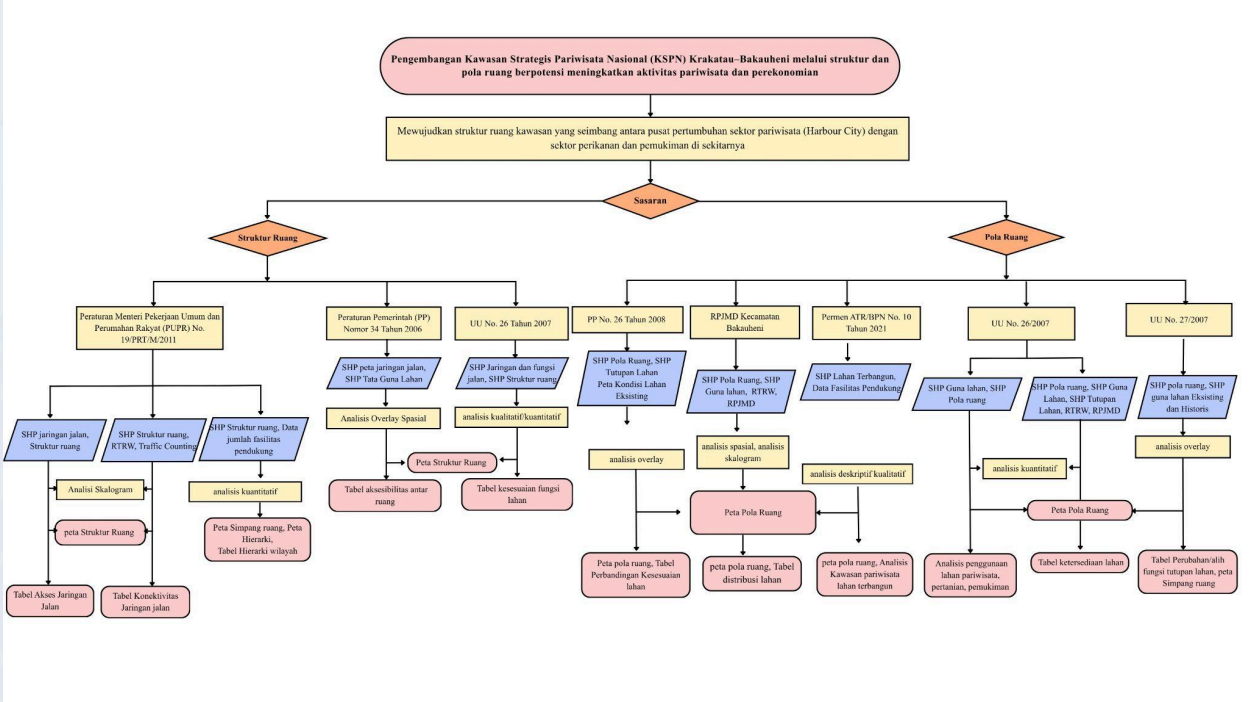
Selain itu, kelemahan dalam aspek kelembagaan dan pembiayaan menjadi faktor penguat keterkaitan antar aspek lainnya. Kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan pendanaan menyebabkan pengelolaan ruang, lingkungan, infrastruktur, dan sosial ekonomi tidak berjalan selaras.

Melalui pendekatan UGS (Urban Growth Strategy), keterkaitan tujuh aspek tersebut dianalisis secara integratif untuk merumuskan arah pertumbuhan kawasan yang efisien dan berkelanjutan. Teknik UGS menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ruang (spasial), ketahanan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, pemerataan infrastruktur, kesejahteraan sosial-ekonomi, serta tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, seluruh aspek pada diagram fishbone saling mendukung dalam menghasilkan satu kesimpulan strategis bahwa pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni harus dilakukan melalui strategi pertumbuhan terpadu yang memperhatikan dimensi ruang, lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara simultan dan berkelanjutan.

4.3.3 Flowchart

Flowchart merupakan bagan alur yang digunakan untuk menggambarkan proses berpikir atau tahapan analisis secara sistematis dan terstruktur.Prosesnya dimulai dari isu strategis sebagai permasalahan utama yang ingin diselesaikan, kemudian diturunkan menjadi tujuan yang ingin dicapai dan sasaran yang lebih spesifik. Untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator, yang kemudian menentukan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis. Data tersebut diolah melalui cara analisis tertentu untuk menghasilkan output

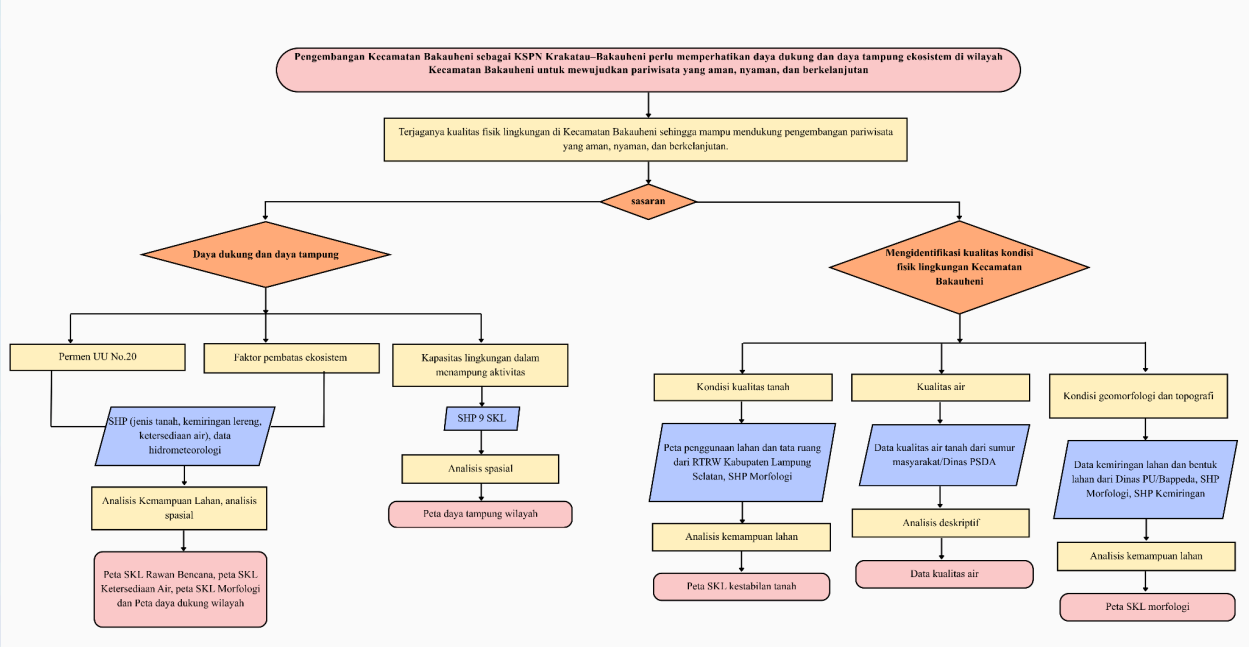
4.3.3.1 Aspek Spasial Keruangan



Isu strategis yang diidentifikasi adalah pengembangan KSPN Krakatau–Bakauheni melalui struktur dan pola ruang yang berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata dan perekonomian. Tujuannya yaitu mewujudkan struktur ruang kawasan yang seimbang antara pusat pertumbuhan sektor pariwisata (Harbour City) dengan sektor perikanan dan permukiman di sekitarnya. Sasaran diarahkan pada penataan struktur ruang dan pola ruang yang terintegrasi. Indikator yang digunakan meliputi tingkat aksesibilitas antar wilayah, kesesuaian fungsi jalan, distribusi lahan, serta perubahan fungsi ruang. Data yang diperlukan berupa peta jaringan jalan, peta struktur ruang, peta tata guna lahan, data RTRW, dan data fasilitas wilayah. Analisis

dilakukan secara kuantitatif, kualitatif, overlay spasial, dan skalogram untuk menilai keterhubungan wilayah dan keseimbangan fungsi ruang. Output yang dihasilkan berupa peta struktur ruang dan pola ruang Kecamatan Bakauheni disertai tabel analisis aksesibilitas dan kesesuaian fungsi ruang sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan KSPN secara terpadu dan berkelanjutan.

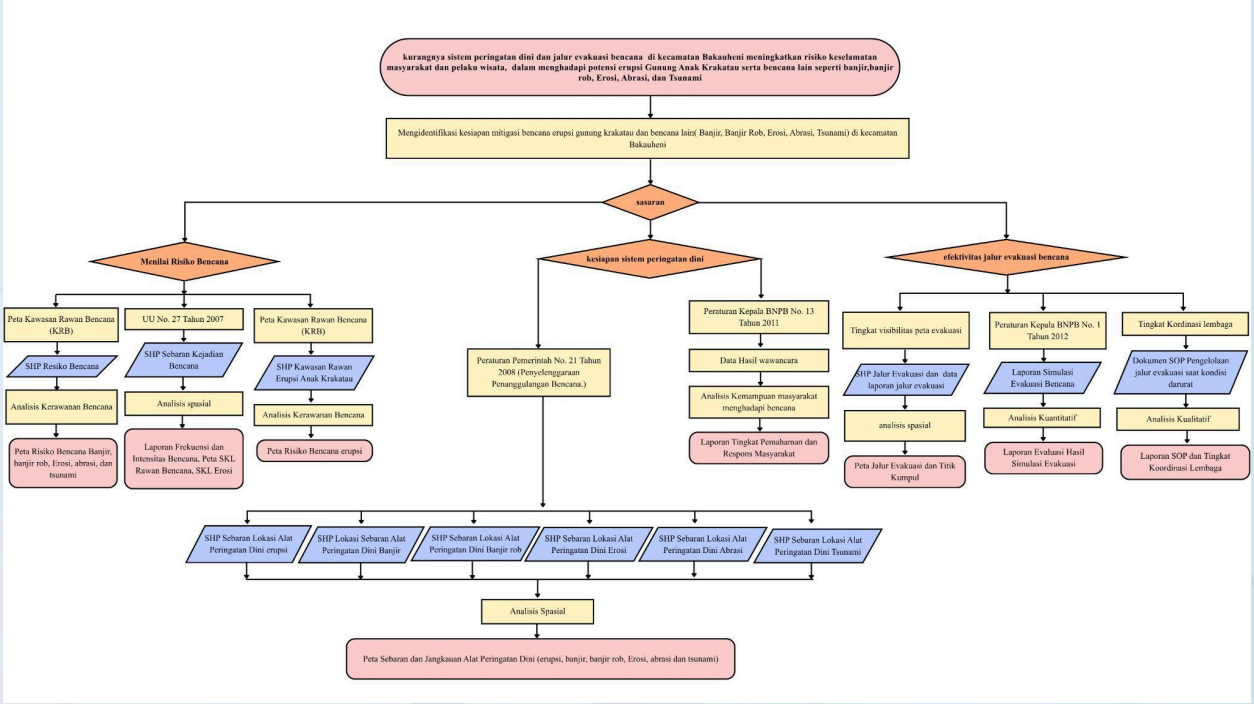
4.3.3.2 Aspek Fisik Lingkungan



Isu strategis yang diidentifikasi adalah Pengembangan Kecamatan Bakauheni sebagai KSPN Krakatau–Bakauheni perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung ekosistem di wilayah Kecamatan Bakauheni untuk mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Tujuannya yaitu menjaga kualitas tanah, air, serta kondisi lingkungan fisik agar mampu menopang aktivitas pariwisata dan permukiman. Sasaran diarahkan pada peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Indikator yang digunakan meliputi kapasitas lingkungan, kualitas tanah, kualitas air, serta kondisi geomorfologi dan topografi. Data yang diperlukan berupa SHP jenis tanah, kemiringan lereng, tutupan vegetasi, data hidrometeorologi, kualitas air dari Dinas PSDA, dan peta penggunaan lahan. Analisis dilakukan secara spasial, deskriptif, dan kemampuan lahan untuk menilai kesesuaian dan keterbatasan ekosistem terhadap aktivitas

manusia. Output yang dihasilkan berupa peta daya dukung dan daya tampung lingkungan, peta SKL (Studi Kemampuan Lahan) seperti kemiringan, ketersediaan air, morfologi, serta data kualitas tanah dan air sebagai dasar dalam perencanaan lingkungan kawasan KSPN Krakatau–Bakauheni.

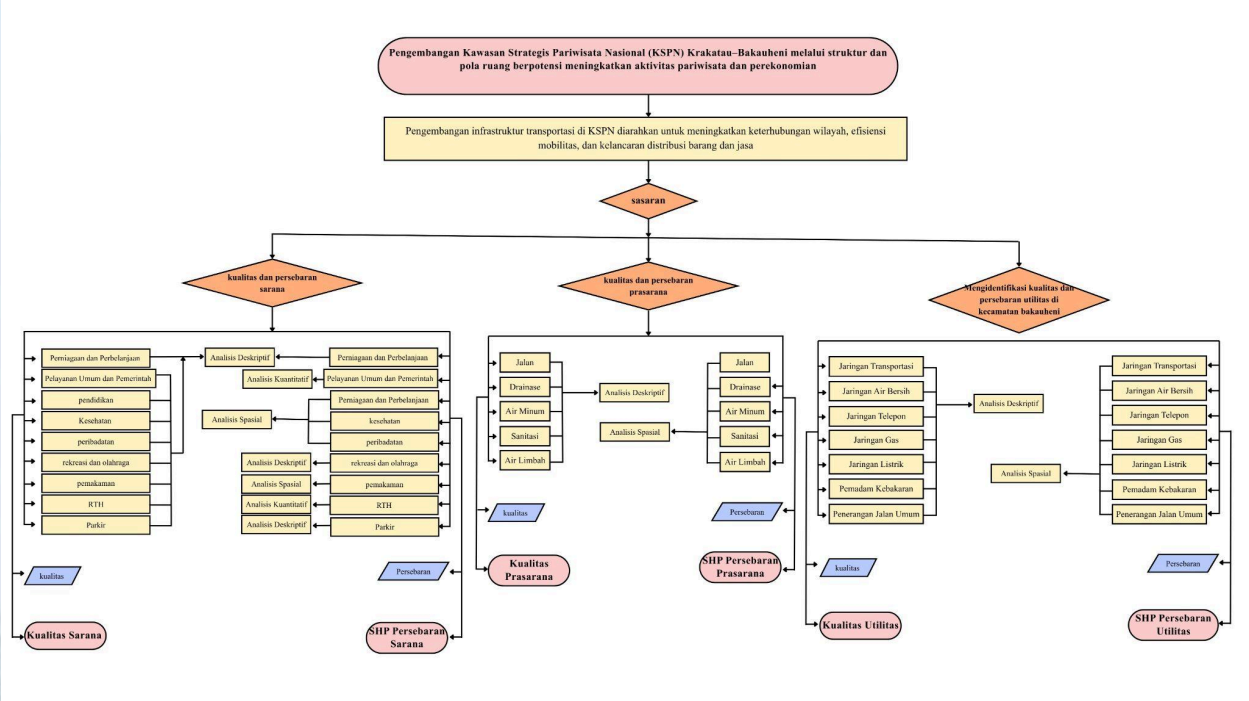
4.3.3.3 Aspek Kebencanaan



Isu strategis yang ditunjukkan dalam gambar adalah kurangnya sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana di kecamatan Bakauheni meningkatkan risiko keselamatan masyarakat dan pelaku wisata, dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau serta bencana lain seperti banjir,banjir rob, Erosi, Abrasi, dan Tsunami. Berdasarkan isu tersebut, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kesiapan mitigasi bencana Gunung Anak Krakatau serta bencana banjir, banjir rob, abrasi, erosi dan tsunami yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir Bakauheni. Dari tujuan ini, ditetapkan sasaran penelitian yang meliputi kesiapan sistem peringatan dini dan efektivitas jalur evakuasi sebagai komponen utama dalam pengurangan risiko bencana.

Untuk mencapai sasaran tersebut, digunakan beberapa indikator, yaitu tingkat kerawanan bencana, ketersediaan alat peringatan dini, visibilitas peta evakuasi, serta koordinasi antar lembaga terkait dalam kesiapsiagaan bencana. Data yang dibutuhkan meliputi peta risiko bencana, data SHP jalur evakuasi, laporan hasil simulasi bencana, serta hasil wawancara masyarakat dan lembaga terkait. Data tersebut kemudian dianalisis secara spasial,Analisis Kemampuan masyarakat menghadapi bencana, Analisis Kerawanan Bencana, Analisis Kualitatif dan kuantitatif guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesiapan mitigasi bencana di wilayah Bakauheni. Hasil dari analisis ini menghasilkan output berupa peta rawan bencana, peta jalur evakuasi, serta laporan evaluasi kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan sistem mitigasi bencana kedepannya.

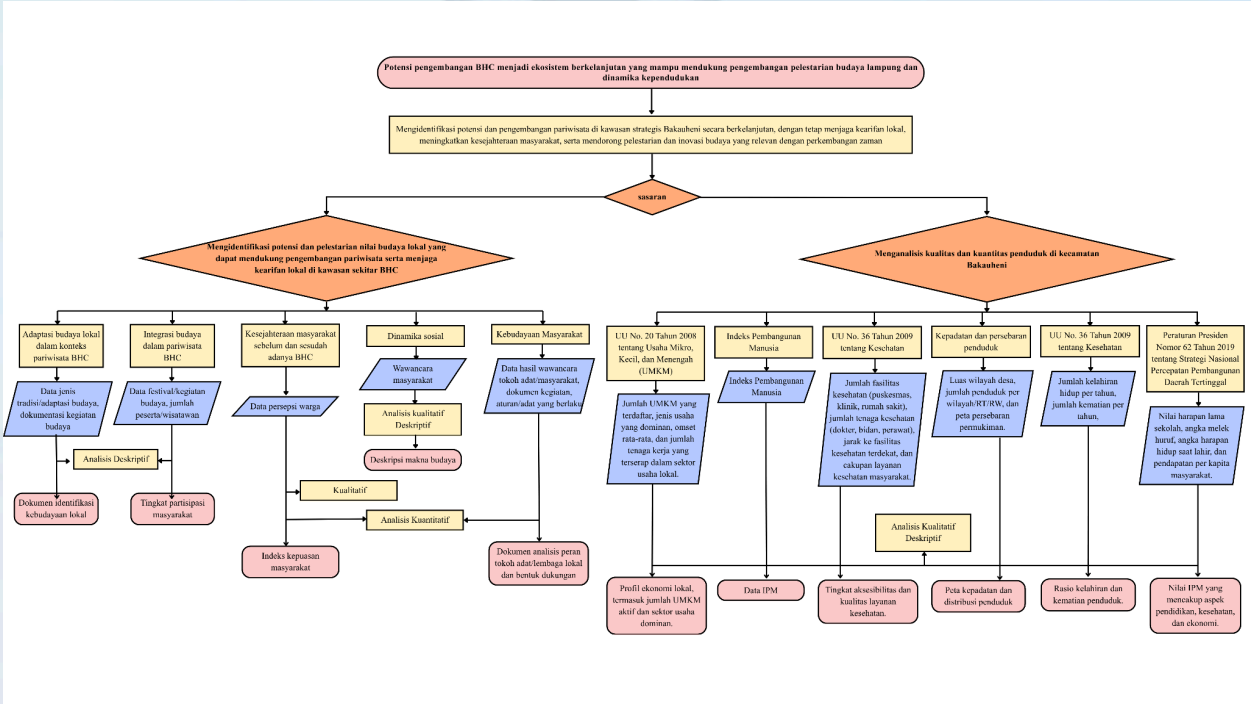
4.3.3.4 Aspek Infrastruktur



Isu strategis yang diidentifikasi adalah pengembangan infrastruktur transportasi di KSPN Krakatau–Bakauheni untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi mobilitas, dan distribusi barang/jasa. Tujuannya yaitu meningkatkan keterhubungan antar wilayah melalui pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas dasar. Sasaran diarahkan pada peningkatan kualitas dan persebaran infrastruktur wilayah. Indikator yang digunakan meliputi ketersediaan sarana (pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi) dan prasarana (jalan, drainase, air minum, sanitasi, air limbah)

serta jaringan utilitas (transportasi, air bersih, listrik, telepon, gas). Data yang diperlukan berupa SHP persebaran fasilitas, data teknis infrastruktur, dan data kualitas pelayanan. Analisis dilakukan secara deskriptif, kuantitatif, dan spasial. Output yang diperoleh berupa peta persebaran infrastruktur dan utilitas serta tabel kualitas dan ketersediaan sarana-prasarana di Bakauheni.

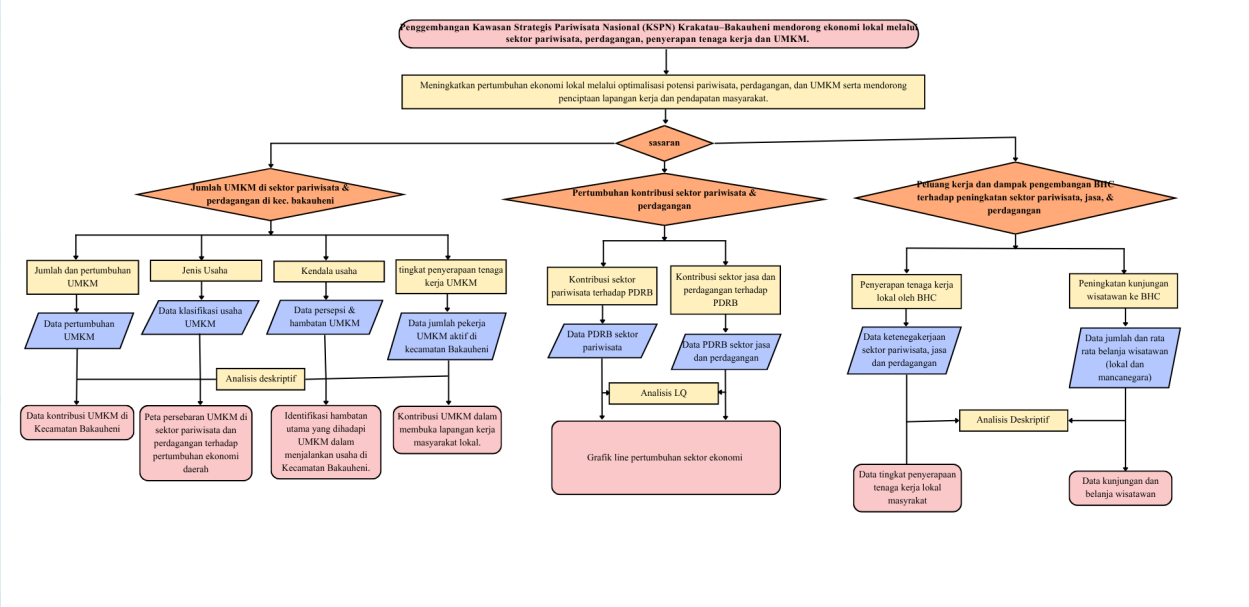
4.3.3.5 Aspek Sosial Kependudukan



Isu strategis yang diangkat adalah potensi pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC) sebagai ekosistem berkelanjutan yang mampu mendukung pelestarian budaya Lampung dan dinamika kependudukan. Tujuannya yaitu mengidentifikasi potensi sosial, budaya, dan demografi yang dapat memperkuat pengembangan kawasan pariwisata secara inklusif dan berkelanjutan. Sasaran diarahkan pada analisis struktur kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Indikator yang digunakan mencakup integrasi budaya dalam aktivitas pariwisata, adaptasi sosial masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan dan partisipasi penduduk lokal. Data yang diperlukan meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, kegiatan budaya, hasil wawancara tokoh adat, dan data UMKM berbasis budaya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif untuk menilai keterkaitan antara budaya lokal dan dinamika sosial dalam mendukung pembangunan BHC. Output yang dihasilkan

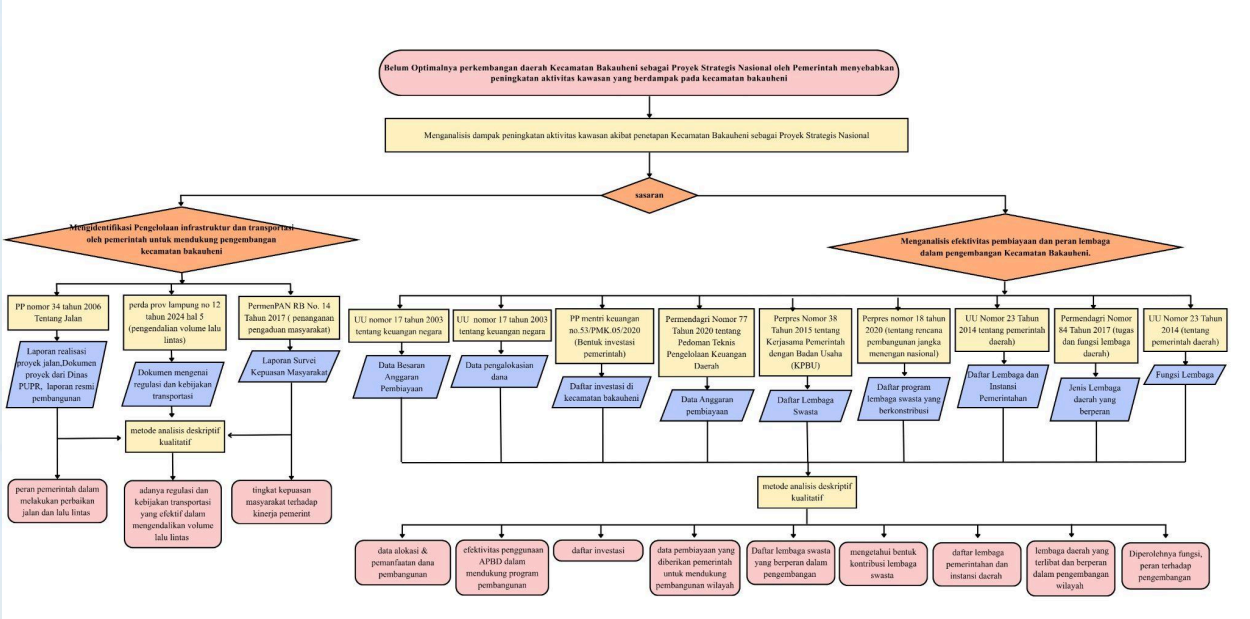
berupa profil sosial-budaya masyarakat, indeks kesejahteraan penduduk, serta dokumen potensi budaya lokal yang mendukung ekosistem pariwisata berkelanjutan.

4.3.3.6 Aspek Sosial Ekonomi



Isu strategis yang diangkat yaitu Penggembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Krakatau–Bakauheni mendorong ekonomi lokal melalui sektor pariwisata, perdagangan, penyerapan tenaga kerja dan UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi potensi sektor-sektor tersebut. Sasaran analisis diarahkan pada peningkatan jumlah UMKM, pertumbuhan kontribusi pariwisata dan perdagangan terhadap PDRB, serta peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi jumlah UMKM, jenis usaha, kontribusi terhadap PDRB, serta tingkat konsumsi rumah tangga. Data yang dibutuhkan mencakup data PDRB sektor pariwisata dan perdagangan, data tenaga kerja, serta data persepsi dan klasifikasi usaha UMKM. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan peran ekonomi lokal dan kontribusi UMKM. Output yang dihasilkan berupa data kontribusi UMKM terhadap PDRB, peta persebaran UMKM, dan grafik line tren pertumbuhan ekonomi lokal.

4.3.3.7 Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan



Isu strategis yang diidentifikasi adalah belum optimalnya perkembangan Kecamatan Bakauheni sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menyebabkan peningkatan aktivitas kawasan belum sejalan dengan kapasitas dan kesiapan wilayah. Tujuannya yaitu menganalisis dampak peningkatan aktivitas kawasan akibat penetapan Bakauheni sebagai PSN untuk menilai efektivitas pembangunan sesuai kebijakan nasional. Sasaran diarahkan pada pengelolaan infrastruktur dan transportasi oleh pemerintah serta efektivitas pembiayaan dan peran lembaga dalam pembangunan wilayah. Indikator yang digunakan meliputi tersedianya regulasi dan kebijakan transportasi, data anggaran dan investasi, serta peran lembaga dalam pengembangan kawasan. Data yang diperlukan berupa laporan proyek jalan, kebijakan transportasi, alokasi anggaran, investasi pemerintah dan swasta, serta daftar lembaga daerah terkait. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menilai efektivitas kebijakan, pembiayaan, dan koordinasi antar lembaga. Output yang dihasilkan berupa gambaran peran pemerintah, efektivitas pembiayaan, dan keterlibatan lembaga sebagai dasar perencanaan pembangunan Bakauheni yang lebih terarah dan berkelanjutan.

BAB V
RENCANA KEGIATAN

5.1 Rencana Kegiatan Studio

Rencana kegiatan studio ini berisikan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada Mata Kuliah Studio Proses Perencanaan dalam rangka mengidentifikasi Isu Masalah dan Potensi wilayah di Kecamatan Bakauheni yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dalam Proses Perencanaan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan Studio Proses Perencanaan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tabel timeline Studio

Timeline	**Minggu**															
Penentuan struktur organisasi kelas (ketua studio, sekretaris, bendahara, pj data, pj laporan, koordinator lapangan, dan pj aspek) dan pembagian kelompok aspek	1															
Pembuatan Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan, Strukturisasi temuan isu; perumusan shortlist isu dan penyampaian wilayah		2														
Finalisasi isu strategis;			3													

analisis isu menggunakan fishbone																
Pertanyaan, kerangka analisis, dan kebutuhan data per aspek				4												
Pertanyaan, kerangka analisis, dan kebutuhan data per aspek					5											
Rona awal oleh perwakilan kelas, Perangkat survey dan persiapan lapangan						6										
Penyampaian hasil rona awal, Perangkat survey dan persiapan lapangan							7									
UTS								8								
									9							
										10						
											11					

												12				
													13			
														14		
															15	
																16

5.2 Nama Instansi Kebutuhan Data Studio Proses Perencanaan

Rencana kegiatan survei merupakan penyusunan kegiatan yang sudah diatur agar proses pelaksanaan survei dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Kegiatan survei Studio Proses Perencanaan ini dilaksanakan pada minggu ke-9 perkuliahan yaitu pada tanggal Oktober 2025. Kegiatan survei yang dilakukan berupa pengambilan data secara primer ke masyarakat dan dinas terkait serta data sekunder yang bersumber dari instansi dan dinas-dinas terkait di Kecamatan Labuhan Maringgai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camer



5.4 Timeline Survey Studio

TEKNIS SURVEY STUDIO DASAR 2025

HARI	JAM	KEGIATAN	PJ/KOOR	KETERANGAN	LOKASI	PARTISIPAN
Minggu	07.00-07.30	Tikum	Korlap	Semua anggota survei berkumpul	ITERA	Semua anggota survei
	07.30-08.00	Briefing	Ketua	Semua anggota survei briefing	ITERA	Semua anggota survei
	08.00-08.30	Pembukaan	Ketua & dosen	Pembukaan	ITERA	Semua anggota survei
	08.30-08.45	Laporan dari dosen	Ketua & dosen	Laporan dari dosen	ITERA	Semua anggota survei
	08.45-09.00	Sambutan	Ketua & dosen	Sambutan dosen dan Semua anggota survei berkumpul	ITERA	Semua anggota survei
	09.00-09.20	Pelepasan	Dosen	Pelepasan dengan anggota survei dan dosen	ITERA	Semua anggota survei
	09.20-09.25	Doa	Korlap	Doa bersama	ITERA	Semua anggota survei
	09.25-09.30	Penutup	Ketua	Penutupan	ITERA	Semua anggota survei
	09.30-10.00	Foto bersama	Ketua	Foto bersama semua anggota survei	ITERA	Semua anggota survei

	10.00-13.00	Keberangkatan	Korlap	Keberangkatan ke wilayah survei masing - masing	ITERA	Semua anggota survei
	13.00-15.00	bersih-bersih kontrakan	korlap	semua anggota meletakkan bawaan dan mengatur keadaan kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	15.00-16.00	pengecekan kelengkapan	korlap & ketua	pengecekan kelengkapan alat dan dan barang bawaan untuk survey	Kontrakan	Semua anggota survei
	16.00-19.00	free	korlap	semua anggota melakukan kebutuhan pribadi	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-21.00	briefing	korlap & ketua	melakukan briefing sebelum pelaksanaan survey besok	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
Senin	04.30	Bangun pagi	Korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK dan persiapan survey	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei

	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	mahasiswa beristirhat siang	bebas	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap & ketua	mahasiswa pulang ke kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	semua anggota melakukan kebutuhan pribadi	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
selasa	04.30	Bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei

	08.00-12.00	survey dan FGD	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan dan perwakilan dari tiap kelas untuk FGD	lokasi survei dan lokasi FGD	Semua anggota survei dan Perwakilan tiap kelas untuk FGD
	12.00-13.00	break	korlap	Istirahat siang	Bebas	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap	semua anggota pulang ke kontrakan	lokasi survei	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	bebas	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
rabu	04.30	Bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei

	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	waktu bebas	bebas	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	Korlap	semua anggota pulang ke kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
kamis	04.30	bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei

	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	waktu bebas	menyesuaikan	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap	semua anggota pulang ke kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
jumat	04.30	bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei

	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	waktu bebas	menyesuaikan	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap	mahasiswa pulang menuju kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
sabtu	04.30	Bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei

	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-09.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	09.00-10.00	persiapan pulang	korlap	semua anggota melakukan kebutuhan pribadi	Kontrakan	Semua anggota survei
	10.00	kepulangan	korlap	waktu bebas	menyesuaikan	Semua anggota survei

5.4 Struktur Organisasi Studio RA

`Pelindung	: Roy Candra P Sigalingging, S.T., M.Sc., Ph.D	
Penanggung Jawab	: Dr. nat. techn. Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T.	
Pembimbing	: Dr. Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T.	
	Hediyati Anisia Br Sinamo, S.P.W.K., M.P.W.K.	
Asisten Studio	: M. Raihan Setiawan	(123220043)
	Yusriyyah Meilisa Labiibah	(12322047)
Ketua kelas RA	: Royhan Hutriansyah	(124220064)
Sekretaris	: Devin Ibnu Zane	(124220108)
Bendahara	: Daniswara Angelia Pulalo	(124220001)
PJ Data Primer	: Septia Nurlaili	(124220003)
PJ Data Sekunder	: Galuh Kusuma Ningrum	(124220111)
PJ Peta	: Haris Wicaksono	(124220109)
PJ Power Point	: Khoerun Nissa Febrian	(124220031)
PJ Laporan	: Erlita Lisdayanti Pane	(124220069)
Koordinator Lapangan	: M.Arya Yusfa Wijaya	(124220004)
PJ Isu Aspek Fisik Lingkungan	: Fakhri Zaidan Nabil	(124220177)
Anggota	: Septia Nurlaili	(124220003)

	Siti Nabila	(124220106)
PJ Isu Aspek Spasial & Keruangan	: Akmal Kevin Harahap	(124220144)
Anggota	: Royhan Hutriansyah	(124220064)
PJ Isu Aspek Infrastruktur	: Galuh Kusuma Ningrum	(124220111)
Anggota	: Haris Wicaksono	(124220109)
	M.Arya Yusfa Wijaya	(124220004)
PJ Aspek Sosial Ekonomi	: Daniswara Angelia Pulalo	(124220001)
Anggota	: Khoerunnissa Febrian	(124220031)
PJ Isu Aspek Sosial Kependudukan	: Adinda Rahmadani Putri	(124220030)
Anggota	: Ghina Ridha Nabila	(124220066)
PJ Isu Aspek Kelembagaan & Pembiayaan	: Adellia Putri Indini	(124220164)
Anggota	: Devin Ibnu Zane	(124220108)
PJ Isu Aspek Kebencanaan	: Muhammad Nurfajri	(124220067)
Anggota	: Erlita Lisdayanti Pane	(124220069)

5.5 Rencana Anggaran

NO	Nama Barang	Quantity		Keterangan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
		Jumlah	Satuan			
1.	Id Card	16	Buah	Atribut Kelas	15.000	Rp. 240.000
2.	Banner	1	Buah	Biaya dibagi untuk 2 kelas	Rp. 108.000	Rp. 54.000
3.	ATK	1	Paket	Hvs, map, pena, dll.	Rp. 100.000	Rp. 100.000
4.	Obat P3K	1	Set	Obat-obatan	Rp. 40.000	Rp. 40.000
5.	Bensin (kendaraan)	5	Motor	Pertalite/ 7 hari	Rp. 100.000	Rp. 500.000
6.	Konsumsi Mahasiswa	16	Orang	2 kali sehari (dihitung selama 6 hari)	Rp. 30.000	Rp. 2.880.000
7.	Konsumsi Dosen	2	Orang	Perkunjungan	Rp. 20.000	Rp. 40.000
8.	Konsumsi Asdos	2	Orang	Perkunjungan	Rp. 20.000	Rp. 40.000
9.	Air Galon	2	Buah	Isi ulang	Rp. 8.000	Rp. 16.000
10.	Kontrakan	1	Unit	Biaya dibagi untuk 2 kelas	Rp. 2.100.000	Rp. 1.050.000
11.	Listrik	7	Hari	Token	RP. 200. 000	Rp. 200.000
BTT (10%)						Rp. 496.000
Total						Rp. 5.160.000
Total Akhir						**Rp. 5.656.000**

DAFTAR PUSTAKA

Adib, F., & et al. . (2024). Analisis Penguatan Ekonomi Lokal di Wilayah Pesisir Lampung Selatan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 12(1), 45–56.

Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266–287.

BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2024).

Fardani, L., Delis, P. C., P., & Caesario, R. (2021). Upaya Peningkatan Kualitas Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut Desa Way Lubuk Kecamatan Kalianda Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2(1).

Lahay, A. (2023). Upaya Peningkatan Kualitas Ekosistem Wilayah Pesisir Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian FP Unila*, 4(2), 123–132.

Manik, T., & Timotiwu, P. (2023). Sosialisasi Dampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat Pesisir: Desa Kelawi dan Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(2).

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.* Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional.* Jakarta: Jakarta: Sekretariat Negara.

Reza, M. (2022). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Kiluan Lampung. *Grouper: Jurnal Riset*, 14(1).

Reza, M. (2023). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Kiluan Lampung. *Jurnal Grouper*, 5(1), 10–20.

Widiyanto, H. (2022). *Assessment of the 2018 Anak Krakatau Tsunami and Its Impacts in Southern Lampung.* Natural Hazards and Earth System Sciences.

LAMPIRAN

Perangkat Survey

Perangkat survei adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden dalam suatu penelitian atau kegiatan survei.

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam dan jelas mengenai suatu topik penelitian.

IDENTITAS SURVEYOR		**IDENTITAS RESPONDEN**	
Nama		**Nama**	
NIM		**Usia**	
Hari/Tanggal		**Pekerjaan**	

Tabel tersebut digunakan sebagai lembar identitas dalam kegiatan survei yang berfungsi untuk mencatat data diri surveyor dan responden.

Masyarakat

Aspek Fisik Lingkungan

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT KECAMATAN BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat pesisir Kecamatan Bakauheni:

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi kualitas air, tanah, atau udara di Bakauheni sekarang? Apakah ada perubahan beberapa tahun terakhir?
2. Apakah ruang terbuka hijau seperti taman, hutan mangrove, atau lahan hijau di Bakauheni dirasa
   sudah cukup dan mudah diakses masyarakat?
3. Aktivitas seperti pariwisata, pelabuhan, atau pemukiman di Bakauheni menurut Bapak/Ibu memberi dampak apa terhadap lingkungan sekitar

Aspek Kebencanaan

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada Masyarakat :

1. Jika Bapak/Ibu mendengar bunyi sirene panjang yang nyaring selama sekitar satu menit tanpa jeda, atau menerima pesan peringatan bencana melalui SMS, pengeras suara, atau media sosial, apakah Bapak/Ibu memahami maksud dari peringatan tersebut dan tahu apa tindakan yang harus segera dilakukan?
2. Saat menerima peringatan bencana, baik melalui bunyi sirine atau pesan tertulis, apakah Bapak/Ibu merasa informasi tersebut cukup jelas untuk dipahami dan langsung ditindaklanjuti? Apa yang biasanya Bapak/Ibu lakukan pertama kali?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan makna bunyi sirene yang berbeda – seperti bunyi panjang terus-menerus untuk evakuasi atau bunyi pendek-pendek sebagai tanda siaga – dan bagaimana seharusnya Bapak/Ibu merespons masing-masing jenis bunyi tersebut?
4. Dalam situasi darurat bencana, apakah Bapak/Ibu memiliki pengetahuan dan kesiapan tentang rute evakuasi, titik kumpul aman, dan perlengkapan yang harus dibawa setelah menerima peringatan bencana dari sirine atau media lainnya?
5. Pernahkah Bapak/Ibu mengalami situasi di mana sirene peringatan atau pesan bencana disampaikan, dan bagaimana Bapak/Ibu serta keluarga merespons saat itu? Apakah ada kendala dalam memahami atau melaksanakan tindakan evakuasi?
6. Seberapa yakin Bapak/Ibu bahwa peringatan yang diberikan melalui sirine, pesan singkat, atau pengeras suara akan mendorong masyarakat sekitar untuk segera bertindak dan menyelamatkan diri? Apa yang bisa ditingkatkan menurut Bapak/Ibu?
7. Menurut pengalaman atau pengetahuan Bapak/Ibu, apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggal sudah cukup teredukasi untuk memahami dan merespons peringatan bencana dengan cepat dan tepat?

Aspek Infrastruktur

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar:

1. Bagaimana kualitas bangunan serta kebersihan dan kerapian tempat perbelanjaan di daerah ini?
2. Bagaimana kondisi dan perawatan gedung pelayanan umum seperti kantor pemerintah, sekolah, puskesmas, serta rumah ibadah, apakah masih layak digunakan masyarakat?
3. Bagaimana kualitas fasilitas umum seperti taman, lapangan, tempat olahraga, serta area pemakaman, terutama dari segi kebersihan, kerapian, dan kelengkapan sarana yang ada?
4. Bagaimana kualitas infrastruktur lingkungan seperti jalan, saluran drainase, dan saluran pembuangan air limbah, apakah berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan?
5. Bagaimana kualitas sarana sanitasi dan air bersih, seperti toilet umum, MCK, serta penyediaan air minum, apakah masih layak dan terpelihara dengan baik?
6. Bagaimana kualitas fasilitas pendukung transportasi seperti lahan parkir, halte, atau terminal, apakah tertata dan terawat dengan baik?
7. Bagaimana kualitas jaringan utilitas seperti listrik, air bersih, telepon, gas, serta sarana pemadam kebakaran dan lampu penerangan jalan, apakah berfungsi dengan baik dan aman digunakan masyarakat?

Aspek Sosial Kependudukan

FORM WAWANCARA KEPADA WAWANCARA MASYARAKAT BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat bakauheni :

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyesuaian tradisi atau adat dalam kegiatan pariwisata?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan budaya tersebut mampu menarik perhatian pengunjung atau wisatawan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan pariwisata ini memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan atau kesempatan kerja?
4. Sejak adanya kegiatan pariwisata budaya, apakah terjadi perubahan dalam interaksi sosial antarwarga?
5. Menurut Bapak/Ibu, usaha apa yang paling banyak dijalankan orang di sekitar sini?
6. Apakah fasilitas kesehatan itu cukup dekat dan mudah dijangkau?
7. Bagaimana kondisi pemukiman di sini, apakah sudah tertata rapi atau masih tersebar?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah angka kelahiran di desa ini cukup tinggi atau biasa saja?
9. Bagaimana pendapatan rata-rata masyarakat menurut Bapak/Ibu, apakah sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari?
10. Berapa lama Bapak/Ibu pernah menempuh pendidikan formal dan Apakah anak-anak di rumah saat ini bersekolah? Jika tidak, apa alasannya?

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

Pertanyaan yang ditujukan kepada Masyarakat:

1. Menurut bapak/ibu, apakah sebelumnya di daerah Bakauheni Harbour City ini pernah mengalami kemacetan/keterbatasan transportasi? bagaimana pemerintah kecamatan bakauheni melakukan tanggapan terhadap keluhan masyarakat soal kemacetan/keterbatasan transportasi? Dan bagaimana cara pemerintah kecamatan bakauheni menindaklanjuti permasalahan kemacetan/keterbatasan transportasi tersebut?
2. Jika pemerintah kecamatan bakauheni tidak menanggapi/terlalu lambat dalam merespon keluhan masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah kecamatan bakauheni agar lebih cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi kemacetan dan keterbatasan transportasi?
3. Menurut Bapak/Ibu, jika adanya sebuah pembangunan di kawasan kecamatan bakauheni, apakah pembangunan yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan dirasakan manfaatnya di wilayah ini?

Wisatawan

Aspek Kebencanaan

FORM WAWANCARA KEPADA WISATAWAN DI KECAMATAN BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada Wisatawan :

1. Jika saat berwisata Bapak/Ibu mendengar bunyi sirene panjang yang nyaring atau menerima peringatan bencana melalui SMS, pengeras suara, atau dari petugas, apakah Bapak/Ibu memahami maksud dari peringatan tersebut dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya?
2. Apakah sebelum atau saat berkunjung ke tempat wisata ini, Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang potensi bencana (seperti tsunami, erupsi gunung, banjir, dll) dan langkah evakuasi jika terjadi keadaan darurat?
3. Bagaimana Bapak/Ibu akan merespons jika tiba-tiba ada sirine atau pengumuman evakuasi di lokasi wisata? Apakah Bapak/Ibu tahu ke mana harus pergi untuk mencari tempat aman atau titik kumpul?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu, informasi peringatan bencana di tempat wisata seperti papan petunjuk, jalur evakuasi, atau instruksi dari petugas cukup jelas dan mudah dipahami oleh wisatawan?
5. Jika peringatan disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal, apakah Bapak/Ibu dapat memahaminya dengan baik? Perlukah menurut Bapak/Ibu adanya peringatan dalam bahasa asing seperti Inggris untuk wisatawan?
6. Pernahkah Bapak/Ibu mengalami kejadian bencana atau peringatan darurat saat sedang berwisata? Bagaimana pengalaman tersebut dan tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan saat itu?
7. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu agar wisatawan dapat lebih siap dan cepat tanggap saat terjadi bencana di lokasi wisata?

Tokoh Adat

Aspek Sosial Kependudukan

FORM WAWANCARA KEPADA WAWANCARA TOKOH ADAT

Pertanyaan yang ditujukan kepada Tokoh Adat :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran tokoh adat, pemerintah desa, dan lembaga lokal dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan masyarakat agar tetap diwariskan ke generasi muda?
2. Bagaimana keterlibatan tokoh adat atau lembaga adat dalam kegiatan budaya di BHC?
3. Sejauh mana Bapak/Ibu dan lembaga adat terlibat dalam kegiatan budaya di sini?
4. Berapa banyak program atau kegiatan pelestarian budaya yang saat ini dijalankan?

Balai Desa

Aspek Sosial Kependudukan dan Kebudayaan

FORM WAWANCARA KEPADA BALAI DESA

Pertanyaan yang ditujukan kepada aparat desa/kelurahan :

1. Bagaimana pemerintah desa/kelurahan melihat peran BHC dalam mendorong inovasi atau adaptasi budaya lokal agar tetap relevan dengan perkembangan zaman?
2. Sejauh mana desa/kelurahan berperan dalam mendukung integrasi budaya lokal ke dalam pariwisata BHC?
3. Menurut pandangan pemerintah desa/kelurahan, apakah keberadaan BHC berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Jika iya, dalam aspek apa saja?
4. Bagaimana desa/kelurahan melihat perubahan interaksi sosial masyarakat sejak adanya BHC?
5. Bagaimana peran pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung tokoh adat dan lembaga lokal untuk melestarikan budaya masyarakat?
6. Apa saja sumber mata pencaharian utama masyarakat di desa/kelurahan ini?
7. Bagaimana tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat di desa/kelurahan ini?
8. Apakah masyarakat memiliki akses yang mudah ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit)?
9. Bagaimana kepadatan penduduk di desa/kelurahan ini?
10. Berapa jumlah kelahiran hidup dan kematian penduduk dalam satu tahun terakhir?
11. Bagaimana kualitas hidup masyarakat dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi?

UMKM

Aspek Sosial Ekonomi

FORM WAWANCARA KEPADA WAWANCARA UMKM

Pertanyaan yang ditujukan kepada UMKM di Kecamatan Bakauheni :

1. Jenis usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan? Mengapa memilih usaha tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, usaha apa yang paling banyak/dominan di daerah ini?
3. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini, apakah terkait dengan modal, pemasaran, tenaga kerja, atau fasilitas, Berikan alasannya?
4. Apakah usaha Bapak/Ibu mempekerjakan warga sekitar? Jika ya, berapa orang yang Bapak\ibu kerjakan ?
5. Sejauh mana jangkauan pemasaran atau distribusi produk/jasa dari usaha Bapak/Ibu?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dirasakan terhadap perkembangan usaha setelah adanya pengembangan KSPN - Bakauheni Harbour City (BHC)? Apakah usaha Bapak/Ibu lebih maju atau ada perubahan tertentu? (Khusus UMKM di sekitar Bakauheni Harbour City/Desa Bakauheni)

Dinas Perhubungan

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA DINAS PERHUBUNGAN

Pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan

1. Apakah Dinas Perhubungan Kecamatan Bakauheni memiliki aturan atau kebijakan transportasi untuk mendukung pengembangan Bakauheni Harbour City?
2. Sejauh mana aturan dan kebijakan tersebut berjalan efektif dalam mengurangi kemacetan di sekitar Bakauheni Harbour City?

Dinas PUPR

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA DINAS PUPR

Pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas PUPR:

1. Apakah sebelumnya Dinas PUPR kecamatan bakauheni pernah melaksanakan program pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan dan mengatur lalu lintas di Bakauheni Harbour City?
2. Jika YA, Apakah penanganan untuk pelebaran jalan dan mengatur lalu lintas sudah berjalan dengan baik?
3. Apakah pihak Dinas PUPR kecamatan bakauheni sudah melakukan evaluasi mengenai dampak pelebaran jalan terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan Bakauheni Harbour City?

BPKADA

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA BPKAD

Pertanyaan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) :

1. Apakah alokasi APBD untuk Kecamatan Bakauheni sudah disesuaikan dengan rencana pengembangan yang ditetapkan pemerintah daerah?
2. Bagaimana BPKAD memastikan penggunaan anggaran tersebut berjalan efektif dan benar-benar mendukung prioritas pembangunan di Kecamatan Bakauheni?
3. Apa saja sumber dana yang dialokasikan pemerintah untuk wilayah deliniasi Kecamatan Bakauheni?
4. Berapa besar anggaran yang dialokasikan dan bagaimana mekanisme pembagiannya agar sesuai dengan APBD dan tepat sasaran?
5. Apakah pihak BPKAD mengetahui berapa jumlah investasi yang ada di kecamatan bakauheni?

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kondisi, atau situasi tertentu di lapangan untuk mendapatkan informasi faktual tanpa harus melalui pernyataan responden.

IDENTITAS SURVEYOR		IDENTITAS RESPONDEN	
Nama		**Nama**	
NIM		**Usia**	
Hari/Tanggal		**Pekerjaan**	

Tabel tersebut digunakan sebagai lembar identitas dalam kegiatan survei yang berfungsi untuk mencatat data diri surveyor dan responden.

Spasial Keruangan

Observasi Konektivitas Jaringan Jalan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui konektivitas jaringan jalan di kecamatan bakauheni dari Bakauheni Harbour City (BHC) dengan desa Hatta dan desa Kelawi

Keterangan :

- Keterhubungan antar ruas jalan
- Integrasi dengan moda transportasi lain

No	Jenis (Keterhubungan antar ruas jalan,Integrasi dengan moda transportasi lain	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.				
2.				
3.				
4.				

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Aksesibilitas Jalan Desa Hatta, Desa Kelawi Menuju Desa Bakauheni

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi dan kondisi aksesibilitas jalan dari Desa Hatta, Desa Kelawi menuju Desa Bakauheni

Keterangan:

- kondisi jalan
- Lebar jalan
- Kelancaran arus kendaraan

No.	(Jenis: kondisi jalan, Lebar jalan dan kelancaran arus kendaraan)	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.				
2.				

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Aksesibilitas Antar Ruang

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi serta menilai kondisi aksesibilitas antar ruang Desa Kelawi, Desa Hatta dengan Bakauheni Harbour City

Keterangan: Ketersediaan akses dari pelabuhan ke pusat ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

No.	Lokasi	Jenis (Pusat Ekonomi, Pendidikan, Pendidikan, Pelayanan Publik)	Keterangan	Gambar
1.				
2.				

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera

Observasi Kesesuaian Fungsi Struktur Jalan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi dan kondisi kesesuain fungsi struktur jalan Desa Hatta, Desa Kelawi dengan Bakauheni Harbour City (BHC)

Keterangan:

-Jalan Arteri

-Jalan Kolektor

-Lokal

No.	Lokasi	Jenis Jalan (Arteri, Kolektor, Lokal)	Kesesuaian Fungsi Jalan	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.						
2.						

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi alih fungsi lahan di Kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Hierarki Wilayah Di Daerah Kecamatan Bakauheni

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk menganalisis struktur hierarki wilayah desa-desa di wilayah kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.			
2.		:	

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Kesesuaian Lahan di Kecamatan Bakauheni

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk menganalisis SHP lahan eksisting dengan kesesuaian fungsi lahan yang ada di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Kondisi Lahan Eksisting	Rencana Pola Ruang	Keterangan Kesesuain lahan	Gambar
1.					
2.					

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera

Fisik Lingkungan

Kualitas, Ketersediaan, kekeruhan,, salinitas, dan dalam air

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas, ketersediaan, kekeruhan, salinitas dan kandungan logam berat dalam air.

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.		Bau: Kekeruhan: Rasa: pH: Ketersediaan: Sumber:	
2.		Bau: Kekeruhan: Rasa: pH: Ketersediaan: Sumber:	

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Tanah, Kedalaman Daya Serap Tanah Dan Jenis Tanah

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk **mengetahui kualitas tanah, ketersediaan vegetasi alami dan kedalaman dan daya serap tanah**

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.		Warna tanah (gelap, kemerahan, pucat): Tekstur (lempung, pasir, liat, berdebu): Kondisi fisik (gembur, padat, lembab, kering): Kandungan bahan organik (subur/tandus):	
		Warna tanah (gelap, kemerahan, pucat): Tekstur (lempung, pasir, liat, berdebu): Kondisi fisik (gembur, padat, lembab, kering): Kandungan bahan organik (subur/tandus):	

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kemiringan Lahan, Bentuk Lahan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk **mengetahui lokasi kemiringan lahan, bentuk lahan, dan ketinggian lahan**

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.		Bentuk lahan (dataran rendah, perbukitan, lereng, atau lembah): Kemiring (datar, miring, atau curam): Ketinggian (mdpl): Kegunaan lahan:	

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kebencanaan

Koordinat Lokasi, Radius Jangkauan Serta Status Operasional Alat Peringatan Dini Bencana Banjir, Banjir Rob, Abrasi, Erosi

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi dan status operasional alat peringatan dini.

Catatan :

· Saat mengambil gambar/foto, wajib menghidupkan GPS/Lokasi

No.	Jenis alat pendeteksi bencana (Banjir, banjir rob, abrasi,erosi)	Lokasi	Gambar	Status Operasional	Keterangan
				aktif /Tidak aktif	
1.					Status operasional alat peringatan dini Banjir
2.					Status operasional alat peringatan dini Banjir Bob

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Keterangan :

Jenis Jenis Alat / Sistem EWS :

- Sensor level air
- Sirine
- Seismograf dan gravimeter
- Early Warning System
- Sensor curah hujan otomatis
- Sensor Gelombang
- Sensor Abrasi
- Sistem IoT
- Sistem Kamera

- Radar Pantai

Jalur Evakuasi Dan Bencana Banjir, Banjir Rob, Abrasi, Erosi

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan **untuk mengetahui Titik kumpul Evakuasi Bencana di Kecamatan Bakauheni**

Catatan :

· Saat mengambil gambar/foto, wajib menghidupkan GPS/Lokasi

No.	Lokasi titik kumpul bencana (banjir,banjir rob,abrasi,erosi,tsunami, letusan gunung berapi)	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Keterangan:

- Kondisi tempat titik kumpul (layak/tidak layak

Infrastruktur

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintah

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kualitas pusat perbelanjaan di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Pusat Perbelanjaan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kualitas pusat perbelanjaan di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Pendidikan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana pendidikan di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Kesehatan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana kesehatan di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Peribadatan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana peribadatan di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Rekreasi Dan Olahraga

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana rekreasi dan olahraga di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Pemakaman

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana pemakaman di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Ruang Terbuka Hijau

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana ruang terbuka hijau di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Sarana Parkir

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sarana parkir di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Prasarana Jaringan Jalan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari prasarana jaringan jalan di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Prasarana Ketersediaan Drainase

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas prasarana ketersediaan drainase di kecamatan Bakauheni.

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Air Minum

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas prasarana jaringan air minum di kecamatan Bakauheni.

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Sanitasi

bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air bersih di kecamatan Bakauheni.

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Telepon

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas utilitas jaringan telepon di kecamatan Bakauheni.

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Gas

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas utilitas jaringan gas di kecamatan Bakauheuni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Listrik

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas utilitas jaringan listrik di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Pusat Pemadam Kebakaran

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas utilitas pusat pemadam kebakaran di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Kualitas Dan Kuantitas Penerangan Jalan Umum

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas utilitas penerangan jalan umum di kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Sosial Kependudukan

Fasilitas Umum (Balai Desa, Sanggar Budaya, Area Publik)

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bakauheni.

Catatan :

· Saat mengambil gambar/foto, wajib menghidupkan GPS/Lokasi

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			Status operasional fasilitas umum Balai Desa
2.			Status operasional fasilitas umum Sanggar Budaya
3.			Status operasional fasilitas umum Area Publik

4.			Kondisi fisik dan sarana pendukung fasilitas umum

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Keterangan :

1. Status operasional fasilitas umum (Balai Desa, Sanggar Budaya, Area Publik)
2. Kondisi fisik dan sarana pendukung fasilitas umum
3. Tingkat pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat sekitar

Kegiatan Budaya Lokal (Festival, Ritual Adat, Pertunjukan Seni)

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan budaya lokal di kawasan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni. Data yang diamati meliputi bentuk festival, ritual adat, maupun pertunjukan seni yang masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya dan daya tarik pariwisata.

Catatan :

· Saat mengambil gambar/foto, wajib menghidupkan GPS/Lokasi

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			Aktivitas sosial masyarakat di sekitar area permukiman
2.			Kondisi kepadatan dan sebaran penduduk di wilayah Bakauheni
3.			Kegiatan masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah

4.			Kondisi pendidikan penduduk di kawasan Bakauheni

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Keterangan :

1. Kondisi kepadatan dan sebaran penduduk di wilayah Bakauheni
2. Karakteristik sosial masyarakat dan pola interaksi antarwarga
3. Tingkat pendidikan dan partisipasi penduduk dalam kegiatan sosial

Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata Bhc

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata di kawasan Bakauheni, khususnya terkait Bakauheni Harbour City (BHC). Data yang dikumpulkan meliputi peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun pelayanan terhadap wisatawan.

Catatan :

· Saat mengambil gambar/foto, wajib menghidupkan GPS/Lokasi

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			Keterlibatan warga dalam usaha ekonomi berbasis wisata
2.			Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan area wisata
3.			Aktivitas masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata di kawasan BHC
4.			Dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Keterangan:

1. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata di kawasan BHC
2. Peran masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis wisata
3. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal di sekitar BHC
4. Dampak keterlibatan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan

Sosial Ekonomi

Jenis Usaha Umkm Lokal

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui jenis usaha UMKM lokal

No.	Lokasi	Gambar	Keterangan
1.			1. Jenis Usaha: 2. Kondisi fisik usaha: 3. Aktivitas Usaha:
2.			1. Jenis Usaha: 2. Kondisi fisik usaha: 3. Aktivitas Usaha:

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camer



Timeline Survey Studio

TEKNIS SURVEI STUDIO DASAR 2025

HARI	JAM	KEGIATAN	PJ/KOOR	KETERANGAN	LOKASI	PARTISIPAN
Minggu	07.00-07.30	Tikum	Korlap	Semua anggota survei berkumpul	ITERA	Semua anggota survei
	07.30-08.00	Briefing	Ketua	Semua anggota survei briefing	ITERA	Semua anggota survei
	08.00-08.30	Pembukaan	Ketua & dosen	Pembukaan	ITERA	Semua anggota survei
	08.30-08.45	Laporan dari dosen	Ketua & dosen	Laporan dari dosen	ITERA	Semua anggota survei
	08.45-09.00	Sambutan	Ketua & dosen	Sambutan dosen dan Semua anggota survei berkumpul	ITERA	Semua anggota survei
	09.00-09.20	Pelepasan	Dosen	Pelepasan dengan anggota survei dan dosen	ITERA	Semua anggota survei
	09.20-09.25	Doa	Korlap	Doa bersama	ITERA	Semua anggota survei

	09.25-09.30	Penutup	Ketua	Penutupan	ITERA	Semua anggota survei
	09.30-10.00	Foto bersama	Ketua	Foto bersama semua anggota survei	ITERA	Semua anggota survei
	10.00-13.00	Keberangkatan	Korlap	Keberangkatan ke wilayah survei masing - masing	ITERA	Semua anggota survei
	13.00-15.00	bersih-bersih kontrakan	korlap	semua anggota meletakkan bawaan dan mengatur keadaan kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	15.00-16.00	pengecekan kelengkapan	korlap & ketua	pengecekan kelengkapan alat dan dan barang bawaan untuk survey	Kontrakan	Semua anggota survei
	16.00-19.00	free	korlap	semua anggota melakukan kebutuhan pribadi	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-21.00	briefing	korlap & ketua	melakukan briefing sebelum pelaksanaan survey besok	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei

Senin	04.30	Bangun pagi	Korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK dan persiapan survey	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	mahasiswa beristirhat siang	bebas	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap & ketua	mahasiswa pulang ke kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	semua anggota melakukan kebutuhan pribadi	Kontrakan	Semua anggota survei

	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
selasa	04.30	Bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey dan FGD	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan dan perwakilan dari tiap kelas untuk FGD	lokasi survei dan lokasi FGD	Semua anggota survei dan Perwakilan tiap kelas untuk FGD

	12.00-13.00	break	korlap	Istirahat siang	Bebas	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap	semua anggota pulang ke kontrakan	lokasi survei	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	bebas	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
rabu	04.30	Bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei

	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	waktu bebas	bebas	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	Korlap	semua anggota pulang ke kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei

	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
kamis	04.30	bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	waktu bebas	menyesuaikan	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan	lokasi survei	Semua anggota survei

	16.30-17.00	kepulangan	korlap	semua anggota pulang ke kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei
jumat	04.30	bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei

	08.00-12.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	12.00-13.00	break	korlap	waktu bebas	menyesuaikan	Semua anggota survei
	13.00-16.30	survey	korlap & pj data	mahasiswa lanjut turun ke lapangan	lokasi survei	Semua anggota survei
	16.30-17.00	kepulangan	korlap	mahasiswa pulang menuju kontrakan	Kontrakan	Semua anggota survei
	17.00-19.00	free	korlap	waktu bebas	Kontrakan	Semua anggota survei
	19.00-20.00	pengumpulan data	korlap & pj data	seluruh anggota mengumpulkan data yang telah didapat di lapangan	Kontrakan	Semua anggota survei
	20.00-21.00	evaluasi	korlap & ketua	evaluasi kegiatan pada hari itu	Kontrakan	Semua anggota survei
	21.00	istirahat	korlap	semua mahasiswa istirahat	Kontrakan	Semua anggota survei

sabtu	04.30	Bangun pagi	korlap & semua	Semua angota bangun pagi	Kontrakan	Semua anggota survei
	04.30-07.30	MCK	korlap	mahasiswa mandi dan bersiap survei	Kontrakan	Semua anggota survei
	07.30-08.00	briefing	korlap & ketua	pengarahan oleh ketua dan korlap	Kontrakan	Semua anggota survei
	08.00-09.00	survey	korlap & pj data	mahasiswa turun ke lapangan sesuai plotingan	lokasi survei	Semua anggota survei
	09.00-10.00	persiapan pulang	korlap	semua anggota melakukan kebutuhan pribadi	Kontrakan	Semua anggota survei
	10.00	kepulangan	korlap	waktu bebas	menyesuaikan	Semua anggota survei

5.4 Struktur Organisasi Studio RA

Pelindung	: Roy Candra P Sigalingging, S.T., M.Sc., Ph.D	
Penanggung Jawab	: Dr. nat. techn. Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T.	
Pembimbing	: Dr. Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T.	
	Hediyati Anisia Br Sinamo, S.P.W.K., M.P.W.K.	
Asisten Studio	: M. Raihan Setiawan	(123220043)
	Yusriyyah Meilisa Labiibah	(12322047)
Ketua kelas RA	: Royhan Hutriansyah	(124220064)
Sekretaris	: Devin Ibnu Zane	(124220108)

Bendahara	: Daniswara Angelia Pulalo	(124220001)
PJ Data Primer	: Septia Nurlaili	(124220003)
PJ Data Sekunder	: Galuh Kusuma Ningrum	(124220111)
PJ Peta	: Haris Wicaksono	(124220109)
PJ Power Point	: Khoerun Nissa Febrian	(124220031)
PJ Laporan	: Erlita Lisdayanti Pane	(124220069)
Koordinator Lapangan	: M.Arya Yusfa Wijaya	(124220004)
PJ Isu Aspek Fisik Lingkungan	: Fakhri Zaidan Nabil	(124220177)
Anggota	: Septia Nurlaili	(124220003)
	Siti Nabila	(124220106)
PJ Isu Aspek Spasial & Keruangan	: Akmal Kevin Harahap	(124220144)
Anggota	: Royhan Hutriansyah	(124220064)
PJ Isu Aspek Infrastruktur	: Galuh Kusuma Ningrum	(124220111)
Anggota	: Haris Wicaksono	(124220109)
	M.Arya Yusfa Wijaya	(124220004)
PJ Aspek Sosial Ekonomi	: Daniswara Angelia Pulalo	(124220001)
Anggota	: Khoerunnissa Febrian	(124220031)
PJ Isu Aspek Sosial Kependudukan	: Adinda Rahmadani Putri	(124220030)
Anggota	: Ghina Ridha Nabila	(124220066)
PJ Isu Aspek Kelembagaan & Pembiayaan	: Adellia Putri Indini	(124220164)
Anggota	: Devin Ibnu Zane	(124220108)
PJ Isu Aspek Kebencanaan	: Muhammad Nurfajri	(124220067)
Anggota	: Erlita Lisdayanti Pane	(124220069)

Rencana Anggaran

NO	Nama Barang	Quantity		Keterangan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
		Jumlah	Satuan			
1.	Id Card	16	Buah	Atribut Kelas	15.000	Rp. 240.000
2.	Banner	1	Buah	Biaya dibagi untuk 2 kelas	Rp. 108.000	Rp. 54.000
3.	ATK	1	Paket	Hvs, map, pena, dll.	Rp. 100.000	Rp. 100.000
4.	Obat P3K	1	Set	Obat-obatan	Rp. 40.000	Rp. 40.000
5.	Bensin (kendaraan)	5	Motor	Pertalite/ 7 hari	Rp. 100.000	Rp. 500.000
6.	Konsumsi Mahasiswa	16	Orang	2 kali sehari (dihitung selama 6 hari)	Rp. 30.000	Rp. 2.880.000
7.	Konsumsi Dosen	2	Orang	Perkunjungan	Rp. 20.000	Rp. 40.000

8.	Konsumsi Asdos	2	Orang	Perkunjungan	Rp. 20.000	Rp. 40.000
9.	Air Galon	2	Buah	Isi ulang	Rp. 8.000	Rp. 16.000
10.	Kontrakan	1	Unit	Biaya dibagi untuk 2 kelas	Rp. 2.100.000	Rp. 1.050.000
11.	Listrik	7	Hari	Token	RP. 200. 000	Rp. 200.000
BTT (10%)						Rp. 496.000
Total						Rp. 5.160.000
Total Akhir						**Rp. 5.656.000**

DAFTAR PUSTAKA

Adib, F., & et al. . (2024). Analisis Penguatan Ekonomi Lokal di Wilayah Pesisir Lampung Selatan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 12(1), 45–56.

Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266–287.

BPS Kabupaten Lampung Selatan. (2024).

Fardani, L., Delis, P. C., P., & Caesario, R. (2021). Upaya Peningkatan Kualitas Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut Desa Way Lubuk Kecamatan Kalianda Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2(1).

Lahay, A. (2023). Upaya Peningkatan Kualitas Ekosistem Wilayah Pesisir Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian FP Unila*, 4(2), 123–132.

Manik, T., & Timotiwu, P. (2023). Sosialisasi Dampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat Pesisir: Desa Kelawi dan Desa Maja, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 3(2).

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.* Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional.* Jakarta: Jakarta: Sekretariat Negara.

Reza, M. (2022). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Kiluan Lampung. *Grouper: Jurnal Riset*, 14(1).

Reza, M. (2023). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Kiluan Lampung. *Jurnal Grouper*, 5(1), 10–20.

Widiyanto, H. (2022). *Assessment of the 2018 Anak Krakatau Tsunami and Its Impacts in Southern Lampung.* Natural Hazards and Earth System Sciences.

LAMPIRAN

Perangkat Survey

Perangkat survei adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden dalam suatu penelitian atau kegiatan survei.

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam dan jelas mengenai suatu topik penelitian.

IDENTITAS SURVEYOR		IDENTITAS RESPONDEN	
Nama		**Nama**	
NIM		**Usia**	
Hari/Tanggal		**Pekerjaan**	

Tabel tersebut digunakan sebagai lembar identitas dalam kegiatan survei yang berfungsi untuk mencatat data diri surveyor dan responden.

Masyarakat

Aspek Fisik Lingkungan

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT KECAMATAN BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat pesisir Kecamatan Bakauheni:

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi kualitas air, tanah, atau udara di Bakauheni sekarang? Apakah ada perubahan beberapa tahun terakhir?

5. Apakah ruang terbuka hijau seperti taman, hutan mangrove, atau lahan hijau di Bakauheni dirasa
   sudah cukup dan mudah diakses masyarakat?
6. Aktivitas seperti pariwisata, pelabuhan, atau pemukiman di Bakauheni menurut Bapak/Ibu memberi dampak apa terhadap lingkungan sekitar?

Aspek Kebencanaan

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada Masyarakat :

8. Jika Bapak/Ibu mendengar bunyi sirene panjang yang nyaring selama sekitar satu menit tanpa jeda, atau menerima pesan peringatan bencana melalui SMS, pengeras suara, atau media sosial, apakah Bapak/Ibu memahami maksud dari peringatan tersebut dan tahu apa tindakan yang harus segera dilakukan?
9. Saat menerima peringatan bencana, baik melalui bunyi sirine atau pesan tertulis, apakah Bapak/Ibu merasa informasi tersebut cukup jelas untuk dipahami dan langsung ditindaklanjuti? Apa yang biasanya Bapak/Ibu lakukan pertama kali?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan makna bunyi sirene yang berbeda – seperti bunyi panjang terus-menerus untuk evakuasi atau bunyi pendek-pendek sebagai tanda siaga – dan bagaimana seharusnya Bapak/Ibu merespons masing-masing jenis bunyi tersebut?
11. Dalam situasi darurat bencana, apakah Bapak/Ibu memiliki pengetahuan dan kesiapan tentang rute evakuasi, titik kumpul aman, dan perlengkapan yang harus dibawa setelah menerima peringatan bencana dari sirine atau media lainnya?
12. Pernahkah Bapak/Ibu mengalami situasi di mana sirene peringatan atau pesan bencana disampaikan, dan bagaimana Bapak/Ibu serta keluarga merespons saat itu? Apakah ada kendala dalam memahami atau melaksanakan tindakan evakuasi?
13. Seberapa yakin Bapak/Ibu bahwa peringatan yang diberikan melalui sirine, pesan singkat, atau pengeras suara akan mendorong masyarakat sekitar untuk segera bertindak dan menyelamatkan diri? Apa yang bisa ditingkatkan menurut Bapak/Ibu?

14. Menurut pengalaman atau pengetahuan Bapak/Ibu, apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggal sudah cukup teredukasi untuk memahami dan merespons peringatan bencana dengan cepat dan tepat?

Aspek Infrastruktur

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar:

8. Bagaimana kualitas bangunan serta kebersihan dan kerapian tempat perbelanjaan di daerah ini?
9. Bagaimana kondisi dan perawatan gedung pelayanan umum seperti kantor pemerintah, sekolah, puskesmas, serta rumah ibadah, apakah masih layak digunakan masyarakat?
10. Bagaimana kualitas fasilitas umum seperti taman, lapangan, tempat olahraga, serta area pemakaman, terutama dari segi kebersihan, kerapian, dan kelengkapan sarana yang ada?
11. Bagaimana kualitas infrastruktur lingkungan seperti jalan, saluran drainase, dan saluran pembuangan air limbah, apakah berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan?
12. Bagaimana kualitas sarana sanitasi dan air bersih, seperti toilet umum, MCK, serta penyediaan air minum, apakah masih layak dan terpelihara dengan baik?
13. Bagaimana kualitas fasilitas pendukung transportasi seperti lahan parkir, halte, atau terminal, apakah tertata dan terawat dengan baik?
14. Bagaimana kualitas jaringan utilitas seperti listrik, air bersih, telepon, gas, serta sarana pemadam kebakaran dan lampu penerangan jalan, apakah berfungsi dengan baik dan aman digunakan masyarakat?

Aspek Sosial Kependudukan

FORM WAWANCARA KEPADA WAWANCARA MASYARAKAT BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat bakauheni :

11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyesuaian tradisi atau adat dalam kegiatan pariwisata?
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan budaya tersebut mampu menarik perhatian pengunjung atau wisatawan?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah kegiatan pariwisata ini memberikan dampak terhadap peningkatan penghasilan atau kesempatan kerja?
14. Sejak adanya kegiatan pariwisata budaya, apakah terjadi perubahan dalam interaksi sosial antarwarga?
15. Menurut Bapak/Ibu, usaha apa yang paling banyak dijalankan orang di sekitar sini?
16. Apakah fasilitas kesehatan itu cukup dekat dan mudah dijangkau?
17. Bagaimana kondisi pemukiman di sini, apakah sudah tertata rapi atau masih tersebar?
18. Menurut Bapak/Ibu, apakah angka kelahiran di desa ini cukup tinggi atau biasa saja?
19. Bagaimana pendapatan rata-rata masyarakat menurut Bapak/Ibu, apakah sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari?
20. Berapa lama Bapak/Ibu pernah menempuh pendidikan formal dan Apakah anak-anak di rumah saat ini bersekolah? Jika tidak, apa alasannya?

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

Pertanyaan yang ditujukan kepada Masyarakat:

4. Menurut bapak/ibu, apakah sebelumnya di daerah Bakauheni Harbour City ini pernah mengalami kemacetan/keterbatasan transportasi? bagaimana pemerintah kecamatan bakauheni melakukan tanggapan terhadap keluhan masyarakat soal kemacetan/keterbatasan transportasi? Dan bagaimana cara pemerintah kecamatan bakauheni menindaklanjuti permasalahan kemacetan/keterbatasan transportasi tersebut?
5. Jika pemerintah kecamatan bakauheni tidak menanggapi/terlalu lambat dalam merespon keluhan masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah kecamatan bakauheni agar lebih cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi kemacetan dan keterbatasan transportasi?
6. Menurut Bapak/Ibu, jika adanya sebuah pembangunan di kawasan kecamatan bakauheni, apakah pembangunan yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan dirasakan manfaatnya di wilayah ini?

Wisatawan

Aspek Kebencanaan

FORM WAWANCARA KEPADA WISATAWAN DI KECAMATAN BAKAUHENI

Pertanyaan yang ditujukan kepada Wisatawan :

8. Jika saat berwisata Bapak/Ibu mendengar bunyi sirene panjang yang nyaring atau menerima peringatan bencana melalui SMS, pengeras suara, atau dari petugas, apakah Bapak/Ibu memahami maksud dari peringatan tersebut dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya?
9. Apakah sebelum atau saat berkunjung ke tempat wisata ini, Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang potensi bencana (seperti tsunami, erupsi gunung, banjir, dll) dan langkah evakuasi jika terjadi keadaan darurat?
10. Bagaimana Bapak/Ibu akan merespons jika tiba-tiba ada sirine atau pengumuman evakuasi di lokasi wisata? Apakah Bapak/Ibu tahu ke mana harus pergi untuk mencari tempat aman atau titik kumpul?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu, informasi peringatan bencana di tempat wisata seperti papan petunjuk, jalur evakuasi, atau instruksi dari petugas cukup jelas dan mudah dipahami oleh wisatawan?
12. Jika peringatan disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal, apakah Bapak/Ibu dapat memahaminya dengan baik? Perlukah menurut Bapak/Ibu adanya peringatan dalam bahasa asing seperti Inggris untuk wisatawan?
13. Pernahkah Bapak/Ibu mengalami kejadian bencana atau peringatan darurat saat sedang berwisata? Bagaimana pengalaman tersebut dan tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan saat itu?
14. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu agar wisatawan dapat lebih siap dan cepat tanggap saat terjadi bencana di lokasi wisata?

Tokoh Adat

Aspek Sosial Kependudukan

FORM WAWANCARA KEPADA WAWANCARA TOKOH ADAT

Pertanyaan yang ditujukan kepada Tokoh Adat :

5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran tokoh adat, pemerintah desa, dan lembaga lokal dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan masyarakat agar tetap diwariskan ke generasi muda?
6. Bagaimana keterlibatan tokoh adat atau lembaga adat dalam kegiatan budaya di BHC?
7. Sejauh mana Bapak/Ibu dan lembaga adat terlibat dalam kegiatan budaya di sini?
8. Berapa banyak program atau kegiatan pelestarian budaya yang saat ini dijalankan?

Balai Desa

Aspek Kependudukan dan Kebudayaan

FORM WAWANCARA KEPADA BALAI DESA

Pertanyaan yang ditujukan kepada aparat desa/kelurahan :

12. Bagaimana pemerintah desa/kelurahan melihat peran BHC dalam mendorong inovasi atau adaptasi budaya lokal agar tetap relevan dengan perkembangan zaman?
13. Sejauh mana desa/kelurahan berperan dalam mendukung integrasi budaya lokal ke dalam pariwisata BHC?
14. Menurut pandangan pemerintah desa/kelurahan, apakah keberadaan BHC berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Jika iya, dalam aspek apa saja?
15. Bagaimana desa/kelurahan melihat perubahan interaksi sosial masyarakat sejak adanya BHC?
16. Bagaimana peran pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung tokoh adat dan lembaga lokal untuk melestarikan budaya masyarakat?
17. Apa saja sumber mata pencaharian utama masyarakat di desa/kelurahan ini?
18. Bagaimana tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat di desa/kelurahan ini?
19. Apakah masyarakat memiliki akses yang mudah ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit)?
20. Bagaimana kepadatan penduduk di desa/kelurahan ini?
21. Berapa jumlah kelahiran hidup dan kematian penduduk dalam satu tahun terakhir?
22. Bagaimana kualitas hidup masyarakat dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi?

UMKM

Aspek Sosial Ekonomi

FORM WAWANCARA KEPADA WAWANCARA UMKM

Pertanyaan yang ditujukan kepada UMKM di Kecamatan Bakauheni :

7. Jenis usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan? Mengapa memilih usaha tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu, usaha apa yang paling banyak/dominan di daerah ini?
9. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini, apakah terkait dengan modal, pemasaran, tenaga kerja, atau fasilitas, Berikan alasannya?
10. Apakah usaha Bapak/Ibu mempekerjakan warga sekitar? Jika ya, berapa orang yang Bapak\ibu kerjakan ?
11. Sejauh mana jangkauan pemasaran atau distribusi produk/jasa dari usaha Bapak/Ibu?
12. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dirasakan terhadap perkembangan usaha setelah adanya pengembangan KSPN - Bakauheni Harbour City (BHC)? Apakah usaha Bapak/Ibu lebih maju atau ada perubahan tertentu? (Khusus UMKM di sekitar Bakauheni Harbour City/Desa Bakauheni)

Dinas Perhubungan

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA DINAS PERHUBUNGAN

Pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan

3. Apakah Dinas Perhubungan Kecamatan Bakauheni memiliki aturan atau kebijakan transportasi untuk mendukung pengembangan Bakauheni Harbour City?
4. Sejauh mana aturan dan kebijakan tersebut berjalan efektif dalam mengurangi kemacetan di sekitar Bakauheni Harbour City?

Dinas PUPR

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA DINAS PUPR

Pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas PUPR:

1. Apakah sebelumnya Dinas PUPR kecamatan bakauheni pernah melaksanakan program pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan dan mengatur lalu lintas di Bakauheni Harbour City?
2. Jika YA, Apakah penanganan untuk pelebaran jalan dan mengatur lalu lintas sudah berjalan dengan baik?
3. Apakah pihak Dinas PUPR kecamatan bakauheni sudah melakukan evaluasi mengenai dampak pelebaran jalan terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan Bakauheni Harbour City?

BPKAD

Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

FORM WAWANCARA KEPADA BPKAD

Pertanyaan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) :

6. Apakah alokasi APBD untuk Kecamatan Bakauheni sudah disesuaikan dengan rencana pengembangan yang ditetapkan pemerintah daerah?
7. Bagaimana BPKAD memastikan penggunaan anggaran tersebut berjalan efektif dan benar-benar mendukung prioritas pembangunan di Kecamatan Bakauheni?
8. Apa saja sumber dana yang dialokasikan pemerintah untuk wilayah deliniasi Kecamatan Bakauheni?
9. Berapa besar anggaran yang dialokasikan dan bagaimana mekanisme pembagiannya agar sesuai dengan APBD dan tepat sasaran?
10. Apakah pihak BPKAD mengetahui berapa jumlah investasi yang ada di kecamatan bakauheni?

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kondisi, atau situasi tertentu di lapangan untuk mendapatkan informasi faktual tanpa harus melalui pernyataan responden.

IDENTITAS SURVEYOR		IDENTITAS RESPONDEN	
Nama		**Nama**	
NIM		**Usia**	
Hari/Tanggal		**Pekerjaan**	

Tabel tersebut digunakan sebagai lembar identitas dalam kegiatan survei yang berfungsi untuk mencatat data diri surveyor dan responden.

Spasial Keruangan

Observasi Konektivitas Jaringan Jalan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui konektivitas jaringan jalan di kecamatan bakauheni dari Bakauheni Harbour City (BHC) dengan desa Hatta dan desa Kelawi

Keterangan :

- Keterhubungan antar ruas jalan
- Integrasi dengan moda transportasi lain

No	Jenis (Keterhubungan antar ruas jalan,Integrasi dengan moda transportasi lain	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.				

2.				
3.				
4.				

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Aksesibilitas Jalan Desa Hatta, Desa Kelawi Menuju Desa Bakauheni

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi dan kondisi aksesibilitas jalan dari Desa Hatta, Desa Kelawi menuju Desa Bakauheni

Keterangan:

- kondisi jalan
- Lebar jalan
- Kelancaran arus kendaraan

No.	(Jenis: kondisi jalan, Lebar jalan dan kelancaran arus kendaraan)	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.				
2.				

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Aksesibilitas Antar Ruang

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi serta menilai kondisi aksesibilitas antar ruang Desa Kelawi, Desa Hatta dengan Bakauheni Harbour City

Keterangan: Ketersediaan akses dari pelabuhan ke pusat ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

No.	Lokasi	Jenis (Pusat Ekonomi, Pendidikan, Pendidikan, Pelayanan Publik)	Keterangan	Gambar
1.				
2.				

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera

Observasi Kesesuaian Fungsi Struktur Jalan

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi dan kondisi kesesuain fungsi struktur jalan Desa Hatta, Desa Kelawi dengan Bakauheni Harbour City (BHC)

Keterangan:

-Jalan Arteri

-Jalan Kolektor

-Lokal

No.	Lokasi	Jenis Jalan (Arteri, Kolektor, Lokal)	Kesesuaian Fungsi Jalan	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.						
2.						

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi alih fungsi lahan di Kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.			
2.			

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

Observasi Hierarki Wilayah Di Daerah Kecamatan Bakauheni

Observasi ini merupakan salah satu bagian dari pengumpulan data dalam menyelesaikan Mata Kuliah Studio Dasar Perencanaan yang bertujuan untuk menganalisis struktur hierarki wilayah desa-desa di wilayah kecamatan Bakauheni

No.	Lokasi	Keterangan	Gambar
1.			
2.		:	

Note: Cantumkan lokasi ketika mengambil gambar (menggunakan GPS Maps Camera)

5.3.3 Kuisioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk dijawab oleh responden, dengan tujuan memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian, baik dalam bentuk pilihan ganda maupun isian terbuka.

IDENTITAS SURVEYOR		**IDENTITAS RESPONDEN**	
Nama		**Nama**	
NIM		**Usia**	
Hari/Tanggal		**Pekerjaan**	

Tabel tersebut digunakan sebagai lembar identitas dalam kegiatan survei yang berfungsi untuk mencatat data diri surveyor dan responden.

Aspek Sosial Ekonomi

KUISIONER KEPADA MASYARAKAT LOKAL

Pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat lokal kecamatan Bakauheni:

1. Apa pekerjaan utama Bapak/Ibu saat ini? (Dalam sektor apa)
   - ☐ Pariwisata
   - ☐ Perdagangan
   - ☐ Jasa
   - ☐ Lainnya:

2. Bagaimana perkembangan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat di sekitar Bakauheni dalam lima tahun terakhir?

☐ Sangat berkembang

☐ Cukup berkembang

☐ Tidak banyak berubah

☐ Menurun

Menurut Bapak/Ibu, apa penyebabnya?

3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu perubahan jumlah wisatawan yang datang ke Bakauheni dalam beberapa tahun terakhir?

   ☐ Sangat meningkat

   ☐ Cukup meningkat

   ☐ Tidak banyak berubah

   ☐ Menurun

   Menurut Bapak/Ibu, apa penyebabnya?

4. Apa saja dampak yang Bapak/Ibu rasakan dari meningkatnya kunjungan wisatawan pada kehidupan ekonomi lokal?

   ☐ Menambah lapangan kerja

   ☐ Menambah peluang usaha

   ☐ Meningkatkan pendapatan

   ☐ Tidak berdampak sama sekali

   ☐ Lainnya:

5. Apa jenis usaha yang paling berkembang akibat adanya wisatawan di Bakauheni menurut Bapak/Ibu? (Boleh pilih lebih dari satu)
   - ☐ Kuliner
   - ☐ Penginapan/Akomodasi
   - ☐ Transportasi lokal
   - ☐ Kerajinan dan oleh-oleh
   - ☐ Lainnya


MENARA SIGE